



UNIVERSITAS INDONESIA

**POLA PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN
PEMUDA PESISIR
(Studi Kasus Pemberdayaan Pemuda Nelayan Di Pesisir
Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**BAMBANG SETIAWAN
NPM 0906596191**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN
KEPEMIMPINAN
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip ataupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Bambang Setiawan

NPM : 0906596191

Tanda Tangan :



Tanggal : 8 Juli 2011

LEMBAR PENGESAHAN

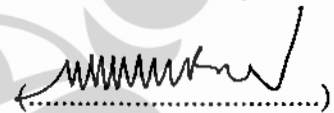
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Bambang Setiawan
NPM : 0906596191
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional, Peminatan Kajian
Stratejik Pengembangan Kepemimpinan
Judul Tesis : Pola Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda Pesisir
(Studi Kasus Pemberdayaan Pemuda Nelayan Di
Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang
Propinsi Banten).

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Peminatan Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

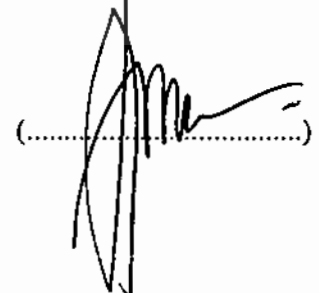
Pembimbing : DKS. Nugraha, MSi, MBA



Ketua Sidang : Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM



Penguji : Dr. MH. Thamrin



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Program Studi Ketahanan Nasional, Peminatan Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Penulis juga menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik sejak masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan tesis, sangatlah sulit untuk menyelesaikan masa pendidikan ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini ;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, khususnya unit eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), yang telah memberikan ijin untuk mengikuti pendidikan ini ;
3. Bapak DKS Nugraha, MSi, MBA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan banyak inspirasi serta pengarahan dalam penulisan tesis ini ;
4. Ibunda Mulyati orang tua penulis, Isteriku tercinta Nining Widiyowati dan ananda terkasih Fawwaz Ramadhany Widyoatmodjo, serta semua anggota keluarga yang selalu memberikan dorongan, semangat dan doa. Terima kasih atas keikhlasan pengorbanan waktu kalian semua ;
5. Jajaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dan semua responden di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, terima kasih atas segala informasi dan kerjasamanya selama ini ;

6. Semua teman-teman angkatan IV Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan yang tidak pernah bosan saling memberikan motivasi dan saling membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas segala dukungan demi kelancaran masa pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia selama ini. Semoga jasa baik tersebut dapat dibalas oleh Allah SWT dengan pahaia yang berlipat.

Pada akhirnya penulis juga meyakini bahwa hasil karya ini masih jauh dari kata sempurna, sangat terbuka kritik dan saran demi penyempurnaan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Penulis berharap hasil karya ini dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran bagi upaya pemberdayaan pemuda Indonesia pada umumnya maupun pemuda pesisir pada khususnya di dalam berkarya dan mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Jakarta, 8 Juli 2011

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Setiawan
NPM : 0906596191
Konsentrasi Peminatan : Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pola Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda Pesisir (Studi Kasus Pemberdayaan Pemuda Nelayan Di Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten)”

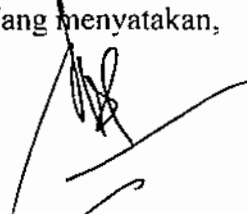
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan,


(Bambang Setiawan)

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN**

**BAMBANG SETIAWAN
0906596191**

**Pola Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda Pesisir (Studi Kasus
Pemberdayaan Pemuda Nelayan Di Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten
Tangerang Propinsi Banten)**

Isi xii + 82 halaman, 5 Bab, 10 gambar, dan 6 tabel.

Daftar pustaka : 33 buku, 1 dokumen lembaga, 1 skripsi, 4 tesis dan 1 disertasi
Buku-buku yang digunakan antara tahun 1985 sampai dengan tahun 2010.

ABSTRAK

Prospek pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan Indonesia menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, penerimaan devisa melalui ekspor dan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara berkesinambungan. Namun, kekayaan sumber daya laut tersebut belum memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat pesisir karena kelompok nelayan justru menjadi kaum yang terpinggirkan. Masyarakat pesisir termasuk didalamnya nelayan terutama para generasi mudanya harus ditingkatkan kapabilitasnya, supaya dapat menghindari ketertinggalannya karena faktor kemiskinan. Penelitian ini mencoba merumuskan bentuk pola pemberdayaan yang sesuai bagi peningkatan kapabilitas kewirausahaan pemuda pesisir dalam mengelola potensi sumber daya perikanan dan kelautan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan selama ini tidak dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan karena kurangnya koordinasi dari pemerintah, kurang luasnya kemitraan dengan swasta dan *stakeholder*. Untuk penerapan pola pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapabilitas ketrampilan kewirausahaan pemuda yang sesuai dengan potensi sumber daya wilayah pesisir, harus memperhatikan berbagai dimensi yang berkembang seperti dimensi pengetahuan lokal, religi, ekonomi, kelembagaan dan politik. Pemberdayaan tersebut harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan keberlanjutan usaha, pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya. Pemberdayaan juga memerlukan pendampingan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan akses informasi, serta adanya kemitraan yang luas antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam pengembangan usaha di wilayah pesisir.

Kata kunci :

Pemuda pesisir, kapabilitas, kewirausahaan, pemberdayaan

**UNIVERSITY OF INDONESIA
GRADUATE PROGRAM
STUDIES ON NATIONAL SECURITY PROGRAM
STUDIES OF STRATEGIC LEADERSHIP DEVELOPMENT**

**BAMBANG SETIAWAN
0906596191**

Patterns of Coastal Youth Empowerment Entrepreneurship (Youth Empowerment Case Studies of Coastal District Fishermen In Kronjo Tangerang District, Banten Province)

Contents xii + 82 pages, 5 Chapters, 10 images, and 6 tables.
Bibliography: 33 books, an agency document, a thesis, 4 thesis and a dissertation.
The books used between 1985 until 2010

ABSTRACT

Utilization of fishery resources management prospects Indonesia became one of the strategic economic activities to enhance community welfare, employment, foreign exchange earnings through exports and the State Revenue on an ongoing basis. However, the wealth of marine resources has not contributed the maximum to the welfare of coastal communities as a group of fishermen became the marginalized. Coastal communities including fishermen, especially the younger generation should be increased capabilities, in order to avoid the catch because of poverty. This study tries to formulate an appropriate form of empowerment pattern for the increase in youth entrepreneurship capability in managing the potential for coastal fisheries and marine resources.

The study used a qualitative approach descriptive method. The results showed that the implementation of empowerment has been unable to walk up and sustained because of lack of coordination of government, the less the extent of partnerships with the private sector and stakeholders. For the application of patterns in order to increase the capability of empowering youth entrepreneurship skills in accordance with the resource potential of coastal areas, should consider developing a variety of dimensions such as the dimensions of local knowledge, religious, economic, institutional and political. Empowerment must involve the community as major stakeholders in the planning, implementation, supervision, development and sustainability of business, community economic development and its territories. Empowerment also requires assistance in improving the knowledge, skills and access to information, as well as a broad partnership between communities, government officials and private business development in coastal areas.

Key words :

Youth coastal, capability, entrepreneurship, empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Batasan Penelitian	11
1.6. Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah	14
1.7. Waktu Penelitian	15
1.8. Sistematika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum Karakteristik Wilayah Pesisir	17
2.1.1. Wilayah Pesisir	17
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir	19
2.1.3. Karakteristik Masyarakat Pesisir	21
2.1.4. Pemuda Pesisir	22
2.2. Tinjauan Umum Pemberdayaan	25
2.2.1. Konsep Pemberdayaan	25
2.2.2. Pemberdayaan Komunitas	27
2.2.3. Pemberdayaan Pemuda	28
2.2.4. Proses Pemberdayaan Pemuda	32
2.2.5. Dimensi Pemberdayaan Pemuda Pesisir	35
2.3. Tinjauan Kewirausahaan	38
2.3.1. Motivasi	38
2.3.2. Kewirausahaan (<i>Entrepreneurship</i>)	40
2.3.3. <i>Entrepreneur Proclivity</i>	43
2.4. <i>Dynamic Capability</i>	45
2.5. Penelitian Terdahulu	46
BAB III. METODE PENELITIAN	50
3.1. Rancangan Penelitian	51
3.2. Informan	51
3.3. Operasionalisasi Konsep	52

3.4. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	53
3.5. Metode Pengumpulan Data Penelitian	53
3.6. Teknik Pengolahan Data	54
3.7. Model Analisis	54
BAB IV. PEMBAHASAN	56
A. Pola-pola Pemberdayaan Pemuda Pesisir Yang Ada di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang	56
B. Pola Pemberdayaan Yang Sesuai Bagi Pemuda Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang	59
4.1. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Pengetahuan Lokal	61
4.2. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Sistem Religi	66
4.3. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Ekonomi	69
4.4. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Kelembagaan	74
4.5. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Politik	77
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR REFERENSI	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR GAMBAR

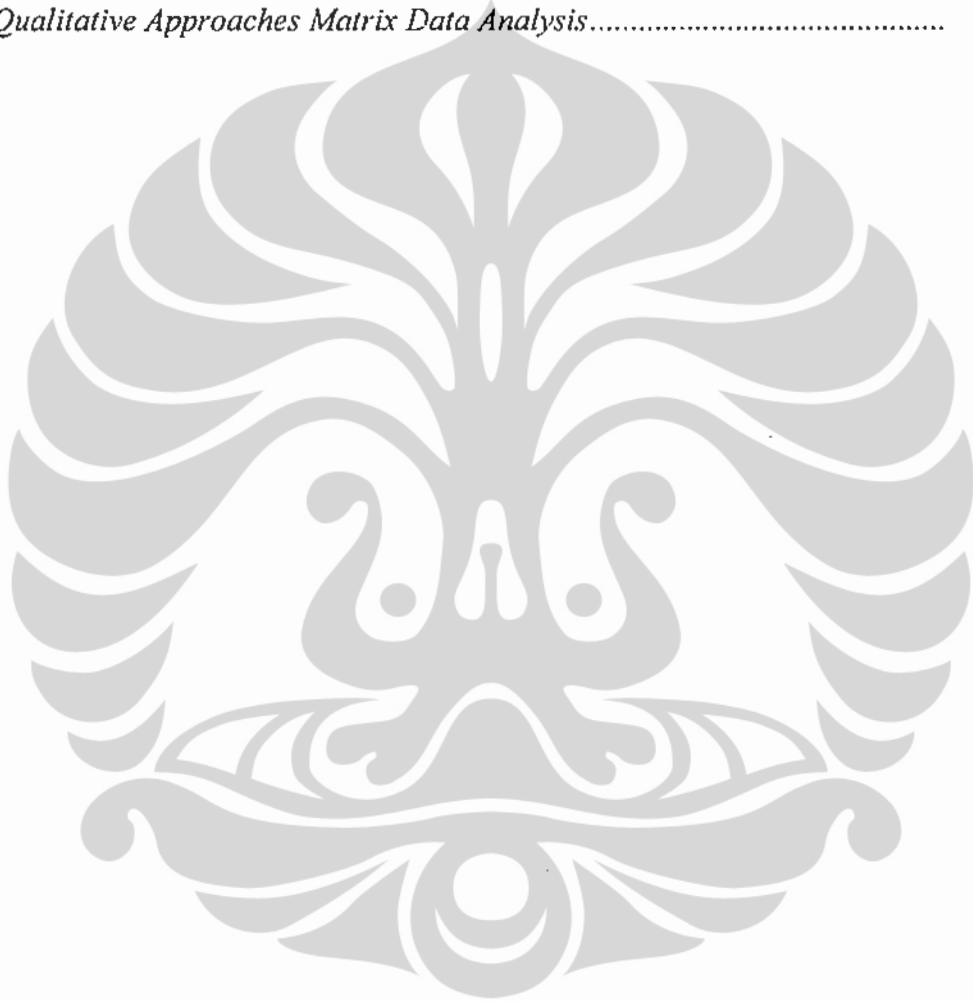
Gambar 1.1.	Grafik Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2009	5
Gambar 1.2.	Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah.....	14
Gambar 3.1.	Konsep Kapabilitas Kewirausahaan	52
Gambar 3.2.	Skema Model Analisis Interaktif	55
Gambar 4.1.	Pola Pemberdayaan Pemuda Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang sudah berjalan	59
Gambar 4.2.	Proses Pembelajaran Orang Dewasa.....	68
Gambar 4.3.	Model Perubahan Perilaku Melalui Sikap	68
Gambar 4.4.	Tahapan Pemberdayaan Ekonomi pada Peningkatan Kewirausahaan Pemuda Nelayan di wilayah Pesisir	72
Gambar 4.5.	Skema Alur Pemikiran Pengembangan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda Pesisir	76
Gambar 4.6.	Rancangan Pola Pemberdayaan Untuk Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Statistik Potensi Industri Kabupaten Tangerang.....	4
Tabel 1.2.	Penyebaran Alumni Sekolah Tinggi Perikanan tahun 2006 – 2010.....	7
Tabel 2.1.	Tahapan Intervensi Pemberdayaan Masyarakat.....	34
Tabel 2.2.	Karakteristik Wirausahawan.....	41
Tabel 2.3.	Perbedaan antara Wirausahawan dan Manajer	42
Tabel 4.1.	Komposisi Kandungan Nutrisi Bahan Baku Pakan Ikan	63

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	87
Transkripsi Wawancara	90
<i>Qualitative Approaches Matrix Data Analysis</i>	145



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sekitar 17.502 buah pulau, dan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta Km², yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta Km² serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta Km². Berdasarkan hasil pengkajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan laut Indonesia tersebut diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun. Prospek pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan Indonesia menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis dinilai sangat cerah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, penyediaan lapangan kerja, penerimaan devisa melalui ekspor dan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Namun, kekayaan sumber daya laut tersebut belum memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, kelompok nelayan justru menjadi bagian kelompok terpinggirkan. Masyarakat pesisir termasuk didalamnya para nelayan harus ditingkatkan kapabilitasnya, supaya dapat menghindari ketertinggalannya karena faktor kemiskinan. Konsep peningkatan kapabilitas masyarakat pesisir adalah suatu upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan masyarakat pesisir dalam berusaha. Sehingga suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin terasakan.

Menurut Moeljarto (1997), kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan

ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variable-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel super-struktur yaitu adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini dapat diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang nyata bagi kepentingan masyarakat miskin.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (*patron*) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (*indigenous*) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di beberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga.

Menurut Bengen, D.G. (2001), masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Namun selanjutnya, definisi populasi masyarakat pesisir hanya akan difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil.

Untuk mendukung penelitian ini telah dilakukan pengamatan lapangan pendahuluan di wilayah pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Lokasi ini terletak pada koordinat $106^{\circ}40'40''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}7'43''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 4.334,71 Ha. Berada pada ketinggian sekitar 3 m dari permukaan laut, mempunyai curah hujan rata-rata per bulan 1.063 mm dan temperatur udara berkisar antara 23°C - 33°C . Iklim ini dipengaruhi oleh wilayah di bagian utara yang merupakan daerah pesisir pantai sepanjang kurang lebih 51 km. Jarak Kecamatan Kronjo ke Ibu Kota Kabupaten Tangerang sekitar 42 Km yang dihubungkan dengan jalan kabupaten. Sementara jarak antara Kecamatan Kronjo dengan Jakarta, sekitar 72 km, yang bisa ditempuh dengan waktu 2,5 jam. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kronjo, yaitu :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 kemarin, jumlah penduduk Kecamatan Kronjo sebesar 56.514 orang yang terdiri dari 27.379 laki-laki dan 29.135 perempuan yang tinggal di 10 desa, yaitu Blukbuk, Bakung, Pasir, Cirumpak, Pagedangan Udik, Pasilian, Pagenjahan, Muncung, Kronjo dan Pagedangan Ilir. Pekerjaan cukup variatif, yaitu antara lain pedagang sebesar 3.867 orang, petani penggarap sebesar 3,762 orang, petani dengan lahan sendiri sebesar 2.954 orang, buruh industri sebesar 2.953 orang dan nelayan sebesar 1.953 orang.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut juga terlihat bahwa penduduk Kecamatan Kronjo belum dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi, rata-rata hanya tamat pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, sementara yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi masih relatif sedikit. Mereka masih beranggapan bahwa untuk dapat bekerja di sektor industri tidak perlu sekolah yang lebih tinggi, asalkan sudah memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, bisa membaca, dan berhitung dianggap sudah mampu sebagai bekal mencari pekerjaan.

Berdasarkan tata Ruang kabupaten Tangerang, kegiatan industri dan pergudangan diarahkan pada kawasan dengan mencadangkan lahan seluas 3000 Ha dan zona industri seluas 4.500 Ha yang tersebar di kecamatan Cikupa, Balaraja, Cisoka, Pasar Kemis, Legok dan Serpong

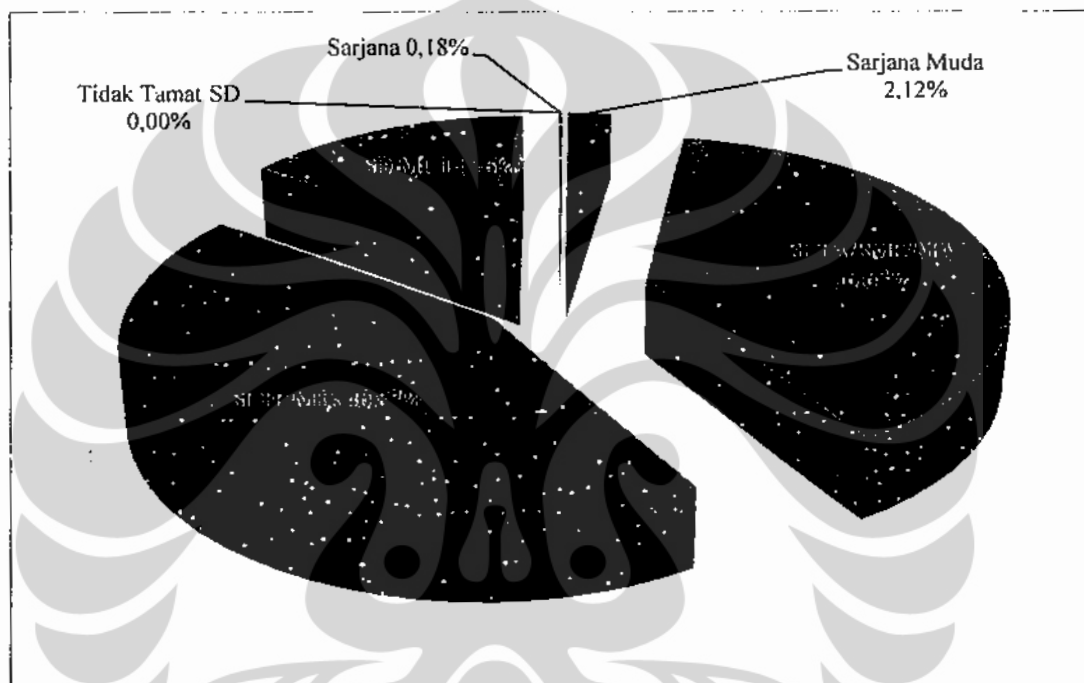
Tabel. 1.1. Statistik Potensi Industri Kabupaten Tangerang

JENIS INDUSTRI	JUMLAH USAHA	TENAGA KERJA	PENDAPATAN (JUTA RUPIAH)
Tekstil, pakaian jadi dan kulit	140	113.441	2.600.861
Barang dari logam, mesin, dan perlengkapannya	161	28.827	1.399.524
Kimia, barang dari kimia, minyak, batubara dan barang dari plastik	115	17.168	1.120.448
Makanan dan minuman	61	7.401	1.076.654

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang (2009)

Dengan potensi industri yang demikian besar, banyak menarik minat para pemuda untuk bekerja di sektor tersebut. Para pencari kerja di sektor industri didominasi oleh lulusan SLTA, seperti terlihat pada gambar 1 sebagai berikut

Gambar 1.1. Grafik Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2009



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang (2010)

Tingkat pendidikan di masyarakat nelayan masih rendah salah satunya disebabkan oleh kemiskinan dan kondisi sosial budaya (*socio cultural*) sehingga nelayan tidak dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Selain itu pandangan nelayan terhadap pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat pendidikan di masyarakat nelayan. Pendidikan diperlukan di kalangan anak nelayan untuk bekal di masa yang akan datang agar nelayan tidak terus berputar dalam sebuah lingkaran kemiskinan yang tidak berujung. Kehidupan nelayan yang serba kekurangan ternyata mempengaruhi persepsi mereka terhadap pendidikan. Walaupun bagi nelayan, pendidikan adalah hal yang penting dan bermanfaat namun ada kecenderungan bahwa mereka kurang berambisi untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi (Yuniarti, 2000). Keterbatasan ekonomi dan

kenyataan yang ditemui sehari-hari, dengan kesempatan bekerja amat terbatas, mempengaruhi persepsi mereka terhadap manfaat pendidikan formal.

Berdasarkan pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang mendera kehidupan masyarakat pesisir tidak hanya karena faktor daya dukung lingkungan pesisir dan kelemahan kualitas sumber daya manusia pesisir. Mereka tereksklusi dari pembangunan, sehingga negara dan masyarakat umum juga harus bertanggung jawab atas kemiskinan tersebut. Ketiga faktor yaitu lingkungan, sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah dan masyarakat sipil memiliki kontribusi pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

1.2. Perumusan Masalah

Kendala sumberdaya manusia menghalangi optimalisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada umumnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir pada khususnya. Karena pentingnya sumberdaya manusia, baik sebagai objek dan subjek pembangunan, maka otomatis keberadaannya menentukan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sumberdaya manusia yang rendah kualitasnya tentu saja mempengaruhi secara negatif kinerja pembangunan. Sebaliknya sumberdaya manusia yang tinggi kualitasnya, bila juga ditunjang kuantitas, akan secara positif menentukan kinerja pembangunan.

Untuk menciptakan SDM yang handal harus diperhatikan bagaimana pembinaan terhadap pemudanya. Berdasarkan Data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas BPS) 2005, jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 215.933.745 orang. Dari jumlah tersebut, kelompok yang dikategorikan pemuda atau yang berusia 15-35 tahun, diperkirakan berjumlah sekitar 79.363.477 jiwa atau 36,75% dari jumlah penduduk seluruhnya, untuk itu perlu perhatian dan penanganan yang tepat dalam pengembangan potensi pemuda itu.

Gejala menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pada sektor perikanan terjadi secara global. Karena bisnis menangkap ikan dinilai sebagai bisnis yang memiliki sifat *dangerous*, *dirty*, dan *desperate* maka orang muda berhenti menjadi nelayan atau tidak mau masuk bekerja pada usaha ini. Disebut *dangerous* karena memang menangkap ikan penuh bahaya yang mengancam keselamatan. Disebut *dirty* karena usaha ini memang bernuansa dekil, bau amis, diterjang sinar matahari, dan tidak seperti pekerjaan di kantor. Disebut *desperate*

karena menjalankan bisnis ini mengandung makna nekat dan aneh karena hanya mereka yang demikianlah yang mau tinggal sehari-hari di laut. Karena persepsi tersebut, maka generasi muda Korea dan Jepang banyak yang tidak mau menjadi nelayan, sehingga yang bekerja di sektor perikanan adalah nelayan usia tua. Karena alasan kurang sumberdaya manusia usia muda maka Korea dan Jepang merekrut nelayan dari negara lain, yaitu dari Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina, untuk mengoperasikan kapal-kapal perikanan laut dalam (*deep-sea fishing*).

Untuk pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan dan terpadu, ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas adalah penentu utama kesenjangan implementasi kebijakan di lapangan. Akibat sumberdaya manusia yang tidak berkualitas, kebijakan pemerintah pusat dalam hal pembangunan pesisir diinterpretasikan dan diimplementasikan secara berbeda di tingkat daerah. Sementara itu di tingkat nasional, minat pemuda untuk bekerja pada usaha perikanan cenderung semakin berkurang. Bila dilihat dari alumni sekolah kejuruan perikanan, hanya sedikit yang ingin turun ke laut sebagai nelayan ataupun berwirausaha mandiri di sektor perikanan dan kelautan.

Tabel 1.2. Penyebaran Alumni Sekolah Tinggi Perikanan tahun 2006 – 2010

No	Tahun Lulus	SPNS/ TNI/ Polri	Perusahaan Swasta	Wirausaha Perikanan	Panji/ Studi	Bim. Termonitor	Jumlah
1	2006	73	57	24	7	135	296
2	2007	66	98	85	36	24	309
3	2008	77	117	132	5	4	335
4	2009	36	74	0*)	0*)	194	304
5	2010	86	0*)	0*)	0*)	241	327
	Jumlah	338	346	241	48	598	1571

Keterangan : *) Belum Termonitor

Sumber : Pusdik KP – Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) - "telah diolah kembali"

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dirujuk ini, dapat dikatakan bahwa kehadiran nelayan masih memiliki arti penting dalam menentukan kinerja produksi perikanan. Pada skala lebih luas tentu saja kehadiran nelayan ikut

mempengaruhi atau menentukan pembangunan perikanan serta pembangunan pesisir di suatu daerah. Dengan adanya kecenderungan turunnya kualitas nelayan, berkurangnya kuantitas nelayan usia muda, sementara di sisi lain, kehadiran nelayan masih sangat diperlukan maka diperlukan upaya strategis untuk memberdayakan kaum muda di wilayah pesisir dengan pendekatan yang memadai.

Karakteristik ekonomi perikanan tangkap yang khas adalah tingkat pendapatan nelayan sangat fluktuatif, selain itu investasi yang mahal, dan risiko usaha yang tinggi menjadikan sektor usaha ini hanya diminati oleh orang yang benar-benar berani berspekulasi. Kaum muda yang terdidik dikalangan masyarakat pesisir jarang yang memasuki usaha kegiatan ini dengan beragam alasan. Mereka lebih menyukai memilih pekerjaan di sektor formal dengan alasan memperoleh penghasilan yang pasti daripada mengembangkan kegiatan ekonomi pesisir. Bahkan kegiatan kenelayan dicitrakan sebagai kegiatan ekonomi yang kurang terhormat, hanya untuk orang-orang tua, dan kurang memberikan jaminan masa depan. Kekurangterlibatan para pemuda pesisir sebagai pelaku ekonomi dan pelopor dinamika sosial di kawasan pesisir akan menghambat pembangunan masyarakat pesisir pada masa depan dan berpotensi menjadi ancaman kelangsungan pekerjaan sebagai nelayan.

Menurut Dault (2007), apabila kecenderungan penurunan jumlah nelayan usia muda terus berlanjut, padahal kehadiran mereka sangat diperlukan, maka hal tersebut akan sangat menentukan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang. Bukan tidak mungkin bahwa situasi ini akan membuat sumberdaya kelautan dan perikanan bukan dimanfaatkan oleh rakyat dan Bangsa Indonesia tetapi sebaliknya oleh negara asing melalui infiltrasi secara tidak legal. Dari sisi konstelasi politik dan perspektif ketahanan nasional secara makro, itu berarti bahwa persatuan dan kesatuan serta eksistensi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan (*archipelagic state*) akan terganggu

Dalam upaya mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan menjaga kelestarian sumber daya lingkungan sehingga dapat menjamin kelangsungan pekerjaan, pendapatan, dan kehidupan masyarakat pesisir, maka harus dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

khususnya para generasi mudanya. Keterlibatan para pemuda pesisir dalam kegiatan pembangunan lokal bertujuan agar potensi sumber daya pesisir dan laut yang ada dapat dikelola secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Program pemberdayaan pemuda pesisir harus mampu meningkatkan keterlibatan para pemuda dalam pembangunan. Upaya-upaya peningkatan pendapatan dengan bantuan dana bergulir, melibatkan anggota dengan sukarela, mobilisasi partisipasi komunitas ke dalam program, tidak akan banyak membantu komunitas bila mereka tidak dilibatkan secara aktif. Mereka harus diberi kepercayaan untuk menentukan pilihannya, sehingga diperlukan suatu metode pendekatan baru melalui penekanan pada proses dengan pelibatan secara aktif kelompok sasaran. Substansi utama dari pemberdayaan pemuda pesisir adalah menanggulangi eksklusi sosial yang dialami oleh komunitas pemuda pesisir dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Salah satu pendekatan pengembangan masyarakat khususnya untuk memberdayakan pemuda pesisir adalah menumbuhkan motivasi kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan mereka. Dengan latar belakang keterbatasan ekonomi dan kenyataan yang ditemui sehari-hari, serta kesempatan bekerja amat terbatas akibat kurangnya akses pendidikan formal, memberdayakan pemuda pesisir melalui bimbingan kewirausahaan merupakan langkah yang mudah, murah dan dapat dilakukan oleh banyak pihak yang berkepentingan dengan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dari uraian diatas, dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seperti apakah pola-pola pemberdayaan pemuda pesisir yang ada di kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang?
2. Pola pemberdayaan seperti apakah yang sesuai bagi pemuda pesisir kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kapabilitas keterampilan berwirausaha (*entrepreneurship*) dalam mengelola potensi sumber daya perikanan dan kelautan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah perencanaan perumusan kebijakan berkaitan dengan upaya pemberdayaan para generasi muda di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, yang diuraikan sebagaimana berikut :

1. Dapat menggambarkan pola-pola pemberdayaan pemuda pesisir yang ada di kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.
2. Dapat memperoleh pola pemberdayaan yang sesuai bagi pemuda pesisir kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kapabilitas keterampilan berwirausaha (*entrepreneurship*) dalam mengelola potensi sumber daya perikanan dan kelautan.

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan misalnya Pemerintah Propinsi Banten, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam perumusan strategi dan perencanaan pengembangan kawasan pesisir melalui pemberdayaan kewirausahaan pemuda pesisir untuk pengelolaan potensi sumber daya perikanan dan kelautan, secara profesional, optimal, dan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Dengan rumusan yang tepat, hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pengembangan pola pemberdayaan pemuda pesisir pada khususnya oleh Pemerintah Propinsi Banten dan dapat menjadi bahan rujukan kebijakan secara nasional oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4.2. Manfaat Akademis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat akademik terutama pemerhati masalah pemberdayaan masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya pesisir, khususnya sumber daya perikanan dan kelautan, secara profesional, optimal, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kebiasaan-kebiasaan lokal, kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang.

1.5. Batasan Penelitian

Agar kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan baik maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek yaitu :

1. Pemuda dalam penelitian ini diartikan sebagai mereka berkelamin laki-laki atau perempuan, berusia 16 - 30 tahun, merupakan penduduk di daerah penelitian, serta bekerja dalam bidang kelautan dan perikanan
2. Peran pemuda dalam penelitian ini diartikan sebagai keikutsertaan seorang pemuda dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai salah satu atau satu-satunya mata pencaharian. Peran itu terwujud bukan karena ada proyek pembangunan pemerintah yang mengikutsertakan pemuda. Peran di sini lebih difokuskan pada keputusan pemuda secara independen untuk menekuni usaha pada bidang kelautan dan perikanan sebagai mata pencaharian. Dengan demikian peran pemuda yang dimaksudkan berbeda dengan partisipasi pemuda dalam proyek atau program pemerintah.
3. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimaksudkan dalam penelitian ini sumberdaya hayati perairan. Fokus penelitian ini adalah usaha ekonomi yang dijalankan pemuda dalam memanfaatkan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya kelautan lainnya berupa tambang, mineral, minyak, dan gas, termasuk kegiatan jasa perhubungan laut, tidak diikutkan dalam penelitian ini. Karena itu pula maka definisi sektor atau bidang kelautan dan perikanan dalam penelitian ini adalah usaha ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya ikan serta usaha penyediaan barang dan jasa bagi pelaksanaan usaha kelautan dan perikanan.
4. Lingkup kawasan penelitian adalah kawasan pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan lingkup kawasan penelitian ini dilakukan proses deduksi dalam rangka perumusan implikasi peran pemuda pada spektrum kawasan yang lebih luas.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan ditujukan untuk mencari rumusan terbaik tentang pola pemberdayaan kewirausahaan pemuda pesisir di kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau mengevaluasi suatu model pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penjelasan mengenai bentuk dan arah hubungan antar variabel tidak terlalu dipersoalkan. Pemilihan lokasi berdasarkan kepada beberapa alasan, yaitu :

1. Untuk wilayah seputar Jabodetabek, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten mempunyai panjang garis pantai sepanjang ± 51 km, lebih panjang daripada Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta dengan garis pantai sepanjang ± 32 km dan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dengan garis pantai sepanjang $\pm 37,829$ km (DKP, 2009). Pantai Kabupaten Tangerang hampir seluruhnya didominasi oleh pantai berpasir. Secara ekologis, wilayah pesisir sangat kompleks dan memiliki nilai sumberdaya yang tinggi. Bila diperhatikan batasannya, wilayah pesisir pantai akan mencakup sub sistem daratan pesisir (*shore land*) dan perairan pesisir (*coastal water*). Kedua sub sistem yang berbeda tetapi saling berinteraksi melalui media aliran massa air. Kondisi pesisir wilayah Kabupaten Tangerang relatif masih lebih baik daripada Kotamadya Jakarta Utara maupun Kabupaten Bekasi.
2. Wilayah pesisir Kabupaten Tangerang juga mempunyai potensi ekonomi relatif lebih bervariasi daripada Kotamadya Jakarta Utara maupun Kabupaten Bekasi. Selain dari sektor pemanfaatan sumber daya alam seperti penangkapan ikan laut, budidaya tambak ikan bandeng, udang dan rumput laut, juga terdapat industri rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Selain itu, dari sektor pariwisata bahari, juga terdapat lebih banyak obyek alam yang potensial untuk dikembangkan namun saat ini belum dikelola secara optimal. Obyek wisata tersebut antara lain Pantai Tanjung Pasir (di Kecamatan Teluk Naga), Pantai Tanjung Kait (di Kecamatan Mauk),

Pantai Dadap (di Kecamatan Kosambi) dan Pulau Cangkir (di Kecamatan Kronjo).

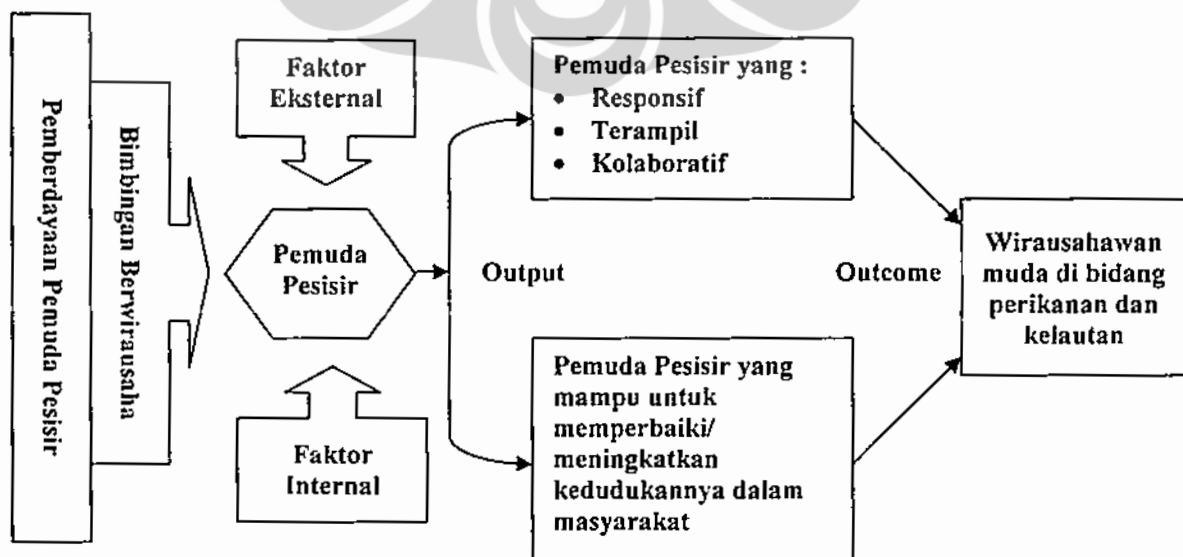
3. Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang merupakan salah satu *pilot project* kawasan Minapolitan, yaitu kawasan produksi kelautan dan perikanan yang terintegrasi. Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Adapun jenis usaha yang dikembangkan yaitu penangkapan ikan laut dan industri pengolahan ikan kembung, bandeng, ikan asin, fillet serta otak-otak.
4. Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang terkenal sebagai pusat industri di kawasan Jabodetabek, namun tingkat pengangguran dan kemiskinan masih relatif lebih tinggi daripada kabupaten lain di wilayah Jabodetabek. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya minat wirausaha di kalangan generasi muda dan lebih cenderung menggeluti sektor formal sebagai buruh di sektor industri.
5. Meskipun jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar resmi di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang sekitar 53 organisasi, tetapi hanya sedikit yang bergerak di sektor pengelolaan pesisir.
6. Secara geografis, Kabupaten Tangerang memenuhi persyaratan untuk menjadi salah satu alternatif lokasi pemindahan ibukota negara Republik Indonesia. Dengan sudah tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai seperti jalan penghubung antar propinsi yang mulus dan dapat dijangkau dari Jakarta dalam waktu \pm 30 menit, bandara Soekarno Hatta dapat ditempuh dari pusat kota di Tigaraksa dalam waktu \pm 15 menit, pelabuhan laut di Kosambi yang diproyeksikan sebagai pengganti pelabuhan Tanjung Priok. Belum lagi infrastruktur pendukung lain seperti pelabuhan galangan kapal Bojonegara di Kabupaten Serang maupun industri baja strategis di Kota Cilegon.

1.6. Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah

Dalam sebuah kerangka berpikir pemecahan masalah yang secara runut terdapat dalam Gambar 1.2, dijelaskan bahwa permasalahan kemiskinan di pesisir yang sangat kompleks, seperti kurangnya akses kepada fasilitas-fasilitas umum, kondisi masyarakat yang belum berdaya, serta pendapatan yang tidak menentu, membuat perlunya program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan menuntaskan akar permasalahan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pesisir terutama kaum mudanya sangatlah diperlukan dengan tujuan supaya pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang ada dapat dikelola secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Salah satu cara pemberdayaan pemuda pesisir yang dilakukan adalah melalui organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh dan untuk pemuda pesisir itu sendiri sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Adanya kelembagaan organisasi kepemudaan tersebut akan berfungsi sebagai motor yang akan menggerakkan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya sendiri. Setelah organisasi kepemudaan tersebut terbentuk dan melaksanakan fungsinya, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis kinerja organisasi tersebut agar ke depannya dapat terus maju dan mengembangkan dirinya beserta masyarakat sekitar.

Gambar 1.2. Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah



Beberapa faktor eksternal dalam kerangka berpikir diatas antara lain sumber daya alam, komunitas pesisir, dan kondisi sosial, ekonomi serta budaya masyarakat pesisir. Sementara itu faktor internal yang berpengaruh seperti lulusan SMP/SMA di lingkungan masyarakat pesisir. Adapun output yang diharapkan muncul dari pemberdayaan pemuda pesisir adalah :

- a. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi penangkapan, budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.
- b. Dapat mengelola usaha kreatif berdasarkan potensi wilayah pesisir di sekitarnya.
- c. Menjadi pelopor dan penggerak ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir.
- d. Menjadi pemandu yang mampu mendekatkan prakarsa masyarakat pesisir dengan pemerintah.
- e. Dapat membuat jaringan kerja (*networking*)

Dari *output* yang diharapkan muncul tersebut, secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap *outcome* yaitu penciptaan wirausahawan muda yang bergerak di pengelolaan potensi sektor perikanan dan kelautan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya. Sehingga setiap anggota organisasi pemuda pesisir tersebut dapat juga berusaha secara mandiri dan dapat berperan serta mendorong ekonomi masyarakat pesisir pada umumnya.

1.7. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juni 2011. Adapun jadual lengkap waktu penelitian adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka, bulan Februari 2011 ;
2. Penyusunan Proposal Tesis dan Studi awal, bulan Maret 2011 ;
3. Pengumpulan data di lapangan, bulan April – Mei 2011 ;
4. Pengolahan dan Analisis Data, bulan Mei 2011 ;
5. Pembahasan Draft Tesis, bulan Mei – Juni 2011 ;
6. Ujian Tesis, bulan Juli 2011
7. Pengumpulan Perbaikan Tesis, bulan Agustus 2011

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah yang mendorong perlunya dilakukan penelitian ini, perumusan pokok masalah yang terjadi obyek penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka berpikir pemecahan masalah, dan waktu penelitian.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, berisikan tentang uraian teori, manajemen strategi, pemuda, karakter, kemiskinan, dan pemberdayaan
- BAB III : Metode Penelitian, berisikan tentang metode yang digunakan dan informan sebagai narasumber yang ingin diambil datanya
- BAB IV : Hasil Penelitian, berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian, temuan langsung di lapangan berupa hasil wawancara, karakter dan potensi pemuda yang berada di organisasi pemuda pesisir, dan strategi pemberdayaan pemuda, masukan dari *stakeholder* yang berkepentingan terhadap pemberdayaan pemuda pesisir. Hasil kajian dilengkapi dengan analisa data sesuai metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
- BAB V : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Karakteristik Wilayah Pesisir

2.1.1. Wilayah Pesisir

Sampai saat ini masih terdapat pertanyaan klasik dalam pengelolaan wilayah pesisir, yaitu bagaimana menentukan batas-batas dari suatu wilayah pesisir (*coastal zone*), karena sampai saat ini belum ada definisi yang baku mengenai definisi wilayah pesisir, namun terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri dkk, 1996). Apabila ditinjau garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*), dan batas yang tegak lurus pantai (*crossshore*). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas wilayah yang sejajar garis pantai relatif lebih mudah, seperti batas wilayah pesisir Kabupaten Tangerang adalah antara sungai Cidurian Kabupaten Serang di sebelah barat dan Sungai Dadap di Kecamatan Kosambi di sebelah timur. Akan tetapi penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan. Dengan kata lain, batas wilayah pesisir berbeda dari satu negara ke negara lain, karena adanya perbedaan karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem pemerintahan.

Menurut JC Sorensen dan Mc Creary (1990) dengan melihat batas ke arah darat dan ke arah laut dari wilayah pesisir yang telah diimplementasikan dalam program pengelolaan wilayah pesisir di beberapa negara, disimpulkan bahwa wilayah pesisir adalah *pertama*, dalam banyak hal batas yuridiksi antara pemerintah daerah (propinsi) dan pusat, sama dengan garis batas teritorial. Dan *kedua*, biasanya antara 3 sampai dengan 12 mil laut dari garis dasar (*coastal base line*). Garis Dasar (GD) adalah suatu rangkaian garis lurus yang menghubungkan titik terluar pulau, semenanjung dan tanjung yang dimiliki oleh suatu negara.

Soegiarto (1996) menyebutkan definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan

air asin. Sementara itu, ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Dahuri (2001) menyimpulkan, bahwa wilayah pesisir adalah kawasan peralihan (*interface area*) antara ekosistem laut dan darat dengan batas ke arah darat yaitu dari segi *Ekologis*, adalah merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut, interusi air laut dan lain-lain, dari segi *Administratif*, adalah merupakan batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2 Km, 20 Km, dari garis pantai). Dan dari segi *Perencanaan*, adalah bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Sedangkan batas ke arah laut, dilihat dari segi *Ekologis*, adalah kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah didarat seperti aliran air sungai, *run off*, aliran air tanah, dan lain-lain, atau dampak kegiatan manusia di darat, seperti bahan pencemar, sedimen dan lain-lain atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (*Continental shelf*), dilihat dari segi *Administratif*, adalah sejauh 4 mil atau 12 mil, dari garis pantai ke arah laut dan dilihat dari segi *Perencanaan* adalah bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.

Dari definisi wilayah pesisir diatas, memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam baik di darat maupun di laut dan saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia.

Menurut kesepakatan internasional pada tahun 1994, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Saat ini yang dipakai di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka batas ke arah laut berdasarkan kewenangan adalah 4 mil laut untuk kabupaten/kota dan 12 mil laut untuk propinsi sama

dengan batas teritorial nasional. Sedangkan ke arah darat, batas wilayah pesisir disepakati adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut yang masih termasuk batas wilayah administrasi wilayah yang bersangkutan.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa - jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Kekayaan ini menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa - jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir.

Dahuri (1999) menyebutkan, potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompok yakni (1) sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), (3) energi kelautan dan (4) jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*). Sumberdaya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*marine culture*). Ketersedian lahan pesisir merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan. Demikian juga dengan wilayah perairan pantainya dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan budidaya terutama budidaya laut. Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sumberdaya energi terdiri dari OTEC (*Ocean Thermal Energy Conservation*), pasang surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa - jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Wilayah pesisir dan laut sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan wilayah ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana. Secara biofisik wilayah pesisir memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Secara empiris terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas (*upland*) dengan laut lepas.

Perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lain - lain) di lahan atas (*upland*) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara bijaksana akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.

- b. Dalam suatu kawasan pesisir, biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat keterkaitan langsung yang sangat kompleks antara proses - proses dan fungsi lingkungan dengan pengguna sumberdaya alam.
- c. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Sangat sukar untuk mengubah kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.
- d. Baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Misalnya suatu hamparan pesisir hanya digunakan untuk satu peruntukan, seperti tambak, maka akan lebih rentan, jika hamparan tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan.
- e. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Oleh karenanya, wajar jika pencemaran over eksploitasi sumberdaya alam dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini, yang pada gilirannya dapat menimbulkan suatu tragedi bersama (*open tragedy*).

Kawasan pesisir memiliki tiga habitat utama (vital) yakni mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Di antara ketiga habitat tersebut terdapat hubungan

dan interaksi yang saling mempengaruhi. Kerusakan yang terjadi pada satu habitat akan mempengaruhi kehidupan biota pada habitat lainnya, sehingga pengelolaan pada suatu habitat harus mempertimbangkan kelangsungan habitat lainnya.

2.1.3. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi oleh nelayan. Menurut Satria (2002), nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. Nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat *open access* dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir seperti nelayan memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka.

Tohir (2001), mengemukakan bahwa terdapat fenomena yang menarik mengenai melimpahnya sumberdaya alam laut dengan masih rendahnya minat masyarakat pesisir untuk mengeksplorasi kekayaan laut. Lebih lanjut, dikatakan pula bahwa fenomena ini jika dicermati secara mendalam maka sebenarnya terdapat fakta bahwa masyarakat pesisir yang bermatapencaharian sebagai nelayan maupun melakukan aktivitas hidup di laut jumlahnya relatif kecil dibanding dengan yang bekerja sebagai petani sawah, maupun jasa. Hal ini berarti jenis-jenis mata pencaharian masyarakat pesisir heterogen dan warga masyarakat yang memilih sebagai nelayan atau melakukan aktivitas di pesisir pada dasarnya masih merupakan kelompok kecil saja. Dari jumlah yang relatif kecil itu, dilihat dari tingkat kesejahteraan hidupnya rata-rata masih belum menggembirakan karena sebagai nelayan kecil mereka menghadapi berbagai keterbatasan.

Dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat pesisir nelayan berbeda dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumberdaya yang

ada di dalamnya. Pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dilihat dari beberapa aspek yang lain seperti aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan *magic* sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, saat ini sudah ada sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti itu. Mereka hanya melakukan ritual tersebut sekedar untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah.

Satria (2002) menambahkan bahwa, secara sosiologis masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan. Dari masalah utang piutang tersebut sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar nelayan dalam memperebutkan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaannya.

Dalam hal ini peranan aktif LSM sangat membantu dalam mengarahkan strategi pembangunan yang diperlukan masyarakat pesisir dan menunjang pengelolaan sumberdaya lingkungan laut di sekitar tempat tinggal mereka misalnya budidaya perikanan. Pengelolaan ini dilakukan dengan kegiatan nyata yang sesuai dengan warna dari kultur masyarakat setempat. Selain itu LSM harus mampu memberikan masukan dan kritikan bagi strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir.

2.1.4. Pemuda Pesisir

Pemuda secara umum dapat dilihat dari dua hal, yaitu *pertama* dari segi usia pemuda dapat dilihat dari perkembangan psikologis. Secara psikologis pemuda lebih identik dengan remaja dan dewasa awal. Pada tahap perkembangan ini

manusia mempunyai sikap yang lebih memberontak, penuh dengan inisiatif, kreatif, cenderung antikeamanan, dan penuh dengan segala intrik yang bertujuan untuk membangun kepribadian. *Kedua*, lebih kepada jiwa yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Pemuda tidak lagi dibatasi oleh usia dan perkembangan psikologis. Pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikeamanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda. Acuan yang kedua inilah yang pada masa lalu digunakan, sehingga pada saat itu terlihat bahwa organisasi pemuda itu lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang yang secara usia sudah tidak muda lagi, tetapi mereka mempunyai jiwa pemuda.

Perkembangan psikologis memang melihat pemuda didasarkan pada tugas perkembangan seseorang. Pemuda ditinjau dari perkembangan psikologis diwakili oleh remaja dan dewasa awal. Menurut WHO, pemuda adalah mereka yang berusia antara 10 sampai 24 tahun. Sedangkan *United Nations General Assembly* (UNGA), melihat pemuda adalah individu yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Definisi dari UNGA sama dengan definisi yang diberikan oleh World Bank. Sedangkan *National Highway Traffic Administration* memberikan batasan pemuda berusia antara 15 sampai dengan 29 tahun. Berdasarkan definisi pemuda ditinjau dari usia dapat dilihat bahwa individu yang berusia diatas 15 tahun dan dibawah 30 tahun. Jika melihat usia, maka pemuda terbagi ke dalam dua fase yaitu fase puber berusia antara 10 sampai 21 tahun, dan fase kedua dewasa awal berusia antara 21 sampai 35 tahun. Selain didasarkan pada usia pemuda juga dapat dilihat dari sifat/jiwa yang mengiringinya. Jika didasarkan pada sifat, maka pemuda mempunyai ciri-ciri :

1. Selalu ingin memberontak terhadap keamanan, dikarenakan pada usia ini seorang pemuda sedang mencari identitas diri. Keinginan untuk diakui dan ingin mendapatkan perhatian mendorong pemuda untuk berbuat sesuatu yang "tidak biasa-biasa saja dan sama dengan yang lain". Ditinjau dari sisi positif perilaku ini akan memunculkan kreatifitas, akan tetapi disisi lain akan muncul penentangan dari pihak lain khususnya pihak orang dewasa yang sudah mapan.

2. Bekerja keras dan pantang menyerah. Sifat kedua ini berhubungan erat dengan sifat pertama. Kerja keras dan pantang menyerah inilah yang mendorong pemuda berlaku revolusioner. Perilaku revolusioner inilah yang memunculkan anggapan bahwa pemuda itu tidak berpikir panjang sehingga akan berpotensi untuk menimbulkan konflik baik itu dengan sesama pemuda maupun dengan orang tua.
3. Selalu optimis. Sifat ini sangat menunjang sifat kerja keras dan pantang menyerah. Sifat optimis ini akan mendorong pemuda selalu bersemangat berusaha untuk mencapai cita-citanya.

Dengan demikian, mendefinisikan pemuda itu tidak hanya dari sisi usia bahwa seorang individu dikatakan muda, akan tetapi juga harus ditunjang oleh sifat/jiwa yang berbeda dengan golongan usia lainnya. Seseorang yang berusia muda belum tentu dapat dikatakan pemuda jika sifat/jiwanya tidak mencerminkan seorang pemuda. Demikian juga sebaliknya seseorang yang sudah tidak masuk kategori muda secara usia belum tentu tidak mempunyai sifat/jiwa seperti pemuda pada umumnya. Singkatnya, definisi pemuda haruslah didasarkan pada usia yaitu usia antara 13 sampai 35 tahun dan harus mempunyai sifat/jiwa pemberontak, pekerja keras, pantang menyerah, serta selalu optimis. Sementara itu, definisi pemuda yang digunakan di Indonesia saat ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yaitu setiap warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Nikijuluw (2001) mendefinisikan pemuda pesisir sebagai sekelompok kaum muda baik dari keluarga nelayan atau bukan, yang tinggal di daerah pesisir dengan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung sepenuhnya atau sebagian dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Profesi yang digeluti yaitu dapat sebagai nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, pemuda pesisir dapat berprofesi sebagai penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.

2.2. Tinjauan Umum Pemberdayaan

2.2.1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*empowerment*" yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Dengan demikian konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self reliant communities*), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti ini diharapkan dapat memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moelyarto, 1999 dalam Wahyono *et al*, 2001)

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community based management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*). Moelyarto (1999) dalam Wahyono *et al* (2001) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumberdaya lokal yang berbasis masyarakat, yang meliputi :

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam masyarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis.
- d. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
- e. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya setempat.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut *Community-Based Management*, menurut Nikijuluw (1994) dalam Latama (2002), merupakan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (*religion*).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based resource management*). Pentingnya memperhatikan aspek strategi adaptasi nelayan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut adalah karena strategi adaptasi yang dikembangkan memungkinkan nelayan mengatur daya

tahan (*resilience*) terhadap persoalan-persoalan spesifik yang berhubungan dengan pesisir dan nelayan seperti fluktuasi, ketidakpastian hasil tangkapan, musim, dan menurunnya sumberdaya perikanan.

2.2.2. Pemberdayaan Komunitas (*Community Empowerment Approach*)

Menggunakan asumsi adanya ketidakberdayaan yang membelenggu masyarakat karena kooptasi negara dan pasar, pendekatan pembangunan berbasis komunitas menjadi dikenal luas pada dekade 1990-an. Ada beberapa semangat atau prinsip penting yang mendasari aliran pembangunan berbasis komunitas, yaitu partisipasi, demokrasi, kesejahteraan, kolektivitas, dan pembangunan yang diinisiasi oleh “kekuatan dari dalam”. Ideologi pemberdayaan dengan sengaja ditonjolkan sebagai satu-satunya identitas filosofis pendekatan ini. Implikasi kebijakan pendekatan pada pemberdayaan komunitas adalah penekanan pada *transformative and transactive planning, bottom up, community empowerment, dan participative*.

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak upaya pengembangan komunitas (*community development*) yang mengambil strategi pemberdayaan sebagai pendekatan utamanya. Pendekatan ini menganalogikan komunitas sebagaimana layaknya kesatuan “tubuh manusia” yang bisa mengalami perubahan, bergerak, berkembang, dan bahkan memiliki energi dan kekuatan dari dalam untuk berubah. Pemaknaan konsep komunitas dengan mengasosiasikannya ibarat tubuh manusia itu, diinspirasi oleh pandangan yang menganggap komunitas sebagai sebuah lapangan sosial (*social field*). Menurut Wilkinson (1972) dalam Sadri (2009), sebagai sebuah lapangan sosial, komunitas bersama-sama dengan bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya, seperti kelompok sosial (*social group*) dan organisasi, memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Ada **interaksi sosial** yang berlangsung secara kontinu di dalamnya, yang menandakan bahwa ada kehidupan dalam sistem komunitas itu.
- b. Ada **arah perubahan ke suatu titik tertentu**. Artinya, komunitas tidak statis berada di satu titik dan tak pernah beranjak untuk berubah.
- c. Ada **perubahan atau perkembangan** yang berlangsung secara teratur atas elemen dan struktur pembentuknya.

Teori pembangunan juga memunculkan istilah tentang *community power*, yang menempatkan komunitas pada suatu tempat dan memiliki kapasitas sehingga mampu melakukan aktivitas proses sosial (seperti berinteraksi sesamanya, berkompetisi sesamanya, hingga berkonflik dengan komunitas lain). Wilkinson (1972) dalam Sadri (2009) akhirnya menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses pembangunan yang lebih natural, dimana perumusan masalah dan pencarian solusi diserahkan pada komunitas.

Dengan demikian **pemberdayaan komunitas** dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya perubahan (kemajuan) yang sengaja (*purposive*) dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri, dimana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan (*improvement*) sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan, maka upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan”

Pemberdayaan komunitas dapat dipahami secara khusus sebagai “perubahan sosial yang terencana dan relevan dengan persoalan-persoalan lokal yang dihadapi oleh para anggota sebuah komunitas (*a locality-relevant planned change*), yang dilaksanakan secara khas dengan cara-cara yang sesuai dengan kapasitas, norma, nilai, persepsi, dan keyakinan anggota komunitas setempat, dimana prinsip-prinsip *resident participation* dijunjung tinggi”.

2.2.3. Pemberdayaan Pemuda

Zubaedi (2007) menekankan definisi pemberdayaan pada level yang berbeda-beda baik pribadi, yang mencakup rasa percaya diri dan kemampuan seseorang, rasional, yang menekankan kemampuan bernegosiasi dan mempengaruhi hubungan dan keputusan serta pada level kolektif. Selain itu, pemberdayaan dapat difokuskan pada tiga dimensi yang menentukan dalam menggunakan strategi pilihan pada kehidupan seseorang, yaitu akses terhadap sumber daya, agen dan hasil.

Sementara itu keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur

yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional.

Menurut Chamber (1985), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*". Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Pemberdayaan mengandung nilai-nilai instrinsik dan nilai-nilai instrumental. Pemberdayaan memiliki relevansi pada tataran individual dan kelembagaan serta bias berkaitan dengan masalah perekonomian, sosial, maupun politik.

Sedangkan menurut Ginanjar, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk

membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

Pertama, upaya itu harus terarah (*targetted*). Program ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu

sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara individual masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan ruang lingkup bantuan menjadi terlalu luas. Karena itu pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Pemuda pesisir merupakan bagian dari sumber daya manusia generasi muda yang potensial ditinjau dari aspek produktivitas dan aspek kuantitasnya. Partisipasi pemuda pesisir dalam pembangunan nasional menjadi salah satu faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Partisipasi yang rendah dari pemuda akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Secara umum terdapat tiga kerangka kebijakan yang digulirkan untuk menggerakkan pembangunan di bidang kepemudaan, yaitu *pertama* Kebijakan perlindungan. Potensi setiap pemuda Indonesia harus dilindungi dari berbagai faktor destruktif, misalnya penyalahgunaan narkoba, pergaulan seks bebas, dan berbagai tindakan destruktif akibat berbagai pengaruh perubahan lingkungan domestik maupun global. Upaya perlindungan ditempuh dengan menumbuhkan imunitas pemuda terhadap berbagai pengaruh destruktif, dalam hal ini pendidikan berperan dominan dalam meningkatkan imunitas pemuda.

Kedua, Kebijakan Pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda adalah upaya transformatif untuk mengubah segenap potensi positif (minat dan bakat) yang dimiliki pemuda menjadi, ketrampilan dan kompetensi agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi, serta meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan nasional. Pemberdayaan dari aspek sosial juga perlu mendapatkan perhatian serius. Realitas sosial dan ekonomi dikalangan pemuda diperlukan kebijakan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan sentra pemberdayaan pemuda, peningkatan kegiatan ekonomi pemuda, pelatihan pemuda melalui pusat-

pusat pendidikan dan pelatihan dan melalui pengembangan berbagai pelatihan yang memacu tingkat kreativitas di kalangan pemuda. Untuk meningkatkan upaya pemberdayaan pemuda secara sistematis dan berkelanjutan maka pemerintah dan pemerintah daerah harus membangun kerja sama yang sinergis untuk mewujudkan koherensi antara kebijakan tingkat nasional dengan kebijakan tingkat daerah, sehingga jumlah pemuda yang mandiri secara sosial dan ekonomi semakin meningkat.

Ketiga, Kebijakan Pengembangan. Jika arah dari kebijakan pemberdayaan pemuda adalah melakukan upaya transformatif menuju pemuda yang mandiri secara sosial dan ekonomi, maka arah kebijakan pengembangan pemuda lebih menitikberatkan pada munculnya peran kepeloporan pemuda dalam dimensi kepemimpinan dan dimensi kewirausahaan. Kompleksnya permasalahan kemasyarakatan yang dialami bangsa Indonesia membutuhkan peran kepemimpinan pemuda untuk berpartisipasi dalam menyelesaikannya.

Memunculkan wirausahawan baru merupakan kebijakan yang harus ditempuh dengan mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan yang memudahkan tumbuhnya wirausahawan muda. Saat ini jumlah wirausahawan muda sangat sedikit, jadi wajar jika tingkat pengangguran pemuda sangat tinggi. Untuk melahirkan jumlah wirausahawan muda dalam jumlah dan kualitas yang memadai, harus dibangun sentra-sentra kewirausahaan pemuda. Melalui sentra ini, maka para pengusaha muda dapat bertemu dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang diharapkan dapat memberikan akselerasi bagi kemandirian usahanya. Para pemangku kepentingan itu adalah wirausahawan senior yang dapat menjadi mentor yang akan membimbingnya selama melalui tahap - tahap awal perintisan usaha dan bagaimana mengelola peluang usaha dengan sebaik-baiknya (*bussines mentor*).

2.2.4. Proses Pemberdayaan Pemuda

Menurut Ronald Lippit (1958), tahapan intervensi pengembangan masyarakat dalam upaya memberdayakannya meliputi *unfreezing* (pengembangan kebutuhan akan perubahan) dan *refreezing* (generalisasi dan stabilisasi upaya perubahan). Tahapan kegiatan tersebut lebih lanjut dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu :

Universitas Indonesia

- a. *Tahap pengembangan kebutuhan akan perubahan.* Sebelum proses berencana dimulai, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat harus diterjemahkan sebagai “kesadaran mengenai masalah yang ada (*problem awareness*)” hal ini merupakan inti dari keinginan untuk berubah dan keinginan untuk mencari bantuan dari luar sistem. Tetapi ada kalanya masyarakat tidak tahu bagaimana harus menggali kebutuhan yang mereka rasakan (*felt needs*) dan kebutuhan riil (*real needs*), serta tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan yang dirasakan dan kebutuhan riil mereka. Pada kondisi seperti ini, mereka membutuhkan hadirnya agen perubahan (*change agent*) dari luar sistem untuk membantu dan menstimulasi pemikiran terhadap apa yang mereka butuhkan.
- b. *Tahap pemantapan relasi perubahan.* Pembentukan dan pembinaan relasi dengan warga masyarakat sangat diperlukan untuk dapat bekerja sama dengan mereka ke arah perubahan yang direncanakan. Pembinaan relasi akan sangat membantu agar dapat memperoleh data yang akurat mengenai kebutuhan dan sumber daya sistem klien, serta membentuk kepercayaan warga yang ikut aktif melakukan perubahan dalam masyarakat.
- c. *Tahap klarifikasi atau diagnosis masalah.* Pada saat data terkumpul, masalah yang semula tampaknya sederhana, kemungkinan menjadi rumit, karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok-kelompok yang menolak perubahan, masalah-nasalah ketergantungan terhadap lembaga dan sebagainya. Pada tahap ini, *community development worker* harus mengklarifikasikan dan menganalisis hakekat permasalahan mereka.
- d. *Tahap pengkajian alternatif jalur dan tujuan perubahan, serta penentuan tujuan program dan kehendak untuk melakukan tindakan.* Dari data yang telah dianalisis, kemudian ditentukan tujuan operasional dari program ataupun kegiatan yang akan dilakukan, serta alternatif cara yang akan ditempuh guna mencapai tujuan tersebut. Dari beberapa alternatif tersebut, kemudian diputuskan alternatif mana

yang akan diterapkan serta program/kegiatan apa yang akan dilaksanakan.

- e. *Tahap transformasi kehendak ke dalam upaya perubahan yang nyata.* Tahap ini merupakan tahapan yang memfokuskan pada upaya mentransfer perencanaan program (*program planning*) menjadi pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata (*action program*). Kunci keberhasilan dari fase ini sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan *community development worker* untuk melakukan kegiatan secara efisien dan efektif.
- f. *Tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan.* Perubahan sebagai akibat dari berbagai kegiatan dalam pelaksanaan program seperti telah ditetapkan di atas akan stabil jika dampak perubahan itu akan diikuti kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, atau meluas ke desa lainnya. Tahap ini disebut sebagai proses *institusionalisasi*, yaitu proses “melembagakan” perubahan.
- g. *Tahap terminasi atau akhir dari suatu relasi perubahan.* Relasi perubahan berakhir dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir, atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri, sehingga tidak lagi diperlukan kehadiran *community development worker* sebagai faktor eksternal di daerah tersebut.

Tabel 2.1. Tahapan Intervensi Pemberdayaan Masyarakat (Ronald Lippit, 1958)

Tahap Intervensi	Langkah-langkah Kegiatan
<i>Unfreezing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebutuhan akan perubahan 2. Pemantapan relasi perubahan 3. Klarifikasi atas diagnosis masalah 4. Pengkajian alternatif dan tujuan perubahan, penentuan tujuan program dan kehendak untuk melakukan perubahan.
<i>Freezing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Transformasi kehendak ke dalam upaya perubahan nyata
<i>Refreezing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Generalisasi dan stabilisasi perubahan 7. Terminasi dari suatu relasi perubahan

2.2.5. Dimensi Pemberdayaan Pemuda Pesisir

Dalam upaya menggambarkan pola pemberdayaan pemuda pesisir yang sistematis dan terstruktur, maka dilakukan pendekatan melalui lima dimensi yaitu dimensi pengetahuan lokal, sistem religi, ekonomi, kelembagaan, dan politik (Moelyarto, 1999 dalam Wahyono *et al*, 2001).

a. Dimensi Pengetahuan Lokal

Dimensi pengetahuan lokal merupakan pengkajian sistem pengetahuan masyarakat pesisir setempat dengan ruang lingkup yang dibatasi pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan setempat secara arif. Dimensi ini terdiri dari tiga konsep yaitu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, konservasi sumberdaya, dan penegakan peraturan.

No	Konsep	Indikator
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi dan konsepsi terhadap sistem dan mekanisme pengetahuan pengelolaan dan pemanfaatan • Sistem pengelolaan dan pemanfaatan • Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan
2	Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi dan konsepsi upaya konservasi • Mekanisme upaya konservasi
3	Penegakan peraturan (<i>law enforcement</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk sanksi atas pelanggaran peraturan • Mekanisme penegakan sanksi • Efektivitas penegakan sanksi

b. Dimensi Sistem Religi

Dimensi ini merupakan pengkajian terhadap berfungsinya peran agama atau kepercayaan yang dianut terhadap aktivitas kehidupan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Dimensi ini memiliki tiga faktor yaitu agama atau kepercayaan yang dianut, hubungan antara agama atau kepercayaan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, dan peranan agama atau kepercayaan dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Agama memiliki fungsi mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena adanya

keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian manusia. Dalam hal ini agama berfungsi sebagai pemberi identitas diri atau individu seseorang. Agama atau kepercayaan memiliki ajaran atau syariat yang juga mengatur aktifitas ekonomi masyarakat. Di sektor ekonomi terdapat dogma yang berfungsi menata norma ekonomi di dalam masyarakat.

No	Konsep	Indikator
1	Agama atau kepercayaan yang dianut	• Agama atau kepercayaan yang dianut
2	Hubungan antara agama atau kepercayaan dengan kegiatan ekonomi masyarakat	• Pandangan dan kepercayaan tentang hubungan antara agama dengan kegiatan ekonomi masyarakat
3	Peranan agama atau kepercayaan dalam kegiatan sosial politik masyarakat	• Peranan tokoh agama atau kepercayaan

c. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi merupakan pengkajian terhadap pandangan dan sistem mata pencaharian yang dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat pesisir setempat. Dimensi ekonomi terdiri dari tiga faktor yaitu tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya, pembagian peran dalam kegiatan produksi dan tingkat konsumsi ikan.

Kegiatan produksi tidak hanya diartikan sebagai upaya di dalam pemenuhan kebutuhan keseharian, namun juga sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang berorientasi pasar. Pengembangan usaha diperlukan pada saat kegiatan produksi berjalan lambat karena lambatnya penyerapan teknologi atau rendahnya akses pada peningkatan teknologi dan rendahnya investasi. Kegiatan produksi dalam konsep pemberdayaan harus memperhatikan spesialisasi dan ketrampilan fungsional yang ada di masyarakat. Semakin terspesialisasi suatu pekerjaan maka ketergantungan semakin efisien dalam pengelolaan sumberdaya.

Sementara itu, pada faktor tingkat konsumsi ikan, secara budaya terkait dengan kebiasaan dan pantangan makan. Besarnya tingkat konsumsi ikan dapat meningkatkan keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan kegiatan produksi.

No	Konsep	Indikator
1	Tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi kegiatan produksi • Pandangan terhadap inovasi teknologi
2	Pembagian peran dalam kegiatan produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Spesialisasi pekerjaan • Keterampilan yang dimiliki
3	Tingkat konsumsi ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat konsumsi ikan

d. Dimensi Kelembagaan

Dimensi ini mengkaji berbagai lembaga sosial yang terdapat dalam masyarakat pesisir yang mencakup proses pembentukan serta aturan main, kewenangan dan aturan yang berlaku di lembaga tersebut. Ciri umum lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Kelembagaan dapat menjadi sebuah pembawa perubahan (*agent of change*) dalam komunitas masyarakat. Kemudian, eksistensi lembaga sosial dapat dicirikan dari tiga hal, yaitu batas kewenangan, aturan representasi dan aturan main dalam lembaga tersebut.

No	Konsep	Indikator
1	Asal-usul lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembentukan • Sifat lembaga
2	Eksistensi lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Batas kewenangan • Aturan representasi • Aturan main dari lembaga
3	Manajemen konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen konflik

e. Dimensi Politik

Dimensi politik mengkaji mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik serta antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Dimensi ini terkait dengan kebijakan pembangunan, yang berusaha memahami bagaimana keputusan yang sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu komunitas masyarakat.

Dimensi ini tidak dapat lepas dari unsur kepemimpinan politik dalam masyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat maka kepemimpinan politik merupakan kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan dalam pemerintahan diperlukan untuk menjamin program pembangunan berwujud suatu program yang terencana dan dapat mengarahkan suatu perubahan cara hidup masyarakat yang sesuai dengan isi dan tujuan program pembangunan.

Kesatuan dan keutuhan sistem politik didukung oleh konsep, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Sistem politik sebagai sebuah saluran untuk mencapai tujuan bersama melalui proses pengambilan keputusan atau penetapan aturan.

No	Konsep	Indikator
1	Tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kepemimpinan oleh masyarakat • Dukungan terhadap kepemimpinan oleh masyarakat
2	Sistem politik	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengambilan keputusan
3	Keputusan dan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan pemegang kekuasaan lokal dan luar

2.3. Tinjauan Kewirausahaan

2.3.1. Motivasi

Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dapat berbentuk antusiasme, harapan dan semangat. Semua yang kita lakukan setiap hari senantiasa dibayangi oleh adanya motivasi. Misalnya, seorang karyawan yang bekerja tentu saja memiliki motivasi untuk bekerja. Motivasi ibarat api di dalam pikiran seseorang yang terkadang besar membara kadang juga redup, tergantung kondisi mentalnya. Jika seorang ingin menggapai kesuksesan, motivasi adalah api yang harus dijaga jangan sampai padam, karena padamnya motivasi berarti hilangnya bahan bakar untuk menggerakkan mesin tubuh dalam mencapai tujuan. Memberikan motivasi adalah menyalakan api motivasi di dalam diri seseorang supaya bersemangat, memiliki keberanian, dan pantang menyerah dalam

melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kemampuan untuk memotivasi adalah sebuah ketrampilan yang dapat dipelajari oleh siapapun.

Maslow (1943) menyebutkan teori Motivasi yang didasarkan pada lima hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar atau *tingkat pertama*, adalah memenuhi dorongan biologis, *tingkat kedua* mengembangkan kebutuhan untuk bebas dari ancaman fisik dan psikologis. *Tingkat ketiga*, menampung kebutuhan dicintai dan diterima oleh orang lain. *Tingkat keempat*, kebutuhan untuk dihargai dan *tingkat kelima*, merupakan kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Dengan mengetahui jenjang kebutuhan, motivator dapat merumuskan bentuk-bentuk motivasi yang sesuai dan lebih terfokus kepada tingkatan kebutuhan dari seseorang. Di jenjang paling bawah, motivasi berbentuk materi seperti rumah, makanan, uang dan sebagainya. Di jenjang berikutnya, motivasi dapat berupa perasaan, penghargaan dan kesempatan berkarya. Oleh karena itu teori ini menjelaskan bahwa materi merupakan faktor mendasar yang mutlak ada sebelum munculnya kebutuhan yang lain yang bersifat non-materi. Dengan demikian, motivasi dapat berbentuk dua hal, yaitu materi dan non-materi yang memberi penciptaan *knowledge* tercapai melalui pemahaman atau pengakuan terhadap hubungan *synergistic* dari *tacit* dan *explicit knowledge* dalam organisasi, serta melalui desain dari proses sosial yang menciptakan *knowledge* baru dengan mengalihkan dari *tacit knowledge* ke dalam *explicit knowledge*, yang berarti melakukannya berdasarkan *learning process*.

Untuk mendukung proses aktivitas dan pengembangan sumber daya manusia di suatu kelompok atau komunitas, Nonaka dan Takeuchi (1995) mengungkapkan perlunya konversi pengetahuan dari model SECI (*socialization, externalization, combination, internalization*) yang dikaitkan dengan program pelatihan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan. *Socialization* (sosialisasi) merupakan proses transfer atau berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman (*experience*) yang dilakukan dari *tacit* ke *tacit*. Sosialisasi dapat digunakan melalui bertukar pengalaman dalam pelatihan training dan antar peserta. Sementara itu tahap kedua yaitu *Externalisation* (eksternalisasi) merupakan suatu transfer pengetahuan yang dilakukan dari *tacit* ke *explicit*. Misalnya melalui metafora atau analogi. Berikutnya yaitu *Combination* (kombinasi) merupakan

suatu proses membuat sistematis suatu konsep menjadi suatu pengetahuan yang terstruktur. Kombinasi merupakan suatu pengayaan pengetahuan *explicit* ke *explicit*. Kemudian terakhir, *Internalization* (internalisasi) merupakan suatu proses internalisasi dari *explicit* ke *tacit* yang baru. Proses ini dilakukan melalui pembiasaan atau *learning by doing*.

2.3.2. Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Entrepreneurship sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu "*entreprendre*" yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah *entrepreneur* digunakan untuk menggambarkan para pengusaha, yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis, dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan menghasilkan lebih banyak lagi (Suwartoyo, 1992 dalam Alkautsar, 2009).

Di Indonesia padanan kata *entrepreneur* sering disamakan dengan wiraswasta, pengusaha, pedagang, saudagar, dan wirausaha. Menurut Lupiyoadi (2004) wiraswasta berarti orang yang memiliki sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Raymon W. Y Kao (1995) mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu proses, penciptaan sesuatu yang baru dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Tujuan dari kewirausahaan adalah terciptanya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Sedangkan wirausahawan sendiri mengacu pada orang yang melakukan atau memiliki sifat kewirausahaan.

Casson (1990) dalam Fauzi (2009), menyebutkan ada empat pendekatan untuk meneliti kewirausahaan, yaitu distribusi pendapatan, peran wirausaha dalam proses pasar, pandangan kepahlawanan, dan dalam konteks sebuah perusahaan. Sementara itu, Henert dan Link (1982) dalam Fauzi (2009), menyusun beberapa tema tentang wirausahawan berdasarkan peran dan tokohnya, yaitu:

- a. Wirausahawan adalah seseorang yang berasumsi bahwa resiko berhubungan dengan ketidakpastian (dengan tokohnya seperti Cantillon, Thunen, Mangoldt, Mill, Hawley, Knight, Mises, Cole, Shackle).

- b. Wirausahawan adalah seorang inovator atau penemu atau pembaharu (dengan tokohnya seperti Baudeau, Bentham, Thunen, Schmoller, Sombart, Weber, Schumpeter).
- c. Wirausahawan adalah seorang pengambil keputusan (dengan tokohnya seperti Cantillon, Menger, Marshall, Wieser, Amasa Walker, Francis Walker, Keynes, Mises, Shackle, Cole, Schultz).
- d. Wirausahawan adalah seorang organisator dan koordinator dari sumber daya ekonomi (dengan tokohnya seperti Say, Walras, Wieser, Schmoller, Sombart, Weber, Clark, Davenport, Schumpeter, Coase).
- e. Wirausahawan adalah seorang pemilik perusahaan (dengan tokohnya seperti Quesnay, Wieser, Pigou, Hawley).
- f. Wirausahawan adalah seorang majikan atas faktor-faktor produksi (dengan tokohnya seperti Amasa Walker, Francis Walker, Wieser, Keynes).

Tabel 2.2. Karakteristik Wirausahawan

No	Tahun	Penulis	Karakteristik
1	1971	Palmer	Menghitung resiko
2	1971	Hornaday and Aboud	Memerlukan pencapaian, otonomi, agresi, kekuatan, pengenalan, inovasi, kebebasan
3	1973	Winter	Mebutuhkan kekuatan
4	1974	Borland	Pengendalian oleh diri sendiri
5	1974	Liles	Mebutuhkan pencapaian
6	1977	Gasse	Orientasi nilai perseorangan
7	1978	Timmons	Pengendalian/kepercayaan diri, orientasi hasil, moderat dalam mengambil resiko, pengendalian penuh, kreatif/inovasi
8	1980	Sexton	Enerjik/ambisi, umpan balik positif
9	1981	Welsh and White	Memerlukan pengendalian, bertanggung jawab, percaya diri, pencari tantangan, moderat dalam mengambil resiko
10	1982	Dunkelberg and Cooper	Orientasi pertumbuhan, orientasi kebebasan, orientasi ketrampilan/keahlian

Sumber : Kuratko dan Hogets (1989) dalam Fauzi (2009)

Mark Casson dalam bukunya *The Entrepreneur : An Economic Theory*, mendefinisikan kewirausahaan menurut fungsinya yaitu “*an entrepreneur is someone who specializes in taking judgmental decisions about the coordination of scarce resources*” (wirausahawan adalah seorang yang ahli dalam mengambil keputusan mengenai koordinasi atas sumber daya yang langka). Kewirausahaan disebut sebagai *spearhead* (pelopor) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Sedangkan Wirausaha berarti suatu kegiatan manusia dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai/menciptakan suatu pekerjaan yang dapat mewujudkan insan mulia. Dengan kata lain, wirausaha berarti manusia utama (unggul) dalam menghasilkan suatu pekerjaan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Selain itu, menurut sifatnya, seorang manajer berbeda dengan seorang wirausahawan. Perbedaan tersebut bisa dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 2.3. Perbedaan antara Wirausahawan dan Manajer

No.	Karakteristik	Wirausahawan	Manajer
1	Respon terhadap peluang	Mengeksploitasi peluang	Meminimalkan resiko
2	Respon terhadap resiko	Menerima/mengendalikan resiko	Menghindari resiko
3	Motivasi	Dimotivasi oleh kebebasan dan peluang untuk menciptakan keuntungan finansial	Dimotivasi oleh promosi karier dan imbalan tradisional lainnya
4	Respon terhadap kegagalan	Cenderung menerima kesalahan sebagai suatu bagian normal/biasa	Menghindari kesalahan dan menganggap kesalahan sebagai kesalahan manajerial
5	Keterlibatan	Lebih intens/langsung terlibat dalam aktivitas operasional organisasi	Menghindari kesalahan dan menganggap kesalahan sebagai kesalahan manajerial

Sumber : Lupiyoadi (2004)

Sementara itu kewirausahaan (*entrepreneurship*) bisa digambarkan sebagai sebuah proses tindakan dari wirausahawan untuk mendirikan, membentuk, atau memulai usahanya. Kewirausahaan adalah sebuah aktifitas yang kreatif. Sebuah kemampuan untuk menciptakan dan membangun dari sesuatu yang bisa jadi dianggap tidak berarti. Hal tersebut merupakan keahlian dalam melihat peluang, sementara yang lain tidak melihat. Kewirausahaan adalah pola pikir untuk mencari peluang, bisa menghitung resiko dengan cermat dan membuahkan keuntungan dengan membuat sebuah usaha. Kewirausahaan terdiri dari berbagai aktifitas yang melibatkan perencanaan, penciptaan dan menjalankan sebuah perusahaan. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan didefinisikan sebagai sebuah inovasi yang sistematis, yang merupakan pencarian atas perubahan yang memiliki tujuan dan tertata dengan rapi, dan analisa sistematis dari sebuah peluang dapat menghasilkan inovasi ekonomi dan sosial. Secara sederhana kewirausahaan adalah kemampuan untuk melihat peluang dimana yang lain tidak bisa memanfaatkan faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal) yang digunakan dalam memproduksi sesuatu yang baru berupa barang maupun jasa.

2.3.3. *Entrepreneur Proclivity*

Entrepreneur proclivity (kecenderungan kewirausahaan) adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, seperti *innovativeness* (inovasi), *risk taking* (pengambilan resiko), kemandirian (*autonomy*), *proactiveness* (proaktif), dan *competitive aggressiveness* (keagresifan dalam bersaing). Menurut Griffith, Noble, and Chan (2006) jika kelima faktor tersebut menguat maka orang atau entitas bisnis tersebut akan semakin kuat juga tingkat kewirausahaannya.

a. *Innovativeness*

Inovasi berhubungan dengan kecenderungan entitas bisnis untuk berkomitmen pada ide baru, produk, jasa, dan semacamnya (Lumpkin & Dess, 1997). Sementara itu, Covin dan Miles (1999) berpendapat bahwa *entrepreneurship* tidak akan ada tanpa inovasi. Inovasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kecenderungan untuk mendukung ide baru, percobaan, dan proses kreatif lainnya sebelum kompetitor melakukannya. Peters (1990) menyatakan bahwa inovasi memerlukan kreativitas dan keinginan untuk melihat lebih.

b. *Risk taking*

Pengambilan resiko ini mengacu pada kemampuan entitas bisnis untuk menerima tingkat risiko yang besar (Lumpkin & Dess, 1997). Suatu penelitian menyatakan bahwa seorang wirausahawan memiliki tingkat pengambilan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan yang bukan *entrepreneur* (Fable dan Larwood, 1995). Pandangan ini mendukung penelitian Sarasvathy, Simon, dan Lave (1996) yang menyatakan bahwa wirausahawan memiliki kecenderungan lebih untuk mengambil resiko sebagai bagian dari keseharian bisnis.

c. *Autonomy*

Autonomy adalah sebuah otoritas untuk mengikuti keyakinan diri. Hal ini mengacu pada kemandirian dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk di dalamnya dalam memunculkan dan melaksanakan ide yang dimiliki (Lumpkin dan Dess, 1997). *Entrepreneur* memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang kuat dan tegas pada arahan dalam berbisnis (Mintzberg dan Waters, 1985).

d. *Proactiveness*

Keproaktifan terlihat dalam kemampuan entitas bisnis untuk berhadapan dengan kesempatan untuk mengembangkan usahanya ke dalam pasar yang baru (Lumpkin dan Dess, 1997). Venkatraman (1989) berpendapat keproaktifan adalah faktor yang penting dalam kewirausahaan. Sedangkan Coulthard (2007) menyatakan keproaktifan sebagai kemauan untuk mencari peluang baru, yang bisa jadi ada atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasi yang sekarang.

e. *Competitive aggressiveness*

Dimensi keagresifan dalam berkompetisi berhubungan dengan kemampuan entitas bisnis secara langsung dan terus menerus untuk menghadapi pesaingnya. Keagresifan dalam berkompetisi mencerminkan seberapa besar keinginan untuk menghadapi persaingan dengan menargetkan pesaing dan pasar (Lumpkin dan Dess, 1997).

Menurut Ventakraman (1989) keagresifan dalam berkompetisi bisa dicapai dengan mengincar *market share* secara ambisius dan

melakukan langkah yang berani untuk mencapai itu, seperti memotong harga atau mengorbankan keuntungan.

2.4. *Dynamic Capability*

Dynamic capability merupakan sebuah pendekatan untuk melihat suatu masalah secara tidak statis. Dengan pendekatan ini, diyakini bahwa setiap hal pasti akan berubah. Oleh karenanya, penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada sangat diperlukan agar dapat terus adaptif terhadap keadaan. *Dynamic* memiliki arti mengembangkan suatu sistem yang terjalin dengan baik antara satu fungsi dengan fungsi lainnya, dan disaat yang sama memahami kebutuhan spesifik dari setiap segmen pasar yang ada. Sementara itu, *capability* mempunyai arti sebuah perhatian terhadap kemampuan beradaptasi dan mengubah sumber daya yang ada agar mendapatkan kesempatan yang muncul di pasar (Teece *et al*, 1997). Jadi *dynamic capabilities* (kapabilitas dinamis) mengacu pada suatu proses modifikasi pengetahuan atas sumber daya dan sumber daya yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar entitas bisnis yang ada sulit ditiru dan memiliki keunggulan kompetitif.

Dalam ruang lingkup membangun kewirausahaan, *dynamic capabilities* dapat diartikan sebagai suatu peningkatan kemampuan berinovasi yang berhubungan dengan persepsi dan aktivitas terhadap aktivitas-aktivitas bisnis yang baru dan unik (Schumpeter dan Milton, 1989 *dalam* Suryanita, 2006). Kemampuan berinovasi adalah titik penting dari kewirausahaan dan esensi dari karakteristik kewirausahaan. Beberapa hasil penelitian tentang kewirausahaan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan lebih signifikan mempunyai kemampuan inovasi daripada yang tidak memiliki kemampuan dalam kewirausahaan (Koh, 1997 *dalam* Suryanita, 2006). Menurut Weerawardena (2003) *dalam* Suryanita (2006), *dynamic capabilities* dalam kewirausahaan dapat dilihat dari variabel kemampuan berinovasi, proaktifitas, dan keberanian mengambil resiko.

Proaktifitas seseorang untuk berusaha berprestasi merupakan petunjuk lain dari aplikasi atas orientasi kewirausahaan secara pribadi. Organisasi dengan aktifitas kewirausahaan yang tinggi tampak dari tingginya semangat yang tidak pernah padam karena hambatan, rintangan, dan tantangan. Sikap aktif dan dinamis adalah kata kuncinya. (Doukakis, 2002 *dalam* Suryanita, 2006).

Seseorang yang berani mengambil risiko dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berorientasi pada peluang dalam ketidakpastian konteks pengambilan keputusan. Hambatan risiko merupakan faktor kunci yang membedakan pengusaha dengan jiwa wirausaha dan tidak. Fungsi utama dari tingginya orientasi kewirausahaan adalah bagaimana melibatkan pengukuran risiko dan pengambilan risiko secara optimal (Looy *et al*, 2003 dalam Suryanita, 2006).

2.5. Penelitian Terdahulu

2.5.1. Alternatif Model Pemberdayaan Komunitas Pesisir di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat (Umar Baihaqi, Fisip UI 2008)

Pemberdayaan adalah suatu istilah yang problematik. Sebagai sebuah turunan dari konsep pembangunan, pemberdayaan dijadikan solusi untuk menambal lubang-lubang pembangunan. Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan menjadi jembatan penghubung jurang ketimpangan sosial yang akibat pembangunan yang tidak merata. Melalui berbagai program pemberdayaan, warga yang tidak beruntung diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di dalam penelitian ini akan didiskusikan pemberdayaan dalam arti yang sebenarnya namun dibatasi dalam tata ruang wilayah pesisir. Ada dua alasan yang melatarbelakangi pembatasan ini. *Pertama*, konsep pembangunan masyarakat lebih memungkinkan menerapkan model pembangunan lokal (*locality development*) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis. Model ini diharapkan lebih mampu menggerakkan masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, serta mampu mengantisipasi perbedaan karakteristik antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan. *Kedua*, dilatarbelakangi oleh prioritas permasalahan sosial, yaitu tereksklusinya komunitas pesisir secara sosial, ekonomi dan politik dalam pembangunan di Indonesia saat ini.

Penelitian ini akan mencoba membandingkan tiga alternatif model pemberdayaan komunitas pesisir yang diuji dengan pendekatan kuantitatif. Model tersebut antara lain model koperasi, model pusat komunitas dan model inti

Universitas Indonesia

plasma. Sebagai lokasi penelitian adalah Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, yang menjadi sentra perikanan di sepanjang garis Pantai Selatan Pulau Jawa sebelah Barat. Melalui analisis data dengan teknis *Analytic Hierarchy Process* (AHP) menempatkan model koperasi sebagai alternatif yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi di Pelabuhan Ratu. Namun dari hasil survey di lokasi penelitian terhadap responden yang dipilih, menunjukkan adanya kekecewaan atas kinerja koperasi maupun program-program bantuan yang disalurkan kepada warga. Jika kualitas pelayanan koperasi dapat ditingkatkan, maka pencapaian tujuan dari program pemberdayaan komunitas pesisir di Pelabuhan Ratu dapat lebih tepat mengenai sasaran. Sementara itu, model inti plasma dapat menjadi alternatif pilihan kedua, mengingat adanya transaksi langsung antara perusahaan dan nelayan serta adanya pembagian deviden berdasarkan kepemilikan saham. Adapun kelemahannya adalah adanya potensi resistensi dari para pemilik modal yang selama ini memberikan pinjaman sekaligus membeli hasil tangkap nelayan.

Lemahnya kinerja perangkat desa, serta belum adanya organisasi kemasyarakatan yang secara khusus menjalankan program pemberdayaan, membuat model pusat komunitas menjadi tidak relevan untuk diterapkan di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kondisi ini juga memiliki potensi melemahkan kinerja koperasi perikanan, apabila pelaksanaan koperasi perikanan tidak dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah lokal dan warga. Melibatkan pihak ketiga dari masyarakat sipil, seperti konsultan atau pekerja sosial, bisa menjadi penggerak perbaikan tersebut.

2.5.2. Proses Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Proyek Pengembangan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan *Co-Fish Project* (Studi Kasus Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau) (Alpi Mukhdor, A.P, Fisip - UI, 2001)

Proyek pembangunan masyarakat pantai dan pengelolaan sumber daya perikanan (*Co-Fish Project*) merupakan program untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Visi dan misi pemberdayaan yang di emban *Co-Fish Project* merupakan program nyata yang ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi aktor utama dari proyek pemberdayaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Desa Meskom, (2) Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk proses pemberdayaan yang telah dijalankan selama ini terhadap masyarakat pesisir Desa Meskom dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya, serta (3) Mendeskripsikan dan melihat manfaat dari Proyek Pembangunan Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Propinsi Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk melihat permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat serta mendeskripsikan dimensi pemberdayaan yang dilakukan proyek dan melihat manfaat proyek secara objektif.

Adapun hal-hal yang sudah dilakukan oleh *Co-Fish Project* antara lain pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, penyadaran masyarakat melalui penegakan hukum, penguatan kelembagaan masyarakat, perbaikan dan pemulihan kondisi lingkungan pantai, pengadaan/perbaikan sarana prasarana sosial, serta pengembangan usaha kecil dan penganekaragaman pendapatan.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang berbagai upaya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh *Co-Fish Project* dan LSM kepada masyarakat. Dari hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa proyek tersebut dapat memberdayakan masyarakat di lokasi penelitian, walaupun masih perlu adanya perbaikan. Salah satu indikator keberhasilannya adalah munculnya partisipasi dan swadaya lokal sebagai motor bagi pembangunan di desa tersebut. Masyarakat terlihat pro aktif dalam menanggapi setiap proyek yang ada di desanya. Masyarakat juga semakin sadar untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula sikap orang tua yang tidak lagi terlalu membebankan pekerjaan kepada anak-anak pada saat jam sekolah.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada *Co-Fish Project* dan LSM untuk memperkuat dorongan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta terus secara aktif mengajak masyarakat untuk menggali mata pencaharian alternatif guna mengurangi ketergantungan dari sumber daya laut yang potensi lestariannya semakin terbatas. Pemerintah juga diharapkan dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terus menerus,

serta bersama DPRD dapat mengeluarkan peraturan hukum atau perda yang melindungi nelayan lokal dan memberikan sanksi tegas kepada nelayan yang merusak sumber daya perikanan.

2.5.3. Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat (*Adhyaksa Dault, IPB 2007*)

Peran pemuda dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Sukabumi teridentifikasi dalam aspek perencanaan berupa peran dalam rapat di tingkat desa, memberi saran, menyusun program dan sosialisasi program. Peran pemuda dalam aspek produksi yang mencakup kepemilikan aset penangkapan ikan, aset pemasaran ikan, bertindak sebagai manajer usaha, sebagai tenaga kerja, menyediakan sarana produksi dan menyiapkan layanan reparasi.

Dari hasil penelitian ditemukan adanya faktor-faktor determinan yang mempengaruhi peran pemuda dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Sukabumi adalah aspek kebijakan publik, kewirausahaan, sumberdaya, dan kapital sosial. Penelitian ini menyarankan bahwa program yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebaiknya melibatkan masyarakat, termasuk pemuda, sejak perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi, sehingga mereka merasa memiliki program tersebut. Keterlibatan pemuda bisa memberikan semangat atau ide-ide baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Sementara itu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, juga harus dapat menjangkau kalangan masyarakat secara lebih luas termasuk pemuda. Usia yang masih relatif muda dapat memberikan harapan bahwa pemuda akan lebih produktif jika kebijakan publik yang ada bersifat kondusif dan aktual sesuai minat, kemampuan dan manfaat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif yang menurut Creswell (1994), didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Menurut Moelyarto (1999), untuk dapat menggambarkan secara tepat pola pemberdayaan pemuda pesisir, dapat dilakukan penelitian kualitatif dengan metode dekriptif melalui pendekatan terhadap lima dimensi yang ada yaitu dimensi pengetahuan lokal, sistem religi, ekonomi, kelembagaan, dan politik.

Metode deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan semua variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi hanya untuk mendapatkan gambaran tentang upaya pemberdayaan pemuda pesisir dan merumuskan model dan strategi yang tepat dalam pemberdayaan pemuda pesisir.

Adapun sifat sampel yang harus representatif dalam mewakili populasi, bukan merupakan persyaratan yang utama. Dengan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan statistik *non-probabilita*, artinya tidak semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Informan dipilih dengan sengaja (*purposive*), dimana peneliti menentukan sendiri dengan asumsi bahwa informan tersebut mengetahui permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan informasi dan tanggapan terhadap permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini. Penentuan sumber data tersebut dilakukan dengan mengecek kebenaran data dari suatu sumber terhadap sumber yang lain. Dengan demikian, data atau informasi tentang sesuatu yang sama dapat dibanding-bandingkan. Melalui cara tersebut, data yang terkumpul dapat lebih dipercaya kebenarannya.

Peneliti menggunakan beberapa metode yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, wawancara dan kajian kepustakaan.

3.2. Informan

Para informan yang akan menjadi sumber dari pengumpulan data dari penelitian ini antara lain adalah pejabat terkait pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komunitas Pemuda Pesisir dan Pengurus Perkumpulan Pemuda Pesisir di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian pada bidang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dikaji pula mengenai program-program yang berhubungan dengan kewirausahaan pemuda pesisir pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Hasil wawancara dari informan tersebut nantinya akan membantu peneliti dalam menganalisa program-program kerjasama yang sudah atau sedang dilaksanakan. Dengan begitu penulis bisa melihat apakah program yang telah atau sedang dilaksanakan sudah efektif atau belum terhadap peningkatan keberhasilan penanaman motivasi berwirausaha bagi pemuda pesisir.

Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dari berbagai macam sumber, antara lain diperoleh :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, arsip lembaga dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) semi terstruktur. Wawancara mendalam tersebut dilakukan kepada beberapa narasumber. Narasumber adalah seorang yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dicari oleh peneliti.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah :

- a. Komunitas Pemuda Pesisir
- b. Pengurus Perkumpulan Pemuda Pesisir

- c. Tokoh Masyarakat Pemerhati permasalahan pemberdayaan masyarakat pesisir.
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan masyarakat pesisir.
- f. Unsur pengambil kebijakan dalam pemberdayaan pemuda pesisir, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tangerang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang

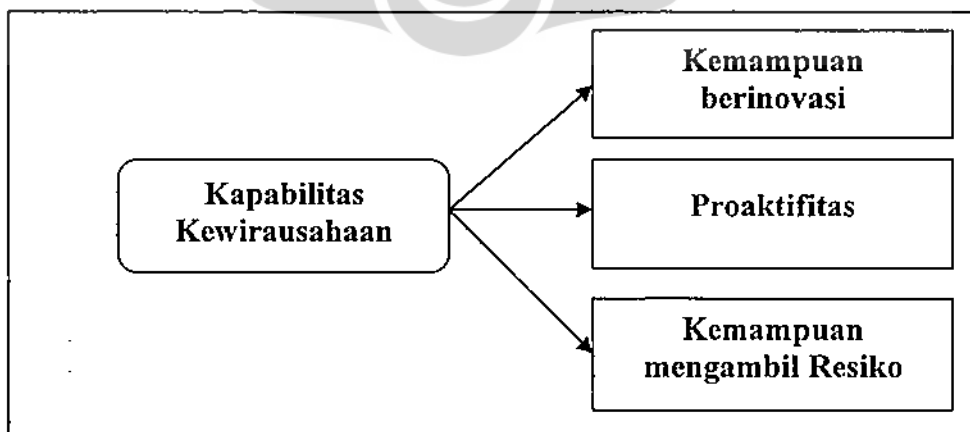
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, peraturan dan Undang-Undang, informasi media massa, dan berbagai data statistik yang terkait.

3.3. Operasionalisasi Konsep

Untuk menjawab upaya peningkatan kapabilitas kewirausahaan pemuda pesisir, maka dilakukan pendekatan dengan menggunakan konsep kemampuan berinovasi, proaktifitas, dan keberanian mengambil resiko (Weerawardena, 2003)

Gambar 3.1. Konsep Kapabilitas Kewirausahaan



Sumber : Weerawardena (2003)

3.4. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif, maka instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan utama yang akan diajukan kepada seluruh informan.

Sebagai tambahan, pertanyaan ini hanya bersifat sebagai *guidance* atau pedoman semata, kalimat atau bentuk pertanyaan akan disesuaikan bahkan mungkin ditambah atau dikurangi sesuai dengan kapasitas informasi serta fungsi atau peranan yang mereka miliki.

3.5. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Untuk memenuhi hal-hal di atas maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua kegiatan yaitu:

a. *Desk Research*

Desk Research atau studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai informasi yang terkait dengan program kepemudaan khususnya bidang pemberdayaan pemuda. Sumber informasi itu sendiri berasal dari buku-buku panduan program pemberdayaan pemuda, media cetak (majalah dan koran), jurnal, internet, serta berbagai dokumen dari studi dan kajian yang pernah dilakukan.

b. *Wawancara Mendalam*

Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) semi terstruktur sehingga peneliti sedikit memberi pengarahan pada pewawancara tentang hakikat permasalahan yang ada maupun tentang pertanyaan yang diajukan terhadap sumber yang diwawancarai.

Peneliti harus tanggap kepada dunia dan latar belakang subyektif informan. Oleh karena itu, setiap informan mendapatkan *treatment* yang berbeda. Dalam konteks ini, wawancara mendalam juga melibatkan pengamatan terhadap *performance* informan dan *setting* tempat. Wawancara mendalam dilakukan dengan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Diharapkan wawancara mendalam tersebut dapat memberikan data yang kaya yang dapat memberikan masukan yang sangat berarti bagi peneliti dalam mengkaji strategi pemberdayaan pemuda pesisir.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data dan informasi di lapangan. Data yang terkumpul dalam format catatan lapangan dipilah-pilah dalam bentuk teks, bagan/skema dan gambar. Tujuan pemilahan data ini adalah untuk mengetahui dengan segera data mana yang masih perlu dilengkapi, informasi apa yang masih belum tergalai atau kesalahan apa yang harus diperbaiki.

Berdasarkan teknik tersebut di atas, maka metode analisa pemaparan data secara mendalam, melalui interpretasi-interpretasi, dan generalisasi pemaknaan. Informasi yang diperoleh dideskripsikan dengan menghubungkan informasi yang satu dengan yang lainnya, kemudian dikaitkan pada fenomena yang lebih mikro dan dianalisis secara teoritis.

3.7. Model Analisis

Analisis adalah sebuah proses pencarian dan perencanaan secara sistematis semua data dan bahan yang telah terkumpul agar peneliti mengerti benar makna yang telah dikemukakan dan dapat menyajikannya kepada orang lain secara jelas.

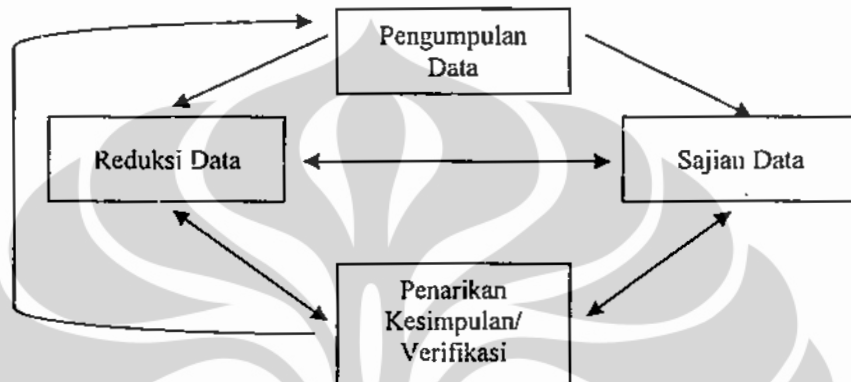
Dalam penelitian kualitatif, proses analisis dilakukan bersamaan saat peneliti mengumpulkan data. Hal ini dilakukan karena bertujuan untuk memperoleh gambaran khusus tentang apa yang menjadi kajian penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Model Analisis Interaktif** (*Interactive Model of Analysis*) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Reduksi Data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang telah dilaksanakan selama penelitian berlangsung.
- b. Penyajian Data, merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data.
- c. Penarikan Kesimpulan, dari semua data yang terkumpul dan telah dianalisis peneliti dapat menarik suatu kesimpulan.

Ketiga komponen tersebut dijalankan dalam suatu interaksi pengumpulan data berbentuk siklus. Artinya, peneliti bergerak diantara ketiga komponen tersebut dimana proses pengumpulan data adalah pedoman utamanya. Jadi apabila dalam penelitian data yang telah terkumpul dirasa masih kurang, peneliti dapat menyusun pertanyaan baru untuk mengumpulkan data. Hal ini juga dapat

dilakukan ketika peneliti menarik kesimpulan agar menghasilkan analisa yang cukup kuat.

Gambar 3.2. Skema Model Analisis Interaktif



BAB IV PEMBAHASAN

A. Pola-pola Pemberdayaan Pemuda Pesisir Yang Ada di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang

Hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya pola-pola pemberdayaan pemuda pesisir di kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang sudah berjalan selama ini yaitu antara lain :

1. Pola kemitraan pemuda nelayan dan swasta, untuk meningkatkan kapabilitas keterampilan berwirausaha (*entrepreneurship*) di kalangan pemuda pesisir dalam mengelola potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Misalnya perusahaan memberikan kesempatan magang kepada pemuda (*experimental*). Melalui pola kemitraan dengan perusahaan proses *transfer knowledge* berjalan, walaupun tidak ada kontinuitasnya dan sifatnya hanya insidental.
2. Pola pemberdayaan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang berupa pelatihan budidaya ikan bandeng, rumput laut dan udang serta teknik pengolahan ikan. Pelatihan lain adalah pembuatan jaring ikan dan perbaikan mesin kapal penangkap ikan. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemuda nelayan yang ada hanya bersifat teoritis tidak sampai kepada praktek yang mendalam apalagi membangun kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan program. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang juga melibatkan pemuda pesisir kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dalam upaya konservasi wilayah pantai daerah seperti penanaman mangrove di sepanjang pesisir pantai dan jalur ke Pulau Cangkir serta penanaman rumputan dasar sebagai calon rumah ikan. Partisipasi pemuda masih sebatas ikut menyaksikan kelancaran dan keberhasilan program tersebut.
3. Pola pemberian bantuan langsung juga ditemukan, baik berupa bantuan modal peralatan ataupun bantuan uang sebagai modal awal

berwirausaha. Bantuan modal peralatan ditemukan pada pemberian alat-alat produksi sablon untuk industri konveksi untuk salah satu kelompok pemuda. Demikian juga bantuan uang tunai (*block grant*) sebagai modal awal berwirausaha juga ditemukan untuk salah satu kelompok pemuda yang lain.

4. Pola lain yang menarik adalah adanya *home* industri kerajinan tangan yang memanfaatkan bahan baku dari laut seperti kulit kerang, ikan buntal, dan bahan lain yang tidak lagi dimanfaatkan. Pola pemberdayaan berjalan alamiah, dan proses *transfer knowledge* melalui informal media. Ditemukan pula adanya industri kerajinan yang memanfaatkan bambu yang banyak terdapat di perkampungan nelayan. Pemuda nelayan memanfaatkan waktu menganggur di antara kesibukan menangkap ikan dan pada saat cuaca tidak mendukung untuk melakukan aktivitas penangkapan. Dalam hal ini pola pemberdayaan terjadi secara alamiah dari *self motivation* untuk mencari uang lebih dari luar sektor perikanan dan kelautan.
5. Pola inisiatif (mandiri) dengan melihat nelayan ditempat lain, seperti nelayan yang mengembangkan usaha pemanfaatan limbah pengolahan fillet ikan untuk pakan ternak. Limbah yang dimanfaatkan berupa sisa potongan kepala ikan dan isi perut ikan, yang oleh mereka dikeringkan dahulu dan dicampurkan dengan pakan utama berupa dedak untuk ternak itik. Dari sektor pemanfaatan wisata ziarah, juga ditemukan adanya partisipasi pemuda pesisir Kecamatan Kronjo untuk ikut berperan dengan menyediakan persewaan parkir kendaraan, toilet umum dan tempat berjualan pedagang kaki lima. Pola yang terjadi lebih dipicu pada memanfaatkan kejadian dan kondisi alam sekitar untuk mencari keuntungan bagi kelompok pemuda nelayan tersebut. .

Pemberdayaan atau *empowering* berasal dari kata *empower* (berdaya), dalam kamus bahasa ditafsirkan sebagai berkontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan berkenaan dengan perlindungan hukum, memberikan seseorang atau sesuatu kekuatan atau persetujuan melakukan sesuatu, menyediakan seseorang dengan sumberdaya, otoritas dan peluang untuk melakukan sesuatu

Universitas Indonesia

atau membuat sesuatu menjadi mungkin dan layak. Pada kamus yang lain pengertian menjadi memberikan seseorang rasa percaya diri atau kebanggaan diri.

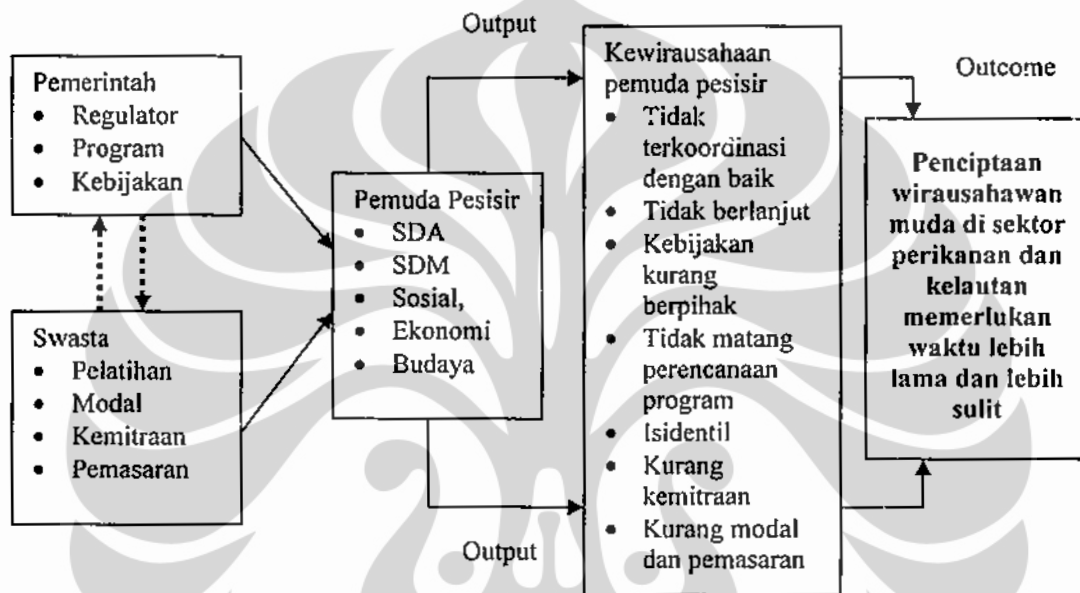
Dalam upaya pemberdayaan suatu komunitas, sangat diperlukan kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah, swasta atau *stakeholder* dan masyarakat pesisir yang menjadi pelaku utama sekaligus sasaran program pemberdayaan. Pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai birokrasi yang membuat peraturan, program dan kebijakan. Semua fungsi tersebut harus seiring sejalan dalam upaya pemberdayaan, apapun latar belakang program dan instansi yang menjalankannya. Hambatan yang seringkali dijumpai dalam upaya pemberdayaan suatu komunitas dari sisi birokrasi adalah lemahnya koordinasi antar instansi, lemahnya perencanaan program, lemahnya proses monitoring dan evaluasi program, dan lemahnya peraturan yang mendukung pelaksanaan serta kurangberpihaknya kebijakan pemerintah setempat.

Sementara kelemahan dari sisi *stakeholder* adalah masih minimnya kemitraan yang dijalin pemerintah dengan pihak swasta atau *stakeholder* terkait maupun kemitraan antara *stakeholder* dengan masyarakat. Demikian pula dengan program yang digulirkan biasanya hanya bersifat isidentil tanpa perencanaan untuk keberlanjutan. Misalnya pelatihan atau magang untuk pengolahan fillet ikan, yang biasanya diadakan pada saat libur sekolah atau saat musim paceklik penangkapan ikan karena gangguan cuaca. Kelompok pemuda pesisir biasanya melakukan pendekatan langsung ke swasta tanpa dibantu oleh aparat pemerintah setempat.

Untuk pemberdayaan yang berkelanjutan, sebaiknya pihak swasta tidak hanya memfasilitasi pelatihan yang bersifat isidentil, namun juga dapat membantu dalam proses pertukaran ilmu dan teknologi (*transfer knowledge*), penguatan akses permodalan, perluasan informasi pemasaran maupun jalinan kemitraan yang panjang. Misalnya kelompok pemuda pesisir dijadikan sebagai penyedia bahan baku ikan segar untuk pengolahan fillet ikan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pasar.

Pola pemberdayaan yang pemuda pesisir yang sudah berjalan di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang selama ini, secara singkat dapat dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 4.1. Pola Pemberdayaan Pemuda Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang sudah berjalan



B. Pola Pemberdayaan Yang Sesuai Bagi Pemuda Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Ginanjar (1997), memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Masalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan Kecamatan Kronjo terlihat sangat ironis jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam wilayah pesisir yang melimpah, baik sektor perikanan maupun kelautan. Hal tersebut setidaknya tercermin dari tingginya angka putus sekolah di kalangan anak-anak

usia sekolah. Dari jumlah penduduk sebesar 56.514 orang pada Sensus Penduduk tahun 2010 kemarin, mereka yang hanya tamat SD sebesar 18.259 orang, sedangkan yang tamat SLTP sebesar 5.364 dan tamat SLTA sebesar 2.521 orang. Sektor perikanan masih belum menjadi pilihan utama bagi penduduk untuk memperoleh penghasilan yang layak, karena dipandang penuh resiko, modal besar dan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan utama di sektor perikanan dan kelautan hanya sebesar 1.953 orang, sementara mereka yang bekerja sebagai pedagang sebesar 3.867 orang dan di sektor pertanian sebesar 6.716 orang. Sebanyak 15.345 orang belum mempunyai pekerjaan tetap atau menganggur.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat menurut Ginanjar (1997), dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemerintah setempat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang dapat memaksimalkan peran para penyuluh untuk mengidentifikasi potensi, tantangan dan hambatan dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan untuk masyarakat pesisir khususnya bagi generasi mudanya. Karena pada intinya pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya tahan suatu masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), pemerintah perlu menciptakan langkah-langkah yang lebih nyata dan positif, seperti penyediaan berbagai masukan (input), dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang perlu koordinasi yang baik dengan instansi lain yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, supaya program yang akan digulirkan tidak tumpang tindih baik dari sisi perencanaan, alokasi anggaran, peraturan pendukung dan kebijakan yang dijalankan. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Universitas Indonesia

Pemerintah juga harus menyadari bahwa upaya pemberdayaan tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan kegiatan pendampingan dan monitoring serta evaluasi yang terus menerus. Kegiatan pendampingan sangat berperan dalam proses *transfer knowledge* dari pemerintah, *stakeholder* atau swasta kepada kelompok pemuda pesisir. Pendamping juga berperan dalam membuka akses permodalan maupun pemasaran serta kemungkinan pengembangan usaha. Dalam proses pemberdayaan ini, yang terpenting adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, pemerintah juga harus menjalankan fungsinya sebagai regulator yang akan mengeluarkan kebijakan untuk melindungi kelancaran berusaha dari kelompok pemuda pesisir tersebut. Kebijakan untuk melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Sementara itu menurut Moelyarto(1999) *dalam* Wahyono *et al* (2001) untuk dapat menggambarkan pola pemberdayaan yang tepat dalam upaya peningkatan kapabilitas kewirausahaan pemuda pesisir, dapat dilakukan pendekatan terhadap lima dimensi yang ada yaitu dimensi pengetahuan lokal, sistem religi, ekonomi, kelembagaan, dan politik.

4.1. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Pengetahuan Lokal

Pengetahuan masyarakat untuk mengembangkan kapabilitas kewirausahaan di bidang perikanan dan kelautan masih sangat terbatas, miskin inovasi dan semua berjalan alamiah. Lembaga pemerintah maupun swasta yang melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kapabilitas kewirausahaan pemuda pesisir tidak terprogram secara terarah, tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak berkelanjutan, sehingga langkah menuju pemberdayaan tidak tercapai.

Contoh program pemerintah yang sudah dijalankan yaitu pemberian bantuan alat produksi kepada kelompok pemuda yang kompetitif, pelatihan perbengkelan mesin kapal penangkap ikan, pelatihan budidaya bandeng, udang dan rumput laut, serta pengembangan produk olahan dari ikan.

Disatu sisi kearifan lokal yang potensial sangat beragam, dan sumber pengetahuan bisa dikembangkan. Misalnya adalah pemanfaatan produk sisa olahan fillet ikan menjadi bahan baku untuk pakan ternak itik atau ikan. Mereka secara tidak langsung turut menjaga kebersihan lingkungan pesisir dari pencemaran sisa olahan ikan disamping meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penjualan produk hasil ternak. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang sampai dengan saat pengamatan dilaksanakan di lapangan, belum mempunyai inisiatif dalam membangkitkan motivasi masyarakat nelayan untuk melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap sisa olahan ikan tersebut. Padahal peluang yang tersedia adalah produk sisa olahan ikan dapat menjadi bahan baku pembuatan tepung ikan, yang mana dalam rantai produksi pakan ternak modern merupakan bahan baku yang bernilai ekonomis tinggi karena mempunyai kandungan nutrisi yang baik.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang adalah melakukan sosialisasi akan pentingnya produk sisa olahan ikan sebagai bahan baku pakan ternak bernilai ekonomis tinggi. Melalui penyuluhan yang intensif kepada kelompok pemuda pesisir Kecamatan Kronjo, diharapkan akan muncul motivasi dari kelompok pemuda tersebut untuk mencoba melakukan pembuatan tepung ikan. Peran pemerintah disini adalah sebagai motivator dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemerintah ikut berperan untuk membangun daya tahan suatu masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya dengan memberikan berbagai fasilitas yang mendukung. Misalnya adalah memberikan pelatihan pembuatan tepung ikan dengan alat yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Pelatihan dapat dijalankan sendiri dengan menggunakan APBD ataupun mengajak kerjasama dengan pihak

swasta di bidang industri pakan ternak. Untuk memperdalam ilmunya, pemuda juga dapat diberikan kesempatan magang di perusahaan tersebut.

Untuk menjamin supaya pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada kelompok pemuda secara berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan pendampingan dan kegiatan monitoring serta evaluasi yang terus menerus. Pemerintah juga dapat membantu memfasilitasi kemitraan yang lebih luas untuk akses permodalan dan pemasaran dengan mengajak beberapa *stakeholders* yang berkepentingan dengan kegiatan pemberdayaan kelompok pemuda pesisir tersebut. Dalam hal ini pemerintah ikut berperan untuk memperkuat potensi dan daya saing kelompok pemuda pesisir kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dengan melakukan langkah nyata dan positif berupa pendampingan untuk akses permodalan dan pemasaran hasil produksi.

Tabel 4.1. Komposisi Kandungan Nutrisi Bahan Baku Pakan Ikan
(Kandungan Nutrisi Bahan Baku Hewani)

NO	JENIS BAHAN BAKU	PROTEIN %	KARBOHIDRAT %	LEMAK %
1	Tepung ikan	62,65	5,81	15,38
2	Tepung rebon	59,4	3,2	3,6
3	Benawa/kepiting	23,38	0,06	25,33
4	Tepung kepala udang	53,74	0	6,65
5	Tepung anak ayam	61,56	-	27,3
6	Tepung kepompong ulat sutera	46,74	-	29,75
7	Ampas minyak hati ikan	25,88	-	56,75
8.	Tepung darah	71,45	13,32	0,42
9	Silase ikan	18,2	-	1,2
10	Tepung tulang	25,54	-	3,8
11	Tepung bekicot	54,29	30,45	4,18
12	Tepung cacing tanah	72	-	-
13	Tepung artemia	42	-	-
14	Telur ayam/itik	12,8	0,7	11,5
15	Susu	35,6	52	1

Sumber : Mujiman, A. (1999). Makanan Ikan

Adapun pengetahuan lokal yang lain dan berkembang di masyarakat kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, adalah adanya kearifan lokal tentang

pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Persepsi yang berkembang terhadap pemanfaatan sumberdaya alam adalah bahwa sumber daya alam merupakan liak milik Yang Maha Kuasa, karena itu wajib dipelihara bersama dan hasilnya dimanfaatkan bersama-sama. Dalam merealisasikannya, mereka mempunyai dua pandangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang terjadi, yaitu *Pertama*, ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa ikan di laut tidak akan habis, karena itu boleh saja melakukan usaha penangkapan kapanpun seorang itu mau selagi dia mampu. *Kedua*, sumberdaya laut apabila tidak dikendalikan dengan baik, ikan yang ada di dalamnya akan berkurang.

Sistem pengelolaan dan pemanfaatan berdasarkan persepsi pertama menghasilkan pandangan bahwa sumberdaya laut dapat dieksploitasi sepanjang waktu karena sifatnya *open access*. *Property right system* yang menyangkut *fishing ground* karena sifatnya milik bersama, maka pengelolaannya diserahkan kepada nelayan penangkap ikan itu sendiri tanpa ada pembatasan yang tegas. Dalam upaya pemanfaatannya maka setiap nelayan bebas melakukan penangkapan di daerah itu tanpa ada aturan yang tegas dan ketat. Tata cara pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang belum tegas tersebut, mengakibatkan kurangnya kemampuan mengendalikan *fishing ground*, waktu penangkapan, alat tangkap yang digunakan. Semuanya itu dapat berakibat kepada berkurangnya jumlah ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan.

Sementara itu untuk persepsi kedua, yaitu sumberdaya laut apabila tidak dikendalikan dengan baik, ikan yang ada di dalamnya akan berkurang, akan mendorong keberadaan upaya konservasi SDKP. Masyarakat dapat memahami upaya konservasi tersebut sebagai daerah larangan melakukan penangkapan ikan. Daerah larangan tersebut apabila dilanggar maka nelayan yang melakukannya akan mendapat celaka. Daerah larangan biasanya terdiri dari daerah yang mempunyai karang ataupun arus yang kuat, dan secara umum sudah diketahui oleh masyarakat nelayan.

Keberadaan upaya konservasi yang dikenalkan secara formal oleh instansi pemerintah belum dikenal luas, karena konsep konservasi tersebut belum menjadi bagian kehidupan bersama. Disamping itu, arti konservasi kadang berbeda

dengan daerah larangan yang dipahami oleh masyarakat. Tata cara pengaturan dan kegiatan konservasi SDKP yaitu berupa mekanisme penerapan upaya konservasi sesuai dengan konsepsi yang dianut oleh masyarakat yaitu daerah larangan bersama yang terlindungi karena kesakralannya, kemudian dilakukan upaya penghormatan seperti kegiatan sedekah laut, berdasarkan keyakinan yang telah diturunkan secara turun temurun.

Dalam konteks pemuda pesisir di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, adanya aturan tentang konservasi yang dipahami secara tradisional dapat dikemas menjadi suatu nilai baru yang lebih rasional. Dari hasil pengamatan di lapangan hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penanaman pohon mangrove di sepanjang pesisir pantai dan jalur ke Pulau Cangkir untuk mencegah abrasi kerusakan wilayah pesisir dan penanaman rumpon dasar dari blok beton berbentuk bujur sangkar sebanyak 40 buah sejak tahun 2009 dengan lokasi di dekat Pulau Cangkir. Rumpon tersebut sangat membantu nelayan saat paceklik ikan ataupun menjadi lokasi wisata mancing. Lokasi tersebut dapat dikelola oleh perkumpulan pemuda pesisir dan dapat menghasilkan pendapatan. Dalam hal ini pemerintah melakukan kegiatan pembangunan dengan dua pendekatan pembangunan alternatif sekaligus yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan (*environmental development*) maupun pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*).

Pemuda dapat pula melakukan inovasi dari berbagai pengetahuan lokal yang selama ini dipahami oleh masyarakat, misalnya pemanfaatan kulit kerang dan bambu untuk produk kerajinan guna memperoleh nilai tambah. Proses inovasi ini berlangsung dengan sendirinya tanpa sentuhan pemerintah setempat. Inovasi menurut Roger dan Shoemaker (1971) diartikan sebagai ide-ide baru, praktik-praktik baru atau obyek-obyek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Sementara menurut Lionberger dan Gwin (1982), inovasi tidak hanya sekedar sesuatu yang baru, namun lebih luas dari itu, yaitu sesuatu yang dinilai baru atau sesuatu yang dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat lokal atau komunitas tertentu. Sesuatu yang baru mengandung pengertian bukan hanya sekedar diketahui atau dimengerti sebagai suatu pengetahuan saja, tetapi lebih jauh dalam arti sikap (*attitude*). Inovasi tidak

Universitas Indonesia

terbatas pada benda, barang atau produk tertentu, namun dapat mencakup ideologi, kepercayaan, sikap hidup, informasi, perilaku, atau gerakan-gerakan yang mengarah kepada proses perubahan dalam segala bentuk kehidupan masyarakat.

4.2. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Sistem Religi

Agama yang dianut dan diyakini sebagian besar masyarakat nelayan di Kecamatan Kronjo adalah agama Islam, dan mereka menjadikannya sebagai dasar pandangan kehidupan. Dalam menjalin kehidupan, masyarakat telah memadukan hubungan secara vertikal terhadap Allah SWT, dan hubungan horisontal terhadap manusia serta alam sekitarnya. Jalinan hubungan yang bersifat horisontal diisi dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Agama pada saat tertentu dapat berfungsi sebagai pelindung tatanan sosial dan pada saat lainnya dapat menilai kondisi sosial saat sekarang dengan mengacu kepada masyarakat ideal yang berdasarkan kepada ajarannya. Peranan pemimpin agama dalam kehidupan sehari-hari dapat untuk menyeimbangkan pandangan masyarakat bahwa setiap upaya untuk membangun manusia secara utuh harus serasi antara aspek lahiriah dan kepuasan aspek batiniah. Tokoh agama tersebut berfungsi sebagai motivator, pembimbing, pemberi landasan etis dan moral serta mediator dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari dan setiap kegiatan pembangunan. Tokoh agama tersebut ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proses pemberdayaan dalam upaya peningkatan kapabilitas kewirausahaan pemuda pesisir.

Tokoh agama atau ulama dapat berperan sebagai seorang motivator dalam suatu proses perubahan sikap. Karena biasanya untuk wilayah pesisir merupakan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, tokoh agama dianggap sebagai seorang yang mempunyai pandangan dan pemikiran yang lebih maju. Apa yang diajarkannya biasanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Dalam rangkaian pemberdayaan, apa yang diperankan oleh tokoh agama tersebut merupakan suatu proses adopsi yaitu suatu proses mentalitas pada diri seseorang

atau individu dari mulai seorang tersebut menerima ide-ide baru sampai memutuskan menerima atau menolak ide tersebut.

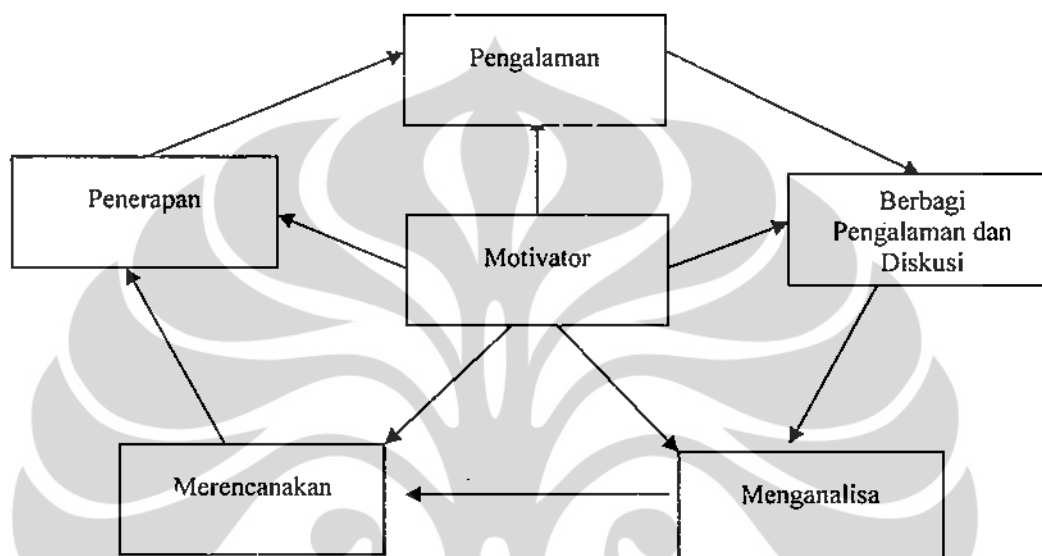
Dari hasil pengamatan di lapangan, tokoh pemuka agama setempat atau ulama melalui forum pengajian rutin setiap minggu, selalu memberikan motivasi kepada pemuda untuk tidak menganggur, mengganggu keamanan lingkungan, menjauhi narkoba dan ancaman radikalisme karena pemahaman sempit ajaran agama Islam. Pemuda disarankan untuk membentuk kelompok seperti karang taruna atau koperasi supaya potensi mereka dapat lebih tersalurkan.

Diakui oleh para ulama bahwa kebanyakan pemuda merasa kurang berminat untuk berusaha di sektor perikanan karena gengsi dan tidak menjanjikan pendapatan bulanan yang pasti. Untuk membangkitkan motivasi pemuda pesisir Kecamatan Kronjo supaya mau berusaha secara mandiri dan tidak menganggur, ulama dalam setiap forum pengajian yang diselenggarakan untuk memperingati hari besar agama, selalu mengajak pengusaha di lingkungan Kecamatan Kronjo yang dianggap berhasil untuk dapat memberikan contoh dan strategi berwirausaha. Melalui forum pengajian tersebut, tokoh agama setempat berperan sebagai motivator dalam pendidikan melalui pola pembelajaran orang dewasa (*adrogogy*), yang merupakan bagian proses pendidikan yang diorganisasikan pesannya sedemikian rupa di mana metode penyampaian maupun pelaksanaannya ditujukan untuk dapat melanjutkan maupun menggantikan pendidikan di sekolah. Tujuan dari pendidikan orang dewasa adalah agar terjadi proses perubahan perilaku atau sikap (*attitude*) menuju ke arah yang lebih baik dan menguntungkan bagi kehidupan sasaran didik. Perubahan perilaku yang lebih baik dan menguntungkan hanya dapat terjadi apabila ada perubahan yang cukup mendasar dalam bentuk atau peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sekaligus sikap.

Dalam psikologi sosial, sikap (*attitude*) merupakan hal yang sangat penting dipelajari oleh para motivator karena menyangkut banyak aspek yang akan berpengaruh terhadap perilaku suatu komunitas masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Van de Ban (1999), sikap dapat diartikan sebagai perasaan, pikiran dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya, karena sikap mempunyai

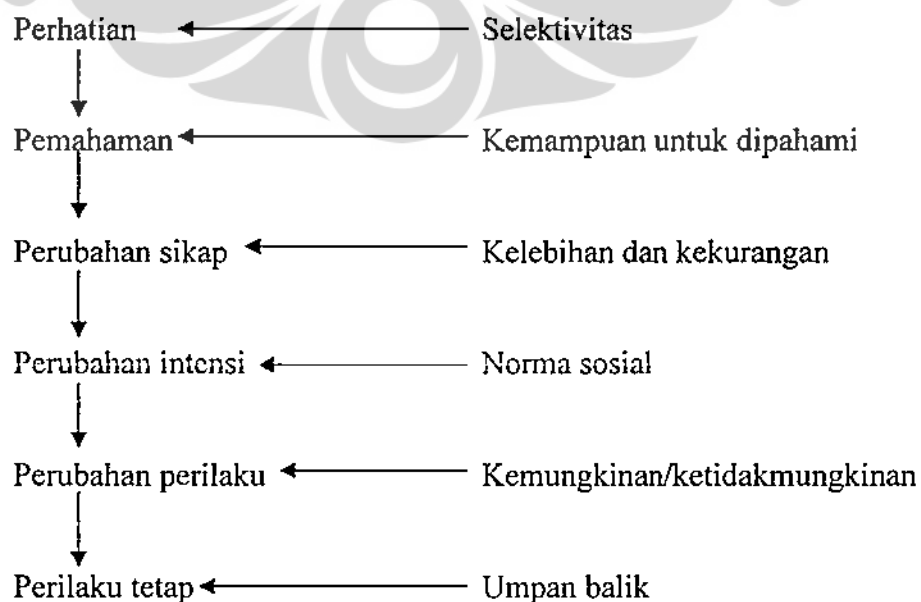
komponen seperti pengetahuan, perasaan-perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak.

Gambar 4.2. Proses Pembelajaran Orang Dewasa



Sedangkan model perubahan perilaku melalui sikap menurut Van de Ban (1999) diatas, dapat digambarkan pada bagan dibawah ini.

Gambar 4.3. Model Perubahan Perilaku Melalui Sikap



Universitas Indonesia

4.3. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Ekonomi

Masyarakat nelayan dikenal memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap SDKP. Kegiatan produksi tidak hanya diartikan sebagai upaya di dalam pemenuhan kebutuhan keseharian (subsistensi). Namun juga diartikan sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang berorientasi pasar. Saat kegiatan produksi masih sebatas pada upaya pemenuhan kebutuhan keseharian, maka pengembangan usaha terkait dengan kegiatan produksi akan berjalan lamban. Dapat diartikan juga sebagai lambatnya penyerapan teknologi atau rendahnya akses peningkatan teknologi. Akibatnya investasi yang masuk ke wilayah tersebut juga rendah.

Saat ini orientasi masyarakat nelayan di Kecamatan Kronjo pada kegiatan penangkapan ikan, utamanya untuk menyambung penghidupan sehingga hasil tangkapan yang diperoleh biasanya langsung dijual kepada pedagang pengumpul atau pembeli di TPI. Berdasarkan hasil wawancara hanya sekitar 15% volume hasil tangkapan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Besar dan laju investasi dalam kegiatan produksi dapat dilihat dari cara-cara melakukan kegiatannya mulai dari penangkapan, penanganan dan pengolahan serta penjualan hasil tangkapan. Dari hasil pengamatan di lapangan, ternyata teknologi penangkapan belum banyak berubah, maka kinerja yang terbentuk selama ini di atas kapal, setelah pendaratan, selama penjualan (transportasi dan pelelangan) masih menggunakan cara-cara tradisional. Pembagian pekerjaan masih berdasarkan pada fungsi-fungsi kepemilikan kapal, juragan atau pedagang besar yang merangkap sebagai pemilik modal, dan nelayan penangkap tetap tidak menguasai harga pasar ikan yang dijualnya tersebut.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pengolahan produk hasil tangkapan umumnya banyak dilakukan oleh kaum perempuan pesisir, sehingga kelompok ketrampilan ini seolah-olah menjadi bagian kehidupan perempuan. Produk yang dihasilkan masih terbatas pada produk olahan tradisional seperti ikan asin, ikan asap, pemindangan, dan fillet. Hal baru yang mulai diperkenalkan adalah bandeng cabut duri, bakso ikan, otak – otak ikan, surimi dan nugget ikan.

Sementara itu, pembagian peran dalam suatu pekerjaan untuk mata pencaharian alternatif, berhubungan langsung dengan kelompok pekerjaan fungsional yang telah terbentuk ndalam masyarakat nelayan. Kelompok tersebut antara lain pembuatan peralatan penangkapan. Pembuatan perahu dikerjakan oleh laki-laki, sementara pembuatan jaring termasuk perbaikannya kadang dikerjakan oleh perempuan. Sementara itu kelompok fungsional pemasaran hasil tangkapan untuk skala kecil biasanya dilakukan oleh perempuan dan untuk skala besar dilakukan oleh laki-laki. Dari pola ini, terlihat pembagian pekerjaan antara laki-laki dengan perempuan, ketrampilan pemasaran di tingkat pengecer dilakukan oleh perempuan dan pemasaran di tingkat pedagang pengumpul dilakukan oleh laki-laki.

Dalam upaya pemberdayaan untuk peningkatan kapabilitas kewirausahaan pemuda pesisir, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang dapat memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara terencana dan berkelanjutan. Misalnya pelatihan tentang budidaya ikan bandeng, udang ataupun rumput laut secara intensif, pelatihan tentang penanganan penyakit ikan budidaya serta pelatihan pembuatan pakan buatan. Disamping itu untuk mengenalkan teknologi penangkapan ikan yang efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat, pemerintah dapat melakukan pelatihan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan ukuran kapal dan tidak merusak ekosistem laut dalam operasionalnya. Misalnya kapal dengan ukuran dibawah 5 GT dapat menggunakan alat tangkap bubu dan pancing, untuk kapal berukuran 10 sampai dengan 20 GT dapat menggunakan alat tangkap cantrang dan dogol, serta untuk kapal berukuran 20 sampai dengan 30 GT dapat menggunakan gardan dan cantrang dogol. Masing-masing kapal tersebut diatur wilayah operasinya, untuk menghindari konflik pemanfaatan *fishing ground* dan optimal hasil tangkapannya.

Karena Kecamatan Kronjo sudah terkenal dengan hasil budidaya bandengnya yang mempunyai ciri tekstur daging lebih ulet, berkulit bersih kehijauan, dan bebas bau lumpur, pemerintah setempat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang dapat melakukan pendekatan kepada kelompok pemuda supaya berminat ikut berusaha pada budidaya ikan bandeng. Pelatihan harus terencana dengan baik demi keberlanjutan pemberdayaan pemuda pesisir tersebut. Misalnya pada tahun pertama, dapat disebut sebagai tahun

rintisan usaha yaitu mereka didorong untuk membentuk kelompok produksi dengan beranggotakan 7 sampai 10 orang tiap kelompok. Kelompok ini akan diberikan pelatihan teknis budidaya ikan bandeng dari penyiapan bibit sampai dengan pemasarannya. Mereka juga dibukakan akses permodalan baik berupa alat produksi ataupun uang tunai dengan bantuan tenaga pendamping.

Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh usaha mikro di bidang perikanan dan kelautan adalah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan (PK) BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana Program Kemitraan dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Pinjaman, untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Sementara pinjaman khusus, dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan ;
2. Hibah, dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemaasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta pengkajian atau penelitian.

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan untuk masyarakat pesisir, dapat ditemukan beberapa pola kerjasama yaitu :

1. Pola Pertama,
BUMN Pembina memberikan pinjaman kepada Koperasi atau Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai Mitra Binaan ;
2. Pola Kedua,
BUMN Pembina memberikan pinjaman langsung kepada anggota Koperasi atau LEPP-M3 yang mempunyai unit usaha. Dalam hal ini koperasi atau LEPP-M3 bertindak sebagai penjamin atas pinjaman dana kemitraan yang diterima oleh anggotanya ;

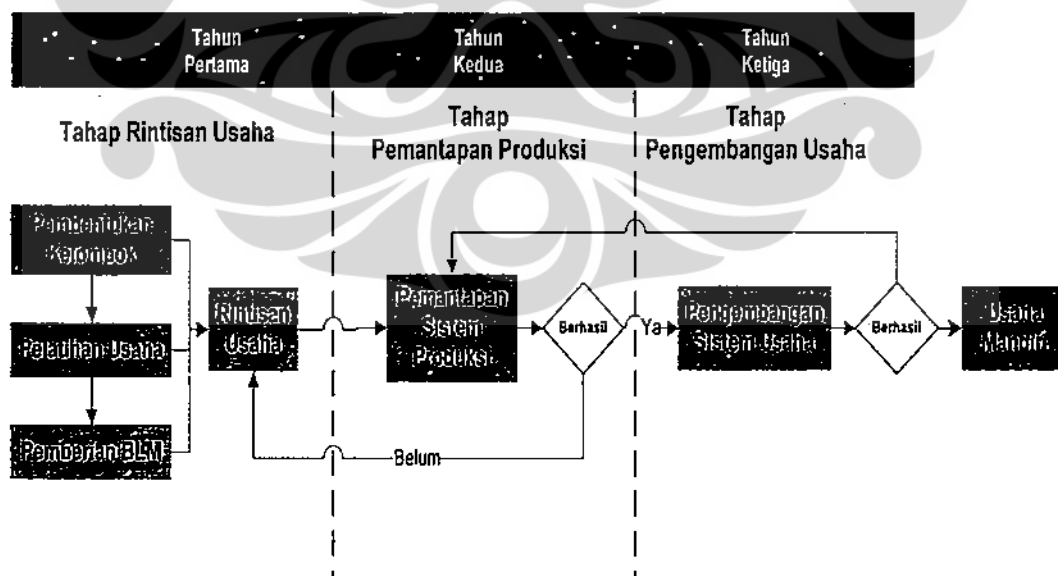
3. Pola Ketiga,

BUMN Pembina memberikan pinjaman kepada Unit Usaha Kecil masyarakat pesisir baik yang merupakan anggota koperasi atau LEPP-M3 ataupun yang bukan anggota.

Pada tahun kedua kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut dapat disebut tahap pemantapan produksi. Kelompok pemuda pesisir yang sudah berjalan aktivitas usaha budidaya ikan bandeng tersebut, dievaluasi secara menyeluruh dari sistem produksinya. Mereka juga dipertemukan dengan para praktisi di bidangnya masing-masing supaya dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi selama proses produksi.

Dan pada tahun ketiga, kegiatan pemberdayaan dapat disebut sebagai tahap pengembangan usaha. Biasanya setelah berhasil mengatasi hambatan yang ada di tahun pertama dan kedua, kelompok pemuda berkeinginan untuk meluaskan pemasaran ataupun melakukan diversifikasi kegiatan budidaya.

Gambar 4.4. Tahapan Pemberdayaan Ekonomi pada Peningkatan Kewirausahaan Pemuda Nelayan di wilayah Pesisir



Sumber : Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010)

Tahap 1 : Tahap Rintisan Usaha.

Dalam tahapan ini generasi muda nelayan diupayakan memperoleh akses dan peningkatan kapasitas di bidang teknologi sehingga dapat melakukan rintisan usaha di bidang perikanan dan kelautan.

Tahap 2 : Tahap Pematapan Sistem Produksi

Tahapan ini adalah pematapan kapasitas pemuda nelayan dalam sistem produksi usaha yang dijalani. Akan diadakan kegiatan pertemuan dengan narasumber di bidang teknologi, pelaku pasar dan lembaga permodalan di tingkat lokal. Substansi materi kegiatan tersebut adalah evaluasi kinerja sistem produksi dan bimbingan lanjutan di bidang teknologi.

Tahap 3 : Tahap Pengembangan Usaha

Tahapan ini terkait dengan pengembangan sistem usaha. Untuk itu akan dilaksanakan kegiatan temu usaha. Substansi materi kinerja sistem usaha dan bimbingan lanjutan di bidang usaha. Adapun peserta meliputi pelaku usaha, narasumber di bidang usaha, pelaku pasar di tingkat lokal.

Disamping pemanfaatan sumber daya perikanan, wilayah pesisir Kecamatan Kronjo juga mempunyai potensi dari sektor pariwisata bahari berupa wisata ziarah yang berlokasi di Pulau Cangkir. Menurut Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, berdasarkan potensi yang ada, maka pengembangan kawasan wisata Pulau Cangkir dan sekitarnya akan diarahkan pada dua jenis kegiatan yaitu :

1. Wisata ziarah, untuk melestarikan tradisi ziarah, karena adanya makam keramat Pangeran Jaga Lautan yang bernama asli Syeh Waliyuddin seorang ulama besar yang berasal dari Banten. Makam inilah yang menjadikan Pulau Cangkir sebagai tempat wisata religius yang dikenal luas oleh masyarakat Banten pada umumnya. ;
2. Wisata bahari terpadu, yaitu pengembangan sebelah selatan Pulau Cangkir yaitu di daratan Pulau Jawa dengan menggunakan lahan tambak yang ada.

Pemerintah setempat masih terus berupaya untuk menarik minat investor dalam pengembangan potensi wisata Pulau Cangkir tersebut. Prasarana yang telah tersedia di kawasan ini adalah listrik dan air bersih, sedangkan prasarana

Universitas Indonesia

penunjang pariwisata lainnya, seperti telekomunikasi, pos keamanan, penginapan, dermaga, trayek angkutan umum, warung souvenir, tempat hiburan, tempat olah raga air belum tersedia.

Dengan melihat potensi tersebut, selama ini pemuda mengambil kesempatan di dalamnya dengan menyediakan tempat parkir kendaraan, tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan toilet umum. Proses pemberdayaan yang terjadi disini lebih kepada pemanfaatan potensi lingkungan sekitar dan sudah berjalan sejak dahulu. Untuk peningkatan kapabiliitas kewirausahaan pemuda pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang tersebut, pemerintah setempat dapat memfasilitasi pengelolaan unit persewaan perahu wisata seperti *banana boat* sebagai sarana olahraga air dan perahu khusus untuk penggemar kegiatan memancing di laut.

4.4. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Kelembagaan

Inisiatif pembentukan lembaga yang ada di masyarakat, keberadaannya dapat terlihat dari aspirasi masyarakat nelayan baik perorangan maupun kelompok yang ingin disalurkan. Aspirasi yang bersifat kelompok umumnya dibawa dan diajukan oleh tokoh masyarakat informal yang kepemimpinannya diakui oleh masyarakat. Pemimpin informal adalah tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang disegani. Tujuan pembentukan lembaga yang ada seperti kelompok pengajian, organisasi pendidikan non formal, dan organisasi sosial lain adalah untuk menyalurkan kegiatan yang tumbuh dalam masyarakat nelayan.

Keberadaan kelembagaan dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan setempat karena dalam proses pembentukannya biasanya melalui kontak sosial yang akan menciptakan jaringan sosial. Beberapa jaringan sosial yang ada yang disatukan dengan keinginan untuk tetap harmonis sesuai dengan kepentingan dan keperluan setiap individu atau kelompok, disepakati adanya nilai-nilai, norma dan kaidah tertentu dalam suatu lembaga. Disamping itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan suatu lembaga dalam komunitas masyarakat, yaitu kondisi fisik lembaga, sumberdaya yang ada, sosial ekonomi, politik, kebudayaan (budaya, agama), interaksi antar penduduk, peranan

pemerintah setempat, permodalan, manajemen, tingkat pendidikan dan ketrampilan pengurus organisasi.

Dalam perkembangan kebudayaan, menurut Harry R. Potter ada tiga indikator untuk mengukur kekuatan suatu lembaga, yaitu :

1. Kemampuan organisasi untuk bertahan hidup ;
2. Seluas mana organisasi itu memiliki nilai instrinsik pada lingkungan ;
3. Kekuatan terhadap hubungan yang khusus dan pola-pola tindakan bagi organisasi yang sudah menjadi norma bagi organisasi lain dalam masyarakat.

Pemerintah setempat dapat memfasilitasi penguatan kelembagaan kewirausahaan pemuda pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dalam rangka peningkatan kapabilitasnya melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. *Entry*, yaitu dengan menyediakan pendamping sejak dini ;
2. *Sensing*, yaitu memfasilitasi pendamping untuk mulai mengamati lingkungan sekitar atas persetujuan pimpinan lembaga ;
3. *Lock-on*, yaitu memfasilitasi pendamping dan pimpinan lembaga bersama-sama menentukan satu atau lebih aspek yang diprioritaskan ;
4. *Implementation*, yaitu memfasilitasi pelaksanaan program lembaga dengan bantuan pendamping melalui berbagai metode ;
5. *Saparation*, yaitu penetapan tujuan akhir pemberdayaan untuk menghilangkan sifat ketergantungan ;

Dari pengamatan di lapangan, terdapat suatu lembaga pembelajaran non formal yang dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Ilmi. Lembaga ini didirikan semula untuk mengatasi ketidakmampuan membaca, menulis dan berhitung di kalangan masyarakat nelayan. Namun seiring perkembangannya, PKBM melakukan perluasan kegiatan yaitu membantu menumbuhkembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda Kecamatan Kronjo yang putus sekolah dan belum bekerja.

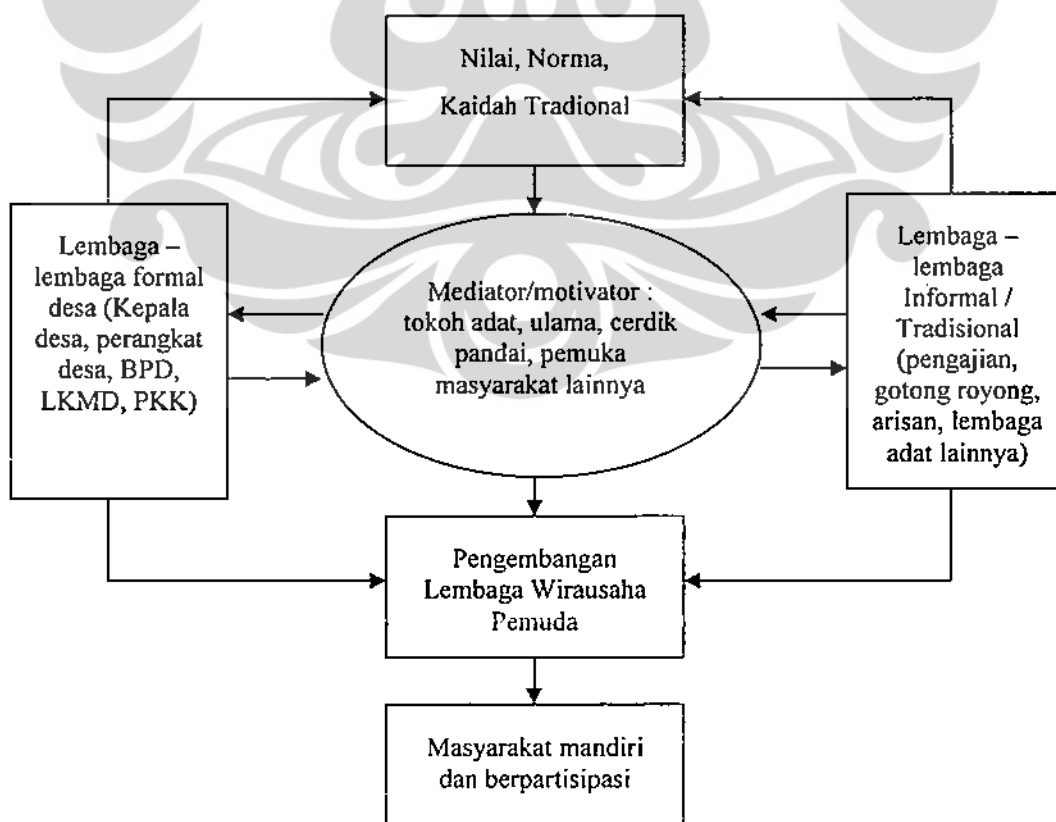
Pemerintah dapat membantu penguatan kelembagaan PKBM tersebut dengan mengikuti beberapa tahapan diatas, seperti penyediaan pendamping atau konsultan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Melalui pendamping tersebut, semua potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh PKBM dapat

Universitas Indonesia

dipetakan dengan jelas. Dari pengamatan terhadap potensi, kekuatan SDM, sarana dan prasarana serta modal yang tersedia, PKBM dapat menyusun rencana program belajar mengajar non formal maupun pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Kronjo.

Pendamping atau konsultan dalam PKBM dapat berperan dalam proses pelaksanaan program atau kegiatan PKBM dengan menggunakan beberapa pendekatan ataupun alih teknologi yang mungkin terjadi didalamnya. Metode yang digunakan tentunya harus dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh warga belajar. Pada akhirnya, tujuan dari pelatihan kewirausahaan melalui PKBM tersebut nantinya harus dapat mewujudkan warga belajar yang termotivasi untuk mandiri, bekerja keras, penuh inovasi, dan tidak selalu mengharapkan bantuan dalam proses pemberdayaannya. Mereka harus menyadari bahwa bantuan tersebut hanyalah sebagai pembuka jalan dalam rintisan berusaha.

Gambar 4.5. Skema Alur Pemikiran Pengembangan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda Pesisir



4.5. Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir dalam Dimensi Politik

Dalam kehidupan bermasyarakat, kepemimpinan politik merupakan kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan dalam pemerintahan diperlukan untuk menjamin program pembangunan berupa program yang terencana dan dapat mengarahkan suatu perubahan cara hidup masyarakat yang sesuai dengan isi dan tujuan program pembangunan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memahami dan menempatkan diri pada kondisi/persepsi pihak lain untuk mendapatkan manfaat bersama.

Tuntutan tidak hanya datang dari masyarakat nelayan sebagai pemanfaat sumberdaya, tetapi juga datang dari pemerintah yang mempunyai fungsi regulasi. Dari tuntutan tersebut biasanya memunculkan motivasi yang berbeda-beda dan dan dipahami secara berbeda pula. Jenis-jenis tuntutan masyarakat biasanya berupa keinginan untuk melakukan penangkapan secara bebas, baik *fishing ground* ataupun alat tangkapnya.

Dukungan terhadap kepemimpinan oleh masyarakat ada hubungannya dengan kemampuan membangun komunikasi. Kemampuan komunikasi adalah suatu bentuk komunikatif dan rasionalitas yang berhubungan dengan kapabilitas seseorang mendemonstrasikan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang dikehendaki oleh masyarakat nelayan adalah terutama bersikap tegas dan mempunyai integritas yang baik seperti aspek kejujuran, kemampuan mengemban kepercayaan, dan menerapkan prinsip keadilan serta mempunyai kematangan emosional.

Alam demokrasi perlu ditumbuhkan secara perlahan di kalangan masyarakat nelayan dengan tidak mengenyampingkan ketokohan tradisional. Kemudian diikuti dengan adanya upaya perbaikan kondisi ekonomi yang memadai, dan upaya peningkatan intelektualitas masyarakat. Apabila faktor tersebut dapat ditumbuhkembangkan dalam budaya masyarakat, maka pola hubungan kekuasaan lokal dengan luar akan berjalan lebih transparan dan harmonis.

Sementara itu untuk konflik yang terjadi antar komunitas akar permasalahannya tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, namun merupakan

faktor multidimensional yang melibatkan persoalan terkait dengan status dan harga diri, kekuasaan serta perebutan sumber daya yang ada. Perselisihan seperti konflik antar anggota masyarakat tersebut seyogyanya dapat diredam melalui kepemimpinan yang bijaksana.

Dalam konteks peningkatan kapabilitas pemuda pesisir di wilayah Kecamatan Kronjo, dari hasil pengamatan ditemukan bahwa dalam pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang sampai kini masih belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka diperlukan ketersediaan SDM pemuda yang berkualitas. Disamping itu juga adanya pelaku ekonomi yang handal, sebagai pelopor dan penggerak dinamika perekonomian masyarakat pesisir. SDM pemuda pesisir dapat ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dengan baik. Selain itu juga diperlukan dukungan dari para *stakeholders* yang luas demi kelangsungan pemberdayaan yang efektif.

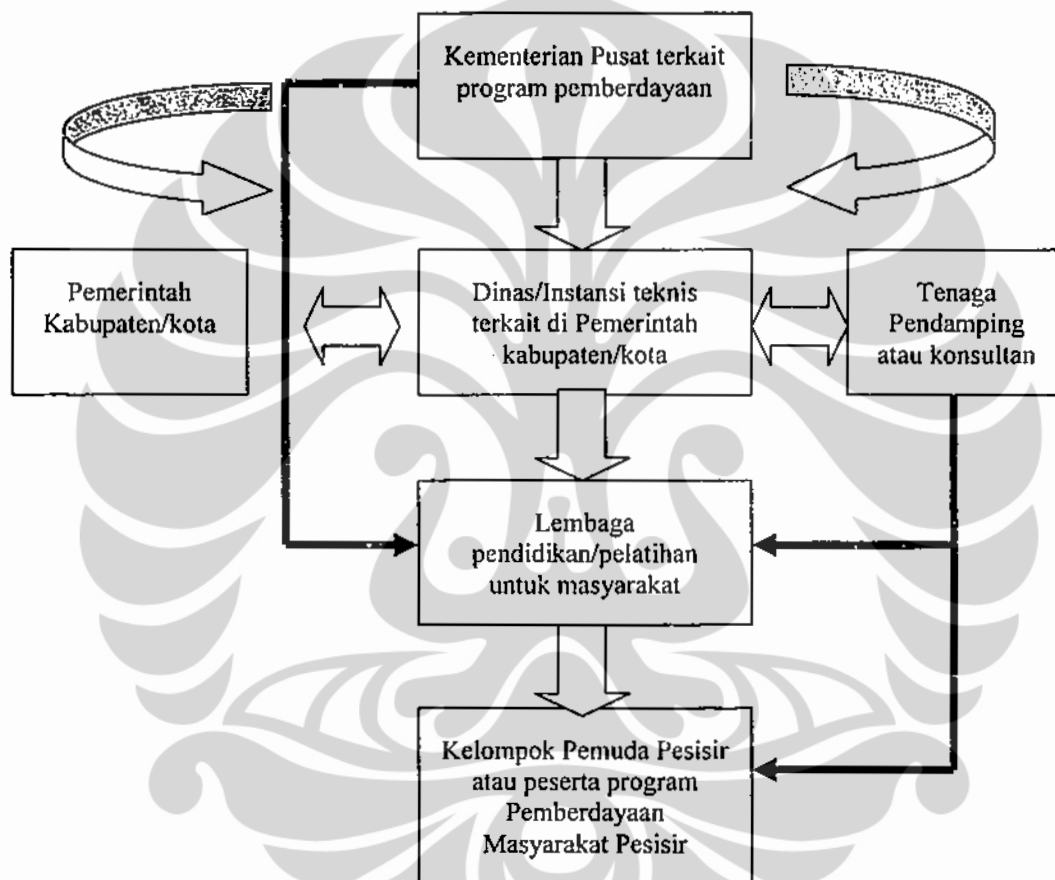
Setelah melihat hasil penemuan di lapangan, kemudian dikaji dan dianalisa melalui beberapa pendekatan dalam lima dimensi yang tidak boleh terlewatkan pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut diatas, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi pola pemberdayaan yang tepat dalam rangka peningkatan kapabilitas kewirausahaan pemuda pesisir di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Dari hasil analisa didapatkan suatu rumusan bahwa untuk pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapabilitas ketrampilan berwirausaha di kalangan pemuda pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, dapat melalui suatu pelatihan yang berbasis peningkatan kompetensi sumber daya pemuda pesisir yang dicirikan oleh :

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan keberlanjutan usaha, pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya ;
2. Pendampingan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan akses informasi bagi masyarakat dalam pengembangan usaha di bidang perikanan sehingga terbentuk kemandirian (keswadayaan) masyarakat dalam pengembangan usaha, pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya ;

Universitas Indonesia

3. Kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam mengembangkan kegiatan/usaha di bidang perikanan dan kelautan di wilayah pesisir.

Gambar 4.6. Rancangan Pola Pemberdayaan Untuk Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan Pemuda Pesisir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang



Penerapan rancangan pola pemberdayaan untuk peningkatan kapabilitas ketrampilan kewirausahaan pemuda pesisir tersebut diatas, harus didasarkan kepada prinsip-prinsip yang bersumber dari nilai-nilai lokal yang berkembang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya wilayah pesisir. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. **Bertumpu pada pembangunan manusia.** Senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya ;

2. **Otonomi.** Masyarakat memiliki kewenangan berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola usaha perikanan secara swakelola ;
3. **Berorientasi pada Pemuda dan Masyarakat Nelayan Miskin.** Semua kegiatan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pemuda dari kalangan masyarakat nelayan yang kurang beruntung ;
4. **Partisipasi.** Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan jenis usaha di bidang perikanan yang akan dikembangkan dan dalam pengelolaannya ;
5. **Kesetaraan dan keadilan gender.** Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pelaksanaan/ kegiatan program dan dalam menikmati manfaatnya secara adil ;
6. **Demokratis.** Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
7. **Transparansi dan Akuntabel.** Masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
8. **Prioritas.** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
9. **Kolaborasi.** Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
10. **Keberlanjutan.** Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
11. **Sederhana.** Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Program pemberdayaan harus sederhana, mudah dipahami dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pola pemberdayaan pemuda pesisir yang sudah berjalan selama ini di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, meliputi *pola dagang umum* antara pemuda nelayan dan swasta, *pola pemberdayaan swakelola* oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang berupa pelatihan teknis perikanan, *pola penyertaan modal* berupa pemberian bantuan langsung baik berupa alat produksi ataupun uang tunai sebagai modal berusaha, *pola mandiri* dan *pola inisiatif*. Pelaksanaan pola pemberdayaan tidak dapat berjalan maksimal dan tidak berkelanjutan karena kurangnya koordinasi dari pemerintah setempat, kurang luasnya jaringan kemitraan dengan pihak swasta maupun *stakeholder* lain.
2. Untuk penerapan pola pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapabilitas ketrampilan kewirausahaan pemuda yang sesuai dengan potensi sumber daya wilayah pesisir Kecamatan Kronjo, harus memperhatikan berbagai dimensi yang berkembang di wilayah pesisir tersebut, seperti dimensi pengetahuan lokal, religi, ekonomi, kelembagaan dan politik. Dalam rangkaian pemberdayaan, kualitas SDM pemuda pesisir sebagai bagian dari input sangat menentukan keberhasilan program. Sementara pemerintah dan *stakeholder* lainnya terlibat dalam proses pemberdayaan dengan koordinasi yang baik demi keberlanjutan program pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan keberlanjutan usaha, pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya. Pemberdayaan juga memerlukan pendampingan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan akses informasi, serta adanya kemitraan yang luas antara masyarakat, aparat pemerintah dan

swasta dalam mengembangkan kegiatan/usaha di bidang perikanan dan kelautan di wilayah pesisir

5.2. Saran

Dalam upaya pemberdayaan pemuda melalui peningkatan kapabilitas kewirausahaan di kalangan pemuda pesisir wilayah Kecamatan Kronjo, diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk penguatan kelembagaan kewirausahaan pemuda, diharapkan adanya jalinan komunikasi yang akrab dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat yang dapat dianggap sebagai motivator dalam proses perubahan perilaku, dan mendorong munculnya motivasi baru yang baik untuk mandiri, kesempatan pengembangan jaringan yang diperlukan untuk perluasan pemasaran, penyerapan teknologi inovasi untuk memperoleh nilai tambah (*value added*), serta kesempatan menangkap peluang yang ada (*job opportunities*) ;
2. Pemerintah juga hendaknya dapat menyesuaikan kembali masa tugas atau lama waktu pendampingan, sehingga keberlanjutan dan keberhasilan program dapat terus dimonitor. Jika memungkinkan dicarikan upaya terobosan untuk pelaksanaan secara berkelanjutan meskipun tahun anggaran sudah berakhir pada tahun pertama atau bersifat *multiyears*. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kesempatan adanya program kemitraan yang lebih luas kepada *stakeholder* lain yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, 2008. Statistik Perikanan Indonesia. BPS Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2009. Kabupaten Tangerang dalam Angka. BPS Kabupaten Tangerang
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2010. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun anggaran 2009 atas Manajemen Penangkapan Ikan*. BPK RI Jakarta
- Bengen, D.G. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat*. Bogor, 21-22 September 2001
- Chambers R. 1985. *Rural Development: Putting the Last First*. Longman. London
- Clark, J. 1996. *Coastal Ecosystems Ecological Considerations for Management of the Coastal Zone*, Department the Conservation Foundation 1717 Masschu setts Avenue, N. W. Washington, D.C.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. California. Sage Publications Inc.
- Coulthard, Max (2007). "The Role of Entrepreneurial Orientation on Firm Performance and Potential Influence of Relational Dynamism", *Working Paper*, Australia, Monash University
- Covin, J.G. & Miles, M.P. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage, *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol.23 Issue 3, p47-63
- Dahuri, Rokhmin, dkk. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin., 1999, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, LiSPI berkerjasama dengan Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP. Jakarta
- Dahuri, Rokhmin. 2001. *Potensi dan permasalahan pembangunan kawasan pesisir Indonesia*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dess, G.G., G.T. Lumpkin and J.G. Covin (1997). "Entrepreneurial Strategy Making and Firm Performance: Tests of Contingency and Configurational Models," *Strategic Management Journal*, 18 (9), 677-695.

- Falbe, C.M. & Larwood, L. (1995). *The Context of Entrepreneurial Vision, Frontiers of Entrepreneurship Research*
- Griffith, David A; Noble, Stephanie M; Chen, Qimei. ,“The Performance Implications Of Entrepreneurial Proclivity : A Dynamic Capabilities Approach”, *Journal Of Retailing* Vol.82, (2006).
- Kao, Raymond W.Y. (1995). *Entrepreneur : A Wealth Creation and Value Adding Process*. Singapore: Prentice Hall.
- Lupiyoadi, Rambat. (2004), *Entrepreneurship: From Mindset To Strategy*, Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maslow, A.H. 1943. *A theory of human motivation*. Psychological Review. Juli 1943. p 370 -396.
- Mintzberg, H. & Waters, J.A. (1985). Of strategies, Deliberate and Emergent, *Strategic Management Journal*, 6, 257-272.
- Moeljarto, 1997. “*Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*”. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Nikijuluw, Victor P.H. 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka. 1995. *The Knowledge-Creating Company : How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford : Oxford University Press
- Peters, T. (1990). Get innovative or get dead, *California Management Review* 33 (1),9-26
- Saragi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa : Alternatif Pemberdayaan Desa – Hans Antlöv (pengantar)*. CV Cipiruy. Jakarta
- Sarasvathy, D.K, Simon, H.S, and Lave, L. 1996. *Perceiving and Managing Business Risks : Differences Between Entrepreneur and Bankers*. *Journal Of Economic Behaviour And Organisation*, 33 : 207 - 225
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Setiana, Lucie. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Soegiarto, A. 1996. *Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir*. Lembaga Oseanografi Nasional. Jakarta
- Sorensen, JC and Mc Creary. 1990. *Coast : Institutional Arrangements for Managing Coastal Resources and Environments*. University of California of Barkeley. USA
- Teece, David, Gary Pisano and Amy Shuen (1997). "Dynamic Capabilities and Strategic Management," *Strategic Management Journal*, 18 (7), 509-533.
- Tohir M. 2002, *Penelitian Sosial Budaya dari Memahami ke Melakukan dan Memuliskan*, UNDP, Semarang.
- Venkatraman, N. (1989). *Strategic Orientation of business enterprises : The construct, dimensionality and measurement*, *Management Science*, 35, 942-962
- Wahyono, A., I.G.P. Antariksa, M. Imron, R. Indrawasih, dan Sudiyono. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Pressindo, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation. Cetakan Pertama. Jakarta

Bahan dari dokumen Lembaga Pemerintah

- Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberdayaan Pemuda. 2009. Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jakarta

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Yuniarti. 2000. *Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap pendidikan Formal di Pantai Pamayang, Kabupaten Tasikmalaya (Skripsi)*. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Fauzi, Nur CF. 2009 *Efektivitas Kerjasama Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan Pihak Ketiga*. Tesis Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta
- Sadri, Arviantoni. 2009. *Model dan Strategi Pemberdayaan Pemuda Jalanan di DKI Jakarta*. Tesis Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta
- Stanis, Stefanus. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
- Suryanita, Andriani. 2006. *Analisis Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Dan Kompetensi Pengetahuan Terhadap Kapabilitas Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Empirik Pada Industri Pakaian Jadi Di Kota Semarang)*. Tesis Magister Manajemen Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang

Dault, Adhyaksa. 2007. *Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*. Disertasi – Institut Pertanian Bogor. Bogor

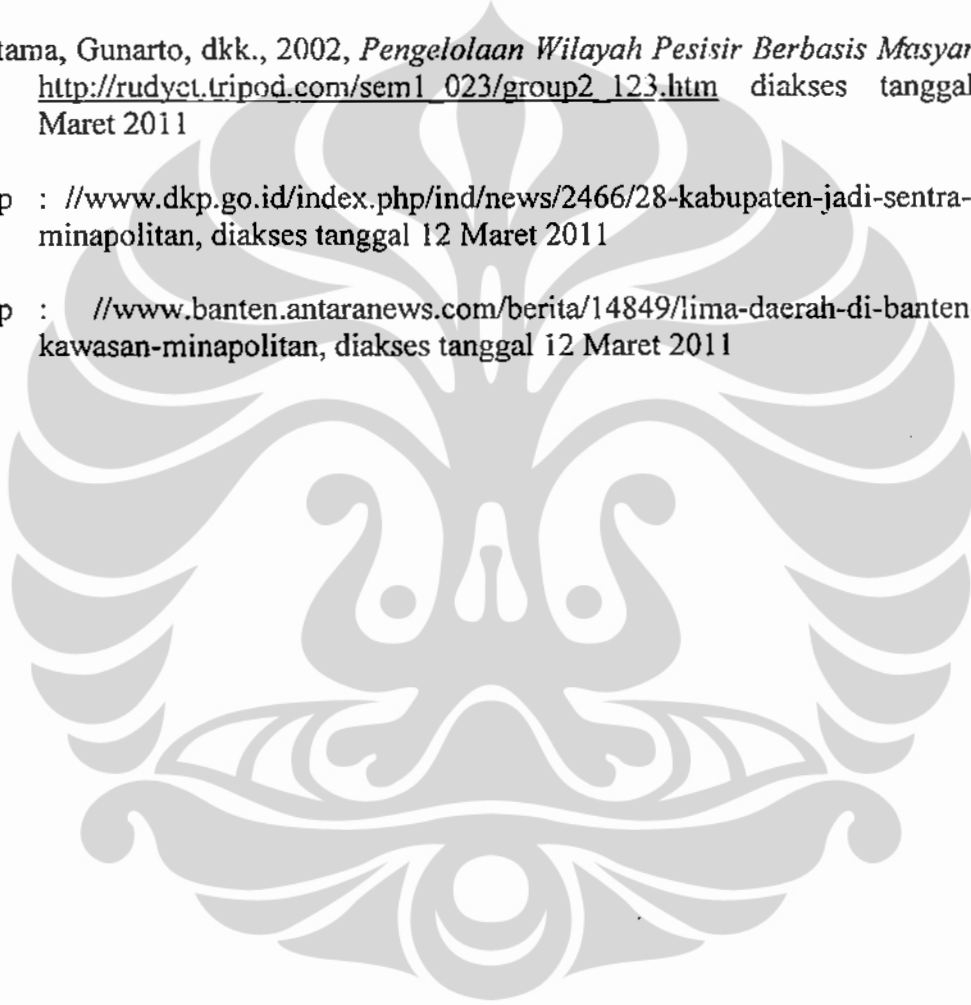
Bahan dari Internet

Dahuri, 2002. *Regenerasi dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*. www.kompas.com. 5 Desember 2005

Latama, Gunarto, dkk., 2002, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*, http://rudycr.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm diakses tanggal 23 Maret 2011

[http : //www.dkp.go.id/index.php/ind/news/2466/28-kabupaten-jadi-sentra-minapolitan](http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/2466/28-kabupaten-jadi-sentra-minapolitan), diakses tanggal 12 Maret 2011

[http : //www.banten.antarane.ws.com/berita/14849/lima-daerah-di-banten-jadi-kawasan-minapolitan](http://www.banten.antarane.ws.com/berita/14849/lima-daerah-di-banten-jadi-kawasan-minapolitan), diakses tanggal 12 Maret 2011



Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kelompok Pemuda Pesisir

1. Apa latar belakang anda terjun ke sektor usaha perikanan dan kelautan?
2. Apakah ada kelompok, individu, lembaga pemerintah/intansi terkait yang membantu anda dalam usaha bidang perikanan dan kelautan ? Jika ada, apa harapan anda dgn program tersebut ? Jika tidak ada, apa harapan anda ?
3. Menurut anda program yang bagaimana yang dapat membantu anda agar kehidupan anda lebih baik ?
4. Apa yang akan anda lakukan jika anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anda ?

B. Kelompok Pengurus Perkumpulan Pemuda Pesisir

1. Apa latar belakang anda aktif di perkumpulan pemuda pesisir ?
2. Aktivitas apa saja yang anda lakukan bersama pemuda pesisir ?
3. Bagaimana caranya anda dapat membentuk perkumpulan pemuda pesisir ?
4. Apa tujuan anda membentuk perkumpulan pemuda pesisir ?
5. Program apa saja yang anda buat untuk memberdayakan pemuda pesisir ?
6. Kesulitan apa yang anda alami untuk melakukan pemberdayaan terhadap pemuda pesisir ?
7. Bagaimana peran pemerintah/ sawasta dalam mengembangkan kelompok yang anda bina?
8. Kemampuan apa saja yang anda miliki untuk melakukan pemberdayaan terhadap pemuda pesisir ?
9. Menurut anda apa potensi yang dimiliki oleh pemuda pesisir yang anda organisir ?

10. Menurut anda apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pemuda pesisir ?
11. Menurut anda bagaimana strategi pemberdayaan pemuda pesisir yang efektif?

C. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di Sektor Pemberdayaan Masyarakat

1. Bagaimana bentuk program pemberdayaan masyarakat pesisir yang pernah dijalankan ?
2. Sampai sejauh mana keterlibatan LSM dalam pemberdayaan masyarakat pesisir ?
3. Adakah LSM yang menjadi panutan masyarakat dalam membantu memecahkan persoalan mereka ?
4. Apakah dalam mensosialisasikan suatu program melibatkan masyarakat pesisir ? Jika ya, sampai sejauh mana pelibatan masyarakat tersebut dan bagaimana respon masyarakat atas keterlibatan mereka ?
5. Apa yang menjadi hambatan bagi LSM dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan bagaimana upaya mengatasinya ?

D. Kelompok Birokrat/Pemerintah

1. Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir ?
2. Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?
3. Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?
4. Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?
5. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?
6. Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?

E. Swasta Sektor Perikanan dan Kelautan

1. Manfaat apa yang perusahaan anda dapatkan bila kemampuan pengelolaan usaha perikanan dan kelautan pemuda pesisir meningkat?
2. Apa saja peran perusahaan anda dalam membina kelompok pemuda pemuda pesisir dalam meningkatkan kapabilitasnya?
3. Adakah program yang spesifik yang perusahaan anda lakukan untuk kearah tersebut?
4. Apa saja yang menjadi hambatan perusahaan anda dalam program tersebut?
5. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan program perusahaan tersebut?
6. Harapan apa yang perusahaan bapa inginkan terhadap pemerintah dan pemuda pesisir untuk menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan bisnis dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat?

Kelompok Pengurus Perkumpulan Pemuda Pesisir

Responden : Efendi Sudarno,A.Md.Pd

Kedudukan : Ketua KPP Surya Bahari Kec Kronjo, Kab Tangerang

1. Apa latar belakang anda aktif di perkumpulan pemuda pesisir ?

Saya berasal dari keluarga nelayan tradisional yang sudah cukup lama terjun di sektor penangkapan ikan dengan menggunakan jaring rampus. Dahulu mempunyai perahu sendiri untuk penangkapan ikan dengan kapasitas 10 GT dan biasa beroperasi setiap hari selama semalam dengan solar 40 liter. Awak perahu maksimal 5 orang dan jarak tempuh perahu maksimal 2 mil dari pantai. Namun sejak banyaknya nelayan dari daerah lain seperti Cirebon, Tegal dan Semarang yang dengan kapal yang lebih besar (rata-rata 25 GT) dan sanggup beroperasi lebih lama serta lebih jauh dari wilayah pantai, nelayan lokal menjadi terpinggirkan.

Untuk menampung pemuda yang banyak menganggur, kami berinisiatif pada tahun 2007 membentuk organisasi atau kelompok pemuda pesisir yang salah satu tujuannya adalah memberdayakan kelompok pemuda lokal supaya lebih mandiri di lingkungannya sendiri serta mampu bersaing dengan nelayan pendatang dari daerah lain. Beberapa pemuda yang bergabung di kelompok ini mempunyai kesibukan sebagai awak kapal penangkap ikan di sore sampai keesokan harinya. Namun pada saat musim paceklik ikan, pemuda ini kita arahkan untuk menggeluti pengolahan ikan dan kerajinan bambu.

2. Aktivitas apa saja yang anda lakukan bersama pemuda pesisir ?

Kelompok Pemuda Pesisir mempunyai beberapa aktivitas di sektor perikanan seperti budidaya ikan bandeng, udang dan rumput laut. Saat ini sedang dirintis usaha budidaya kerang hijau, namun masih belum ada tindak lanjut berupa bimbingan teknis dan pendampingan akses permodalan dari instansi pemerintah Kabupaten Tangerang.

Disamping berusaha melalui sektor perikanan, kami juga mengelola kerajinan pembuatan cendera mata dari bambu. Produk yang dihasilkan

antara lain miniatur kapal Phinisi, miniatur beberapa rumah adat Indonesia dan miniatur alat transportasi rakyat. Karena kami tinggal di dekat lokasi wisata Pulau Cangkir yang merupakan salah satu lokasi wisata ziarah yang ramai saat bulan puasa sampai akhir bulan Syawal, maka kami juga mempunyai beberapa aktivitas yang intinya bertujuan membuat wisatawan nyaman dan aman berkunjung. Seperti menyediakan lahan parkir, toilet umum dan lapak pedagang kaki lima. Memang kami memungut uang seperti restribusi di jalanan saat mereka menuju lokasi wisata. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi wisatawan terhadap gangguan warga yang sekiranya menghalangi perjalanannya. Kami mengakui bahwa ini tidak baik, namun pelan-pelan kami akan tinggalkan pungutan di jalanan. Sekiranya Pemerintah Kecamatan mengizinkan kami nuntut membuat lokasi berjualan permanen di dekat lokasi wisata, kami akan menggarapnya dengan serius. Salah satu yang sudah diajukan proposal ke Kecamatan adalah stan untuk penjualan souvenir dari bambu dan produk olahan ikan asin.

3. Bagaimana caranya anda dapat membentuk perkumpulan pemuda pesisir ?

Dari beberapa tokoh pemuda lokal yang mempunyai harapan sama supaya dapat mandiri di lingkungan Kec Kronjo, kami berkumpul dan saling bertukar ide. Upaya ini ditindaklanjuti dengan pendekatan kepada kepala desa Kronjo serta Sekretaris Kecamatan Kronjo. Mereka mendukung pemuda untuk berorganisasi daripada sekedar kumpul-kumpul dengan kegiatan yang tidak jelas. Pemerintah Kecamatan akan membantu untuk proses pengurusan administrasi legalitas organisasi. Sementara dana dihimpun dari iuran pemuda dan sumbangan tokoh setempat yang sekiranya mempunyai respek terhadap perkumpulan pemuda.

Namun sampai saat ini organisasi pemuda pesisir ini masih belum diakui secara resmi sebagai salah satu organisasi pemuda di wilayah Kec Kronjo karena akta notaris memang belum terbit. Padahal minat pemuda untuk menjadi anggota sangat besar karena mereka melihat KNPI yang sekarang

ada di Kecamatan kurang maksimal serta seringkali dicampuri kepentingan politik saat kampanye menjelang pemilu/pemilukada.

4. Apa tujuan anda membentuk perkumpulan pemuda pesisir ?

Tujuan awal adalah menampung pemuda pengangguran dan putus sekolah dari keluarga nelayan agar mempunyai kegiatan yang positif dan sebagai tempat menyalurkan unek-unek maupun sebagai tempat berkumpul membahas peluang bekerja. Dalam perkembangan selanjutnya, kami berusaha menanamkan jiwa berwirausaha di lingkungan pemuda pesisir dengan menggarap sektor perikanan dan kerajinan. Untuk itu diperlukan pelatihan peningkatan ketrampilan. Pembekalan ketrampilan dilaksanakan bekerja sama dengan PKBM Nurul Ilmi, maupun Balai Penyuluhan Perikanan Kecamatan Kronjo.

5. Program apa saja yang anda buat untuk memberdayakan pemuda pesisir ?

Kami berusaha menarik minat pemuda nelayan untuk ikut menggeluti pengolahan ikan jambal sebagai pekerjaan sampingan disaat tidak pergi melaut. Sementara itu, untuk remaja putri, kami arahkan untuk ikut belajar mengolah ikan melalui pelatihan langsung ke beberapa pengusaha fillet ikan di Kecamatan Kronjo. Sementara bagi mereka yang menyukai kegiatan budidaya, kami sarankan untuk ikut magang dulu di pengusaha bandeng dan udang yang ada, sebelum mereka berusaha untuk mandiri.

Untuk mereka yang suka dengan kegiatan memancing ikan di laut, kami sedang berusaha membuat bagan pemancingan dengan seijin dan sepengetahuan Pemerintah Kecamatan, yang direncanakan akan ditempatkan di dekat Pulau Cangkir. Bagan pemancingan ini nantinya juga dapat disewakan kepada wisatawan pengunjung Pulau Cangkir.

Untuk pemuda yang mempunyai bakat seni, kami arahkan mereka ke pembuatan kerajinan dari bambu yang dapat dijadikan souvenir saat ada kunjungan wisatawan.

Kami juga sedang mengajukan proposal kepada pemerintah Kecamatan untuk pembuatan rumpon buatan yang ditaruh di kedalaman 7 – 15 meter sebagai rumah ikan dengan tujuan sebagai lokasi memancing di laut disaat musim ikan sepi (Ini merupakan bagian dari agenda pelestarian wilayah pantai kami yang telah diketahui oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, yaitu meliputi budidaya kerang hijau, rumput laut, penanaman rumpon dasar dan pemeliharaan terumbu karang)

Secara umum saya mempunyai 5 program untuk KPP Surya Bahari ini yaitu bidang budidaya ikan bandeng/udang/rumput laut, bidang penangkapan ikan dengan perahu sendiri, bidang pengolahan kerajinan (kerajinan bambu untuk souvenir dan pengolahan produk perikanan seperti jambal roti dan fillet ikan), bidang usaha perbengkelan (mesin kapal) dan bidang pembinaan fisik pemuda melalui olahraga pantai yaitu klub bola sundul dan klub bola volley pantai.

6. Kesulitan apa yang anda alami untuk melakukan pemberdayaan terhadap pemuda pesisir ?

Karena sumber daya manusianya berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga anggota pemuda KPP memerlukan waktu agak lama untuk menyerap materi pelatihan ketrampilan yang diberikan oleh pengajar di PKBM Nurul Ilmi maupun penyuluh dari Dinas. Seringkali pelatihan ketrampilan juga menghadirkan praktisi budidaya sehingga lebih mudah menyampaikan materi didukung pengalaman yang sudah ada.

Jujur kami akui bahwa motivasi berwirausaha di kalangan pemuda Kronjo masih rendah, padahal pilihan hidup yang dihadapi juga terbatas. Mereka untuk bekerja di sektor industri garment dapat dipastikan menempati posisi buruh lapangan dengan sistem kontrak jangka pendek dan kebanyakan memilih tenaga kerja wanita. Sementara untuk bekerja di PLTU Lontar kemungkinan hanya sebagai tenaga keamanan maupun pelayan kantor, sopir, penjaga gudang. Bukan menempati posisi pekerjaan dengan keahlian khusus.

Hasil nyata KPP sampai saat ini memang masih belum dapat dikatakan kontinyu sehingga masih dianggap belum mampu berdiri secara mandiri karena sebagian besar kegiatannya didukung dengan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Produksi perikanan dari sektor budidaya bandeng belum digeluti serius, sementara produksi pengolahan jambal roti relatif lebih baik dan sudah diakui kualitasnya oleh pedagang pengepul di Jakarta.

7. Bagaimana peran pemerintah/swasta dalam mengembangkan kelompok yang anda bina?

Meskipun belum merupakan suatu organisasi pemuda yang definitif karena legalitas hukum belum terbit, tetapi pembinaan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang terus dilaksanakan sampai saat ini. Mereka lebih berperan sebagai pemberi materi teknis budidaya maupun akses permodalan dan pembinaan PERBOSI (Persatuan Olah Raga Bola Sundul Indonesia). Melalui Disporabudpar diharapkan nantinya dapat memperoleh dana bantuan "*block grant*" untuk pengembangan organisasi kepemudaan.

Sementara kalangan swasta yang bergerak di sektor perikanan di lingkungan Kecamatan Kronjo juga menjanjikan akan memberikan bantuan pelatihan maupun pinjaman modal usaha jika KPP mampu berperan sebagai supliyer penyedia bahan mentah fillet ikan.

8. Kemampuan apa saja yang anda miliki untuk melakukan pemberdayaan terhadap pemuda pesisir ?

Saya mempunyai sertifikat pemuda pelopor tingkat Propinsi yang dapat digunakan untuk memberikan pembekalan ketrampilan dan berhak menjadi narasumber dalam kegiatan pemberdayaan pemuda di lingkungan Kabupaten Tangerang. Didukung pengalaman sebagai nelayan dari tahun 1996 – 2002, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mereka yang ingin berwirausaha di sektor penangkapan ikan.

Saya mengakui bahwa sampai saat ini masih belum dapat memberikan contoh keberhasilan yang nyata jika dinilai dari materi yang ada. Namun

setidaknya jalinan komunikasi yang intensif dan akses yang mudah saat ini dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat terwujud.

Saya optimis bahwa untuk pemberdayaan pemuda di Kecamatan Kronjo dapat berjalan dengan baik, asal ada bantuan dan kemauan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

9. Menurut anda apa potensi yang dimiliki oleh pemuda pesisir yang anda organisir ?

Jumlah pemuda yang tidak bekerja di sektor formal di lingkungan Kecamatan Kronjo sangat banyak, jika tidak diakomodir kekuatan fisik dan mentalnya, akan menimbulkan kerawanan sosial karena adanya pengangguran. Mereka sebenarnya suka pergi ke laut mencari ikan dengan memancing atau ikut bekerja sebagai awak perahu dari nelayan luar daerah yang mendaratkan ikannya di TPI Kronjo. Dari kegemaran melaut itu, kami berusaha untuk menanamkan motivasi wirausaha di sektor perikanan. Untuk mereka yang suka ke laut tapi cenderung untuk mencari kesenangan, akan kita ajak untuk mengenalkan wisata bahari berupa pemancingan di tengah laut dengan dukungan kapal kecil 10 - 20 GT dengan bantuan dana dari DPRD Kabupaten Tangerang sebesar 25 juta rupiah.

Sementara yang suka kelaut untuk menangkap ikan dan dianggap sebagai pekerjaan utama, akan kita usahakan memperoleh bantuan berupa perahu rampus 10 GT dengan 5 orang awak yang lebih cocok untuk kondisi pemuda di Kronjo.

Untuk mereka yang suka kegiatan budidaya ikan, akan kita dorong ke usaha budidaya bandeng dan udang yang intensif, dengan bantuan akses pemasaran dari HNSI Kabupaten Tangerang.

10. Menurut anda apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pemuda pesisir ?

Semangat tinggi, tidak mudah menyerah dan mempunyai toleransi tinggi. Mempunyai keinginan untuk maju dan dapat mandiri tanpa bantuan dana terus menerus dari pemerintah. Mereka sadar bahwa nasib tidak akan berubah jika tidak mereka sendiri yang mengubahnya.

Sementara kekurangannya adalah sulit untuk membangkitkan motivasi berwirausaha di tengah lingkungan industri. Karena mereka berpikir perikanan tidak memberikan pendapatan tetap dan pasti setiap bulan. Untuk tertarik berwirausaha, mereka perlu contoh nyata dari pemuda biasa yang berhasil dalam usahanya, bukan dari mereka yang memang dibesarkan dari lingkungan wirausaha yang sudah mapan atau warisan orang tuanya.

11. Menurut anda bagaimana strategi pemberdayaan pemuda pesisir yang efektif?

Membentuk kelembagaan pemuda pesisir yang definitif, memenuhi aspek legalitas dan mempunyai akses ke birokrasi Pemerintah Kabupaten, Propinsi ataupun ke Kementerian Pusat.

KPP berusaha untuk memunculkan tokoh pemuda yang berhasil usahanya setelah mendapat pembekalan teknis selama bergabung di organisasi. Sementara saat ini tokoh pemuda wirausahawan yang berhasil muncul dari lingkungan keluarga yang sudah merintis wirausaha sejak dahulu. Untuk pemuda biasa yang merintis dari nol memang belum ada.



Kelompok Pemuda Pesisir

Responden : Endang Sutrisna (Ketua Seksi Usaha Kerajinan Bambu)

Kedudukan : Anggota KPP Surya Bahari Kec Kronjo, Kab Tangerang

1. Apa latar belakang anda terjun ke sektor usaha perikanan dan kelautan?

Saya tidak terjun lagi di sektor perikanan secara langsung tapi sekarang menggeluti usaha kerajinan bambu. Dahulu di pelelangan ikan tapi bangkrut tahun 1995, akhirnya memutuskan untuk mencoba membuat kerajinan dari bambu. Semula dari limbah triplek dan bambu yang ada di sekitar rumah. Model pertama yang diciptakan antara lain becak dan motor. Sekarang kebanyakan model perahu dan rumah-rumah adat Indonesia.

Banyaknya pemuda nelayan yang menggangu saat tidak musim ikan atau tidak melaut karena cuaca buruk. Saya mengenalkan kerajinan ini untuk mendapatkan pendapatan tambahan di luar pekerjaan utama sebagai nelayan.

2. Apakah ada kelompok, individu, lembaga pemerintah/instansi terkait yang membantu anda dalam usaha anda saat ini? Jika ada, apa harapan anda dgn program tersebut? Jika tidak ada, apa harapan anda?

Belum ada pembinaan secara langsung dari instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten. Namun selama ini jika ada pameran kerajinan atau industri rumah tangga, kami selalu diberikan kesempatan untuk mempromosikan hasil karya. Kami tidak bekerja sama dengan mal atau toko karena uang lama berputarnya, sementara kami dengan modal kecil yang mesti harus segera kembali.

Kami ingin instansi terkait dapat membimbing dalam hal penjaminan mutu hasil produksi, kemudahan mengakses pinjaman modal ke Bank, informasi pemasaran yang rutin, dan jika perlu hasil produksi ini didaftarkan hak patennya untuk menghindari kesamaan produksi atau merk dagang dari daerah lain atau produsen lain.

Pemerintah Kecamatan juga sangat diharapkan dapat memberikan ijin pendirian lapak atau stan penjualan souvenir di dekat tempat wisata Pulau Cangkir. Selama ini permohonan sudah dibuat namun belum ada jawaban dari Pemerintah Kecamatan.

3. Menurut anda program yang bagaimana yang dapat membantu anda agar kehidupan anda lebih baik ?

Pelatihan peningkatan ketrampilan, pendampingan akses permodalan dan bantuan akses pemasaran dari instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang, seperti dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Tangerang. Kami juga ingin Pemerintah melindungi hasil kerajinan ini terhadap ancaman produk impor dari luar seperti China karena harga jual produk kerajinan bambu ini relatif lebih tinggi daripada produk impor tersebut.

Jika pemasaran lancar dan kontinyu, kami pernah mengalami omzet produksi sebesar 3-5 juta per bulan pada tahun 2008. Namun saat ini omzet rata-rata hanya 2 juta per bulan karena sepiunya pemasaran.

4. Apa yang akan anda lakukan jika anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anda ?

Akan membentuk organisasi sendiri dengan nama "Karya Bangsa" yang khusus bergerak di pembuatan kerajinan bambu. Saya ingin membuat semacam sanggar seni atau bengkel yang mudah diakses pemuda di Kec Kronjo. Tujuan pendirian sanggar tersebut adalah menarik minat pemuda yang suka seni supaya dapat menuangkan kreativitasnya ke dalam bentuk kerajinan bambu.

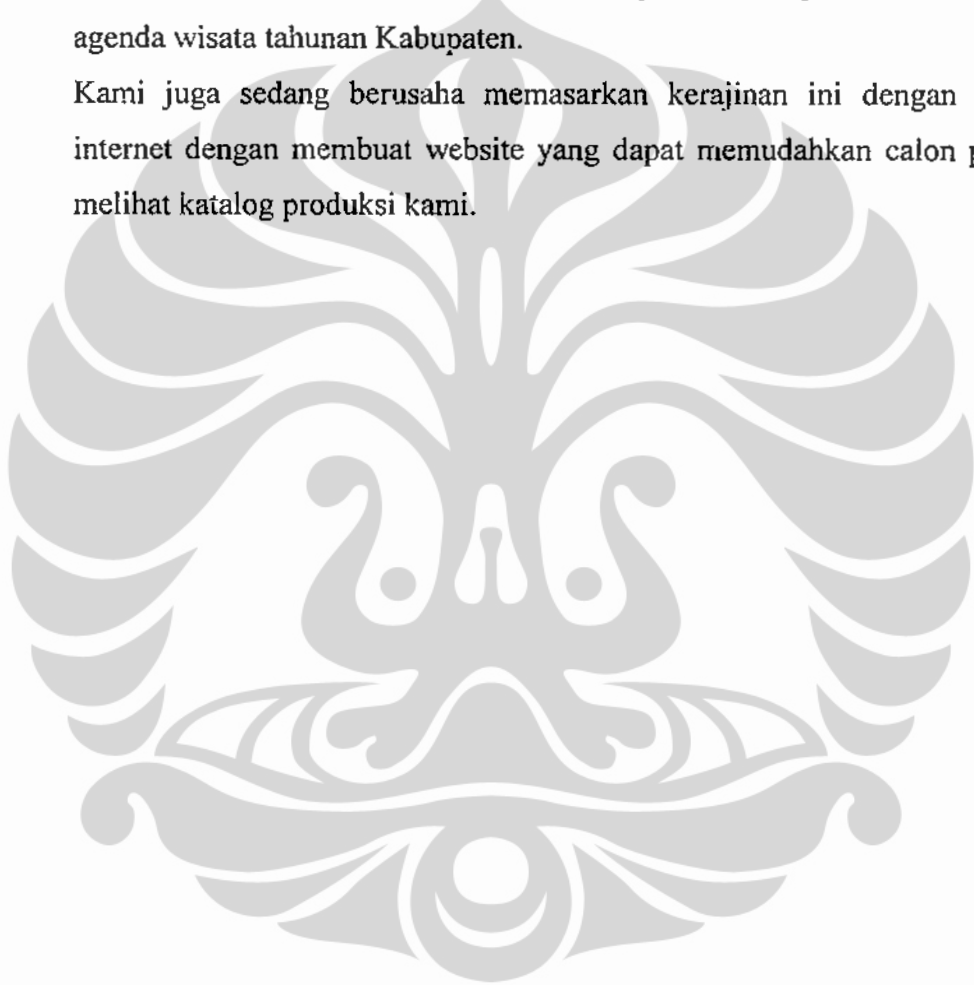
Saya juga ingin dibukakan akses ke Disporabudpar Kab Tangerang untuk pembinaan melalui bentuk KUPP (Kelompok Usaha Produktif Pemuda).

Sangat diperlukan Bapak angkat untuk menampung produksi supaya pemasaran dapat berjalan lancar dan rutin. Kami sangat senang apabila ada

pihak swasta atau BUMN yang dapat memberikan pelatihan peningkatan ketrampilan sampai dengan pemasaran.

Kami juga ingin pemerintah kabupaten membantu membentuk citra bahwa *"Jika berkunjung wisata ke Kabupaten Tangerang, jangan lupa oleh-oleh berupa souvenir kerajinan bambu"* . Hal tersebut dapat terwujud jika ada kemauan dari Pemerintah memasukkan produk kerajinan ini ke dalam agenda wisata tahunan Kabupaten.

Kami juga sedang berusaha memasarkan kerajinan ini dengan melalui internet dengan membuat website yang dapat memudahkan calon pembeli melihat katalog produksi kami.



Kelompok Pemuda Pesisir

Responden : Nur Subchan

Kedudukan : Anggota KPP Surya Bahari Kec Kronjo, Kab Tangerang

1. Apa latar belakang anda terjun ke sektor usaha perikanan dan kelautan?

Saya alumni Akademi Pariwisata di kabupaten Jember Jawa Timur. Pernah bekerja di tambak Bandeng dan Udang di Kabupaten Serang dan Kabupaten Cirebon dari tahun 1996 – 2006. Namun saat ini tidak lagi terjun dalam bisnis perikanan praktis, tetapi mengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) “Nurul Ilmi” yang salah satu programnya adalah Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) dan Pelatihan. Hal itu didorong oleh banyaknya pengangguran di kalangan pemuda setelah tidak mampu melanjutkan sekolah dan tingginya minat bekerja sebagai buruh di industri garment di kalangan remaja putri di lingkungan Kecamatan Kronjo. Di lain pihak, merasa enggan untuk menggeluti usaha perikanan seperti kebanyakan orang tua mereka yang bekerja sebagai nelayan tradisional. Mereka beranggapan bahwa usaha menangkap ikan bukan merupakan pekerjaan utama yang dapat menghasilkan banyak uang secara rutin setiap bulan.

Melalui program KWD tersebut, PKBM berusaha untuk membangkitkan motivasi berwirausaha di kalangan masyarakat pesisir Kec Kronjo terutama para pemudanya. Tenaga pengajar berasal dari tokoh masyarakat setempat yang dianggap berhasil dalam berwirausaha apapun bentuknya. Selama ini yang telah dilakukan sejak 2006 adalah pelatihan kewirausahaan di sektor kerajinan bambu dan perikanan. Kewirausahaan di sektor perikanan meliputi budidaya ikan bandeng di tambak, budidaya kerang, budidaya rumput laut dan pengolahan ikan seperti pembuatan ikan jambal roti dari ikan manyung dan pemfiletan ikan.

Secara umum PKBM Nurul Ilmi didirikan untuk membantu UPT Dinas Pendidikan Kec Kronjo dalam mengatasi buta huruf, buta bahasa dan buta berhitung di kalangan masyarakat nelayan, serta menyediakan jalur

pendidikan non formal bagi kelanjutan studi dari anak-anak nelayan yang tidak mampu. Seperti program paket A, B, dan C.

2. **Apakah ada kelompok, individu, lembaga pemerintah/instansi terkait yang membantu anda dalam usaha bidang perikanan dan kelautan ? Jika ada, apa harapan anda dgn program tersebut? Jika tidak ada, apa harapan anda ?**

Selama ini untuk operasional PKBM, selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan rutin. Jika ada program yang dapat dilaksanakan oleh PKBM selalu diajak koordinasi oleh Dinas. Lomba-lomba yang diselenggarakan untuk kegiatan pendidikan non formal, PKBM selalu diajak turut serta.

Sementara untuk meningkatkan ketrampilan peserta PKBM, sampai saat ini belum ada kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Ke depan sedang dirintis upaya pendampingan tenaga ahli atau penyuluh atau staf teknis dari beberapa instansi yang lain seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Harapannya adalah supaya lulusan PKBM bukan hanya mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan saja, namun juga dapat berusaha mandiri dengan menerapkan keahliannya.

Bantuan pemasaran hasil kerajinan bambu sedang diusahakan kerjasama dengan Dinas Perdagangan melalui keikutsertaan dalam setiap pameran di tingkat kabupaten atau propinsi. Sementara itu bantuan akses permodalan diharapkan datang dari pendampingan oleh Dinas Koperasi dan UKM melalui Kredit Usaha Mikro dan Menengah maupun Kredit Usaha Rakyat.

Selama ini peranan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang masih dirasakan belum maksimal. PKBM menginginkan peningkatan kerjasama melalui pendampingan oleh penyuluh profesional secara intensif terhadap usaha pembuatan ikan jambal roti, dari mulai penanganan bahan mentah sampai dengan pengemasan produk yang higienis dan menarik.

Sampai saat ini akses pemasaran hasil kerajinan dan pengolahan produk perikanan dibantu oleh HNSI Kabupaten Tangerang dan anggota Kelompok

Pemuda Pesisir “Surya Bahari” melalui informasi dari mulut ke mulut. Dari beberapa sampel produk yang telah diberikan kepada beberapa pejabat terkait di lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Koperasi dan UKM, pesanan selanjutnya biasanya datang. Kebanyakan mereka pesan sebagai buah tangan bagi tamu dinas.

3. Menurut anda program yang bagaimana yang dapat membantu anda agar kehidupan anda lebih baik ?

Sebenarnya banyak program untuk pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten, namun akses informasi sangat terbatas. Seringkali yang mendapat akses kerjasama dengan dinas terkait hanya mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan pegawai dinas tersebut. Seharusnya jika ada program kerjasama untuk pemberdayaan, akses informasi dibuka seluas mungkin kepada masyarakat. Pihak dinas harus sudah mempunyai data tentang organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat lengkap dengan spesifikasi keahliannya, sehingga mudah nantinya jika ada pelaksanaan program kerjasama.

PKBM menginginkan adanya suatu program pendampingan untuk akses bantuan permodalan, produksi dan pemasaran dari beberapa instansi pemerintah Kabupaten Tangerang atau lembaga yang kompeten dengan difasilitasi oleh Dinas atau minimal pejabat lingkup Kecamatan Kronjo.

4. Apa yang akan anda lakukan jika anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anda ?

Membangun kerjasama dengan PLTU Banten III (PLTU Lontar) untuk memanfaatkan program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) melalui koperasi mereka. Proposal yang diajukan sebesar Rp 200.000.000,00 akan digunakan untuk pembangunan gedung baru PKBM Nurul Ilmi supaya tidak menumpang lagi di SDN Pagedangan Ilir 1 dan 2. Namun sampai saat ini belum diketahui apakah proposal dapat diterima atau tidak.

PKBM pernah mengirimkan beberapa pesertanya untuk mengikuti pelatihan ketrampilan gratis dari Dinas Pendidikan seperti pelatihan menjahit yang diselenggarakan bekerja sama dengan salah satu industri garment di Kabupaten Tangerang.

Selama ini bantuan operasional dari Dinas Pendidikan hanya berupa biaya untuk ATK, honorarium pengajar dan pembelian buku modul. Untuk biaya pelatihan belum ada secara rutin.

Pada masa mendatang jika sumber daya PKBM sudah memadai, ingin merekrut orang-orang yang mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk mendukung pelaksanaan program PKBM. Seperti ahli budidaya perikanan, dan ahli pengolahan ikan. Orang-orang tersebut harus merasa ikut bertanggung jawab memberdayakan masyarakat. Kemampuan mereka akan difasilitasi oleh secara mandiri oleh PKBM. Diharapkan kemampuan dan ketrampilan orang-orang tersebut dapat langsung dicontoh dan diterapkan langsung oleh masyarakat Kecamatan Kronjo pada umumnya dan para pemuda pada khususnya.

Kelompok Birokrat/Pemerintah

Responden : Syaiful Adamsyah

**Kedudukan : Kepala Balai Penyuluhan Perikanan Kec. Kronjo
UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Tangerang**

1. Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?

Sepanjang mereka melakukan kegiatan yang positif dan perkumpulan atau kelompok tersebut memang dibentuk atas inisiatif sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya yaitu para pemuda pesisir, kami sebagai kepanjangan tangan atau UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang akan mendukung sepenuhnya.

Perlu diketahui bahwa untuk pemuda di Kecamatan Kronjo meskipun dikenal diluar sebagai tukang ikan karena dianggap mempunyai empang dan tambak yang luas atau kapal ikan, namun sebenarnya jika digali secara mendalam akan ditemukan kondisi sesungguhnya yaitu minat pemuda yang kurang untuk berusaha di sektor perikanan dan kelautan.

Mereka beranggapan bahwa melakukan usaha di sektor perikanan akan memerlukan modal yang tidak sedikit, banyak hambatan dari cuaca, penyakit dan teknis yang lain, serta harus tahu pasar karena menjual produk yang cepat busuk.

Mereka juga menilai bahwa perikanan belum mampu memberikan hasil yang tetap setiap bulannya, melihat dari pengalaman orang tua mereka saat ini. Lain halnya jika mereka bekerja di pabrik, disamping memperoleh gaji bulanan yang pasti, juga setidaknya status sosial meningkat karena mempunyai sebutan sebagai karyawan.

Kami berharap perkumpulan pemuda pesisir ini mampu bekerja sama dengan aparat terkait di wilayah Kecamatan Kronjo dalam upaya mengatasi pola pikir tidak mau berusaha keras dalam menjalankan aktivitas usaha di sektor perikanan. Kami siap memberikan bimbingan teknis perikanan yang mereka perlukan, baik sektor budidaya, penangkapan ataupun pengolahan ikan.

2. Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?

Saat ini kami sebagai UPTD memang belum mempunyai program yang spesifik untuk memberdayakan pemuda pesisir secara khusus, karena tidak mempunyai anggaran otonomi atau hanya menjalankan kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang. Namun demikian kami seringkali melakukan pembinaan yang rutin setiap bulannya kepada kelompok nelayan dengan bidang usaha budidaya, penangkapan ataupun pengolahan ikan. Kelompok nelayan ini anggotanya bervariasi dari yang berumur dibawah 20 tahun sampai dengan diatas 60 tahun. Jumlah anggota setiap kelompok juga bervariasi antara 10 sampai dengan 25 orang.

Mereka mempunyai pekerjaan utama sebagai penangkap ikan pada kapal ikan yang rata-rata berasal dari luar Kronjo. Pada saat tidak melaut karena cuaca buruk, mereka bekerja di tambak bandeng atau rumput laut, serta membantu istri mereka yang ikut usaha pengolahan ikan berupa fillet, sosis, ataupun nugget.

Dengan adanya perkumpulan pemuda pesisir, kami mempunyai wacana untuk membimbing mereka dalam usaha memanfaatkan limbah dari pengolahan ikan untuk dibuat kecap ikan, silase ataupun tepung ikan sebagai bahan baku pakan ternak.

Kami juga berusaha untuk mendorong mereka supaya ikut berkontribusi secara positif terhadap kegiatan wisata ziarah di Pulau Cangkir. Usaha seperti pemancingan dan rumah makan apung dapat menjadi alternatif usaha yang layak. Daripada menjadi pemalak di jalanan, mereka lebih baik berupaya bagaimana membuat kerajinan dari kulit kerang ataupun sisa hasil perikanan yang lain dan dijual di dekat Pulau Cangkir saat kegiatan wisata berlangsung. Sekarang wisata ramai terus setiap hari libur dan akhir pekan. Peluang mendapat pemasukan yang halal sangat terbuka.

3. Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?

Sampai sejauh ini kami dalam batas-batas hanya mengarahkan dan memberikan bimbingan terhadap teknis perikanan, sementara untuk hal lain

diluar sektor perikanan, kami tidak mempunyai kewenangan. Kami juga hanya melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang karena kami belum mempunyai program sendiri secara mandiri sampai tahun anggaran 2011.

Dari hasil bimbingan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan selama ini, terlihat adanya peningkatan minat yang baik dari para istri nelayan untuk ikut dalam usaha pengolahan ikan seperti bakso ikan, nugget dan sosis. Sementara untuk fillet ikan memang masih banyak didominasi oleh tenaga kerja dari luar Kecamatan Kronjo seperti dari Brebes, Tegal, Kerawang dan Cirebon. Terhadap kaum nelayan muda, kami lebih menekankan kepada pentingnya menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan yaitu yang tidak berpotensi merusak terumbu karang dan menangkap ikan yang masih kecil. Dalam setiap pertemuan dengan kelompok, kami selalu mengajak untuk ikut menjaga wilayah pesisir pantai dari abrasi yang semakin tinggi seperti dengan menanam mangrove. BPP Kronjo akan berkoordinasi dengan instansi lain dalam upaya pelestarian wilayah pesisir melalui penanaman mangrove ini. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan dari kalangan kaum muda nelayan.

4. Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Kami mengakui bahwa komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat masih belum dapat dijalin dengan intensif secara periodik. Meskipun kami sudah menjadwalkan 1 bulan sekali namun belum tentu dapat dijalankan, mengingat keterbatasan waktu mereka. Mereka ada yang mendi pedagang, nelayan ataupun petambak. Namun kami mencoba untuk berkomunikasi saat ada acara yang digelar oleh Pemerintah Kecamatan, seperti peringatan – peringatan ataupun saat ada tamu dinas yang berkunjung ke Kronjo.

Dalam pandangan kami, tokoh masyarakat ini mempunyai peranan yang cukup berarti untuk dapat memberikan pembelajaran terhadap kaum muda di wilayah pesisir Kecamatan Kronjo, utamanya nelayan muda. Karena masyarakat disini dalam budaya sehari-hari sangat menghormati para kaum tua atau mereka yang dituakan dan dianggap tokoh setempat. Hal itu

terlihat dari wisata ziarah di Pulau Cangkir, yang merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada kaum ulama setempat yang dianggap berjasa dalam mendirikan Kronjo dan menyiarkan agama Islam disini.

Kami juga masih belum bisa optimal dalam melangkah karena masih belum mempunyai program sendiri dan anggaran otonomi sendiri. Sehingga dalam memberikan materi pelatihan maupun penyuluhan juga masih terbatas. Kami terus berusaha supaya BPP Kronjo dapat memperoleh anggaran sendiri melalui APBD Kabupaten Tangerang ataupun APBD Propinsi Banten sesuai peraturan yang berlaku.

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Program pemberdayaan akan selalu melibatkan sektor lain yang mempunyai kewenangan di wilayah pesisir. Sampai saat ini kami masih mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum untuk program pencegahan abrasi dan penyediaan saluran air limbah di TPI maupun di tempat pendapatan ikan. Sementara untuk turut bermain dalam pengelolaan wisata ziarah di Pulau Kronjo, kami juga mengalami kendala dengan program yang digulirkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Kadang mereka menyelenggarakan kegiatan yang tidak cocok waktunya dengan jadwal aktivitas masyarakat sekitar yang sebagian besar bekerja di sektor perikanan.

Koordinasi yang masih lemah dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan upaya untuk meluaskan pemasaran hasil produksi perikanan baik yang segar maupun olahan. Ataupun hasil kerajinan masyarakat yang dibuat dari limbah perikanan. Harapan kami, instansi-instansi tersebut dapat secara rutin memberikan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat disini sesuai dengan materi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Kecamatan pernah kami ajak untuk ikut memikirkan bagaimana membuatkan semacam tempat berjualan permanen hasil kerajinan perikanan masyarakat di dekat Pulau Kronjo, namun beralasan bahwa penggunaan lahan menjadi kewenangan

dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan karena Pulau Kronjo merupakan wilayah konservasi.

Namun, kami perlu bangga terhadap minat dari Pemerintah Pusat untuk menjadikan Kronjo sebagai tempat bagi proyek percontohan Minapolitan di tahun 2012 mendatang. Pemerintah tentu melihat besarnya potensi tambak dan banyaknya nelayan yang meramaikan TPI atau Pelabuhan Perikanan Pantai di Kronjo.

Terhadap pemberdayaan pemuda, ke depan kami akan terus berupaya untuk mengatasi pola pikir pragmatis terhadap keinginan pemuda untuk langsung berhasil dalam perikanan. Jika pola pikir pragmatis ini terus berkembang, kami yakin keberlanjutan program pemberdayaan akan sulit dilaksanakan. Mereka lebih melihat hasilnya daripada menekuni proses untuk berhasil.

6. Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?

Menurut kami, apa yang dilakukan oleh pemuda pesisir di Kronjo dapat menjadi langkah yang baik. Karena pemberdayaan akan berjalan lebih jelas dan terarah jika obyeknya merupakan suatu komunitas yang dibentuk berdasarkan potensi wilayah dan merasakan satu nasib yang sama serta ingin maju atau mandiri. Kami menyarankan sebaiknya kelembagaan pemuda tersebut dapat berupa karang taruna untuk tingkat desa dan kelompok pembudidaya/pengolah dan memperoleh legalitas dari pemerintah kelurahan dan kecamatan. Melalui kelembagaan semacam itu pula, akan memudahkan kami dalam memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan tentang pengolahan ikan, teknis budidaya, penangkapan ikan sampai dengan bantuan akses pemasaran.

Kami berencana untuk mengadakan studi banding tentang pengolahan ikan dan manajemen kelompok industri skala rumah tangga ke TPI Blanakan di Subang pada suatu saat nanti. Studi banding tersebut dilakukan semata-mata untuk memperluas wawasan pemuda terhadap usaha perikanan.

Kelompok Birokrat/Pemerintah

Responden : Drs. H. Teteng Jumara, MM

Kedudukan : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Tangerang

1. Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?

Jika memang organisasi tersebut layak operasional dan keberdaannya sangat membantu kegiatan masyarakat, kami sebagai bagian birokrasi dengan unsur pembinaan sangat mendukung. Kami mempunyai beberapa kegiatan yang didalamnya dapat diikuti oleh unsur pemuda pesisir, seperti Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS), PIRT (Pengolahan Ikan oleh Ibu Rumah Tangga), dan Kelompok Pemuda Peduli Pantai yang dikaitkan dengan konsep Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Setiap tahunnya untuk pembinaan kelompok pemuda pesisir selalu menyesuaikan dengan anggaran yang ada, dan perlu diingat bahwa kami hanya bertugas untuk memberikan bimbingan, pendampingan dan pembinaan, bukan sebagai lembaga yang memberikan bantuan permodalan baik barang maupun uang tunai.

Hal tersebut yang sampai sekarang masih disalahartikan oleh pemuda, bahwa setiap program pemberdayaan yang diakomodir oleh Diskanlut pasti ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan modal.

Kebijakan kami terhadap organisasi pemuda jika memang organisasi tersebut sangat membantu masyarakat biasanya adalah melakukan pembinaan terus menerus sampai organisasi tersebut benar-benar matang dan dapat berdiri sendiri dengan kegiatannya serta programnya berlangsung terus pada tahun berikutnya. Di awal pendirian organisasi tidak perlu buru-buru harus segera diaktakan karena biasanya konsolidasi dan ikatan didalamnya masih belum kuat.

2. Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?

Bekerja sama dengan beberapa instansi terkait di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang, kami akan mengelola wisata mangrove untuk kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di sepanjang pesisir Kecamatan

Kronjo dan sepanjang jalur ke arah Pulau Cangkir. Namun hal tersebut sangat tergantung peraturan daerah tentang Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Jangka Menengah. Kami berencana meniru konsep pengembangan mangrove center di Bali. Dimana mulai dari anak-anak sekolah dasar di Kecamatan Kronjo dilibatkan menanam bibit mangrove lokal dalam polybag dan setelah tumbuh sebagai calon pohon, libatkan masyarakat pesisir untuk menanam supaya ada rasa ikut memiliki dan menjaga tanamannya.

Program pemberdayaan yang telah dilakukan sampai saat ini mulai dari bidang budidaya, penangkapan, pengembangan usaha perikanan dan konservasi wilayah pantai. Untuk budidaya, kami memberikan bimbingan dan pembinaan usaha tambak rakyat untuk ikan bandeng, udang dan rumput laut. Memang tidak spesifik untuk pemuda, karena pemilik tambak relatif tersebar, ada yang masih dibawah 30 th, 30 – 40 th dan banyak yang diatas 40 th. Usaha tambak bandeng di kecamatan Kronjo masih banyak yang tradisional karena kebanyakan merupakan usaha keluarga turun temurun.

Kami juga telah melibatkan pemuda di Kecamatan Kronjo dalam upaya konservasi wilayah laut seperti penanaman rumpon dasar dari blok beton berbentuk bujur sangkar sebanyak 40 buah sejak tahun 2009 dengan lokasi di dekat Pulau Cangkir. Rumpon tersebut sangat membantu nelayan saat paceklik ikan ataupun menjadi lokasi wisata mancing. Disamping itu juga ada program penanaman terumbu karang buatan dengan media tanam berupa piramida pipa PVC yang ditanam pada tempat dengan kedalaman minimal 10 m dengan pencahayaan matahari yang cukup dan kondisi jernih. Sementara untuk bidang penangkapan ikan, kami seringkali membuat pelatihan pembuatan jaring dan perbaikan mesin kapal. Kedepan kami berencana untuk membuat pelatihan tentang pembuatan kapal dengan bobot kurang dari 10 GT yang bekerja sama dengan docking kapal di Bojonegara. Untuk bidang usaha pengembangan perikanan, sementara ini kami lebih melibatkan ibu-ibu istri nelayan dan remaja putri untuk membuat berbagai produk olahan dari ikan seperti fillet ikan (mata belok dan rajungan),

nugget, otak-otak, surimi dan bakso ikan. Saat ini kami sedang mengenalkan teknologi Bandeng cabut duri, yang dapat merupakan bahan baku sate bandeng. Kedepan kami ingin meluaskan kegiatan ini dengan melibatkan pemuda untuk membantu akses pemasaran melalui koperasi atau organisasi yang mereka bentuk.

Kebijakan kami dalam pengembangan usaha perikanan lebih menekankan kepada pengembangan potensi wilayah yang sudah ada namun belum optimal dan minat masyarakat terhadap hasil perikanan tersebut.

3. Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?

Dari program budidaya, kami berhasil meningkatkan minat pemuda untuk ikut membudidayakan bandeng di tambak-tambak tradisional mereka. Hasil budidaya bandeng ini sudah terkenal di wilayah Jabodetabek dengan sebutan Bandeng Kronjo yang enak, gurih dan tidak berbau lumpur. Disamping itu para pemuda nelayan juga berminat untuk mencoba budidaya kerang hijau di lokasi dekat Pulau Cangkir yang relatif masih jernih perairannya. Mereka berinisiatif untuk melakukan penjagaan bersama terhadap lokasi budidaya tersebut. Untuk budidaya rumput laut memang hasilnya kurang memuaskan karena hambatan perairan yang keruh, abrasi pantai yang relatif tinggi dan gangguan dari lalu lintas kapal penangkap ikan yang dapat merusak tali-tali pengikat rumput.

Dari bidang penangkapan ikan, banyak pemuda berkeinginan mempunyai perahu sendiri dengan bobot kurang dari 10 GT yang biasanya digunakan untuk melaut kurang dari 2 hari dengan jangkauan berlayar maksimal 2 mil. Namun kebijakan kami lebih menekankan kepada kepemilikan perahu atas nama organisasi atau kelompok pemuda supaya lebih mudah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi. Kami juga masih berusaha untuk meningkatkan ketrampilan pemuda dalam menangkap ikan dan perbaikan mesin kapal, dengan tujuan supaya mereka dapat menjadi awak kapal-kapal besar dari luar Kronjo yang biasa mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Kecamatan Kronjo. Dengan itu diharapkan dapat mengurangi pengangguran terbuka di kalangan pemuda nelayan lokal.

Untuk bidang konservasi wilayah laut, kami berhasil meningkatkan peran serta pemuda lokal dalam keikutsertaannya menanam mangrove di sepanjang rute wisata ke Pulau Cangkir. Mereka juga ikut memelihara tanaman tersebut dari gangguan binatang ternak kambing yang banyak digembalakan secara liar oleh penduduk. Dari program ini kami berusaha untuk menanamkan jiwa peduli lingkungan kepada para pemuda.

4. Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Beberapa aspek yang masih dirasakan kurang antara lain keberlanjutan program belum dapat dijamin berlangsung setiap tahun karena masih terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia. Sangat diperlukan kerjasama antar sektor atau antar instansi untuk memberdayakan masyarakat pesisir supaya dapat berjalan secara terpadu. Saat ini kami akui bahwa koordinasi antar instansi ini masih lemah dan masing-masing pihak masih menekankan kepentingan programnya sendiri. Sangat diperlukan kemauan politik dari kepala daerah untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kami juga masih menyayangkan pemahaman pemuda bahwa program pemberdayaan yang biasanya berupa pelatihan-pelatihan pasti diikuti dengan bantuan permodalan. Kami terus berupaya melakukan perubahan pemahaman tersebut melalui pendekatan kepada Pemerintah Kecamatan, tokoh masyarakat, ulama dan tokoh pemuda, bahwa Diskanlut hanya merupakan birokrat yang melakukan unsur pembinaan, penyuluhan dan pendampingan. Bantuan permodalan dapat diakses melalui berbagai skema kredit bunga murah dari berbagai Bank yang merupakan bagian dari Kredit Usaha Rakyat. Kami membantu organisasi pemuda untuk pendampingan akses permodalan tersebut.

Disamping itu, hasil pengembangan usaha perikanan selama ini masih terkendala pemasaran. KUD/Koperasi pemuda/organisasi pemuda diharapkan dapat lebih berperan dalam membantu proses pemasaran. Akses yang akan dicoba adalah pemasaran ke Pasar Segar Serpong

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain untuk mengikutsertakan pemuda dalam POKWASMAS yang merupakan kegiatan pengawasan aktivitas penangkapan ikan, terkendala tidak adanya sarana kapal patroli yang dimiliki oleh Diskanlut. Selama ini mereka kita titipkan kepada Tim dari Polisi Air dan Udara yang memang mempunyai sarana kapal patroli. Dari POKWASMAS kita berharap pemuda peduli terhadap kelestarian ikan di perairan laut dan keamanan wilayah pesisir Kronjo.

Sementara untuk kegiatan penanaman terumbu karang dengan media pipa PVC seringkali terhambat lamanya proses pelelangan pengadaan barang dan jasa, karena di wilayah Kabupaten Tangerang masih sedikit yang mempunyai kualifikasi penyedia jasa kegiatan bawah air.

Kami perlu tegaskan kembali bahwa koordinasi antar instansi yang masih lemah merupakan salah satu penyebab mengapa pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten Tangerang belum maksimal. Sangat diperlukan kemauan politik kepala daerah untuk memberikan dukungan dan arahan demi kemudahan koordinasi guna kelancaran program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kami juga mengakui bahwa untuk mengubah perilaku dan pola pikir pemuda dari ketergantungan bantuan pemerintah kepada usaha untuk mandiri memang memerlukan waktu yang panjang.

6. Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?

Seperti sudah dijelaskan didepan, bahwa memberikan contoh teladan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir, merupakan langkah efektif dalam upaya mengubah perilaku dan membangkitkan motivasi. Perubahan perilaku perlu waktu yang panjang.

Individu yang dijadikan teladan sedapat mungkin merupakan bagian dari masyarakat pesisir, sehingga lebih memudahkan dalam berinteraksi secara langsung. Kelompok atau organisasi yang menghimpun potensi pemuda harus tumbuh atas inisiatif dari masyarakat setempat, supaya lebih dapat

menyerap aspirasi. Kelembagaan ini selanjutnya akan dibina secara intensif sampai dirasakan mampu untuk berdiri sendiri dan dapat dilegalkan dengan akta notaris. Kelembagaan ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten dengan bantuan akses permodalan, bimbingan teknis produksi sampai informasi pasar yang kontinyu. Dan juga diberi kesempatan untuk mengembangkan jaringan.

Pemerintah juga perlu mendorong pemanfaatan permodalan dengan peran serta dari BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang atau Propinsi Banten melalui program *Corporate Social Responsibilities (CSR)*. Beberapa BUMN yang dimungkinkan untuk diadakan kerjasama seperti PT Krakatau Steel, PLN Wilayah Banten melalui PLTU Banten III (PLTU Lontar) di desa Kemiri Kecamatan Kronjo dan Bank Mandiri Propinsi Banten.

Kelompok Birokrat/Pemerintah

Responden : Drs. Iratmoko

**Kedudukan : Kepala Bidang Pemuda, Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang**

1. Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?

Pada intinya kami selaku instansi pembina organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang sangat mendukung organisasi tersebut. Sampai saat ini, meskipun sudah terdengar aktivitasnya namun organisasi tersebut belum terdaftar secara resmi di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. Kami lebih menekankan kepada pembinaan eksistensi dan penguatan hubungan internal di organisasi tersebut sebelum memberikan bantuan akses permodalan untuk menunjang aktivitas bisnisnya.

Jika organisasi tersebut sudah dirasakan cukup kuat dan mampu eksis dengan sendirinya, kami akan mengikutsertakan dalam program pelatihan kewirausahaan untuk mengatasi pengangguran dan melatih kepedulian serta kepekaan pada anggota organisasi terhadap lingkungan sosialnya.

Kami juga akan memfasilitasi organisasi tersebut dalam menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk perluasan kegiatan maupun peningkatan kapabilitas SDM organisasi. Misalnya akan merekomendasikan mengikuti pelatihan tentang pembuatan kerajinan dari limbah bekas rumah tangga yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tangerang, maupun kegiatan sejenis di dinas yang lain.

2. Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?

Sampai dengan saat ini kami fokus kepada program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) untuk menggerakkan potensi pemuda di wilayah pesisir. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, bahwa pada tahun 2011 ini kami akan

melaksanakan program Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bidang Kebaharian. Meskipun sebenarnya untuk tahun-tahun kemarin tidak spesifik tentang kebaharian, namun lebih menekankan kepada penguatan peran pemuda di sektor perekonomian secara umum. Sangat dimungkinkan dalam pelaksanaannya nanti akan banyak berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, yang mana mereka saat ini sedang menyiapkan program untuk mendukung pelaksanaan *pilot project* Minapolitan di Kecamatan Kronjo tahun 2012 yang akan datang.

Sementara program rutin yang telah kami jalankan adalah pelatihan kewirausahaan pemuda dengan tujuan untuk membangkitkan motivasi berwirausaha bagi pemuda putus sekolah maupun kelompok pemuda yang ingin mandiri. Untuk tahun 2011 ini akan melakukan pelatihan tentang pesablonan dan perbengkelan. Kemudian dari peserta akan diseleksi untuk mendapatkan bantuan permodalan berupa alat-alat produksinya. Biasanya dari mereka yang serius dan dapat menyajikan rencana kegiatannya dengan baik, akan mendapatkan bantuan tersebut. Sementara untuk akses permodalan, Disporabudpar akan memfasilitasi pendampingan dalam proses pengajuan kredit ke Perbankan maupun BUMN atau pihak swasta yang menawarkan program kredit berbunga rendah untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

3. Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?

Secara umum, untuk program SP3, kami berhasil mengirimkan beberapa perwakilan untuk mengikuti seleksi tingkat propinsi. Diharapkan SP3 yang lolos nantinya dapat memberikan kontribusi lebih baik terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat di wilayah penempatan. Kami juga berharap SP3 nanti ada yang ditempatkan di wilayah pesisir, sehingga dapat membantu pemberdayaan pemuda nelayan di wilayah tersebut.

Sementara itu pelatihan kewirausahaan berupa pelatihan perbengkelan, akan kita arahkan lebih kepada perbengkelan mesin kapal penangkap ikan. Ini akan kami koordinasikan dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Tangerang untuk mengidentifikasi kelompok pemuda yang mempunyai usaha penangkapan ikan.

Sementara itu untuk memberdayakan pemuda dalam sektor pariwisata, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait supaya wacana yang selama ini berkembang seperti rencana persewaan perahu wisata semacam *banana boat* yang dikelola kelompok pemuda pesisir dapat terwujud dalam waktu dekat.

Dalam rangka memperkuat fisik, meningkatkan kesegaran jasmani dan mempererat kerukunan bersama, kami akan lebih menggiatkan olahraga pantai seperti bola volley dan bola sundul dengan kompetisi yang rutin. Kami telah mengikutkan perwakilan pemuda pesisir Kabupaten Tangerang dalam kegiatan Pekan Olahraga Pesisir tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Pandeglang Propinsi Banten.

4. Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Kami merasakan bahwa upaya untuk memberdayakan pemuda pesisir harus dimulai dengan semangat para pemuda itu sendiri untuk dapat lebih mandiri. Tanpa semangat dan motivasi yang tinggi dan tumbuh dari diri mereka sendiri, segala program pemberdayaan akan sulit untuk dijalankan secara berkesinambungan. Tanpa keinginan yang kuat yang datang dari mereka, program pemberdayaan tidak lebih dari sekedar program menghamburkan uang tanpa manfaat yang jelas.

Saat ini kami dihadapkan kepada pemuda yang mempunyai pola pikir pragmatis, ingin segera berhasil, tidak sabar dan kurang bekerja keras serta mempunyai semangat untuk mandiri yang masih kurang. Apalagi jika mereka ditarik ke KNPI dengan 48 OKP anggotanya, sangat mungkin energi habis untuk berdebat posisi strategis. Belum lagi godaan untuk ikut aktif sebagai pengurus atau sekedar simpatisan partai politik menjelang pilkada atau pemilu nasional.

Semangat untuk mandiri yang rendah dan pola pikir pragmatis ini sebenarnya dapat diatasi melalui koordinasi antar instansi. Misalnya dengan pemberian materi kewirausahaan di setiap sekolah sejak dini, menanamkan

sikap pembelajaran untuk mandiri, tidak cepat puas, jujur dan tidak suka mencari jalan pintas. Pendekatan kepada tokoh ulama dan tokoh masyarakat secara informal dapat dijalankan demi lebih menginternalisasikan nilai-nilai moral yang mendukung peningkatan motivasi, menumbuhkembangkan kesabaran dan percaya kepada kekuatan sendiri dalam setiap menjalankan kegiatan usaha.

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri yang strategis karena dekat dengan ibukota negara. Diantara banyaknya industri yang ada, pemenuhan kebutuhan tenaga kerjanya sebagian besar datang dari luar Tangerang, karena yang dibutuhkan memang tenaga kerja dengan keahlian khusus. Namun untuk industri dengan skala massal seperti garment, banyak melibatkan warga sekitar pabrik untuk menjadi karyawan.

Namun penyerapan tenaga kerja tersebut masih dirasakan kurang karena jumlah pengangguran yang semakin bertambah akibat masih relatif tingginya angka putus sekolah. Kebanyakan kaum muda di wilayah pesisir juga rata-rata hanya tamat SMP, sementara yang tamat SMA atau SMK relatif sedikit.

Menumbuhkembangkan motivasi berwirausaha semakin berat dengan kondisi SDM Pemuda yang minim pengetahuan dan bekal ketrampilan yang diperoleh selama sekolah. Kami mengapresiasi jika memang pemuda pesisir di Kecamatan Kronjo dapat membentuk semacam pembelajaran non formal untuk meningkatkan ketrampilan dan memberikan kesempatan melanjutkan sekolah dengan biaya relatif lebih terjangkau. Dengan bekal ketrampilan yang memadai, akan sedikit banyak membantu kami dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kewirausahaan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan mereka.

Namun demikian, disisi lain pemuda pesisir juga masih dirasakan kurang kesadarannya terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan wilayah pesisirnya. Padahal peran mereka juga berpengaruh nantinya terhadap

upaya mengatasi ancaman abrasi pantai di wilayah pesisir Kecamatan Kronjo dan sekitar Pulau Cangkir. Peran yang dapat mereka jalankan antara lain adalah ikut menyadarkan penduduk supaya tidak membuang limbah rumah tangga dan sampah ke laut dan mengajak menanam pohon-pohon keras di pesisir pantai. Sementara itu kegiatan penanaman mangrove merupakan program yang dijalankan oleh instansi lain, maka Disporabudpar akan mendukung pelaksanaannya dengan melibatkan OKP untuk turut serta menghijaukan wilayah pesisir.

6. Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?

Beberapa model pemberdayaan untuk membangkitkan motivasi berwirausaha yang selama ini kami kembangkan antara lain dengan memberikan bantuan alat permodalan terhadap kelompok pemuda yang mempunyai strategi bisnis yang kompetitif dan diatur dengan pola manajemen yang baik. Kami berupaya dari kelompok tersebut muncul kader-kader wirausaha muda yang dapat menjadi teladan dan contoh bagi pemuda yang lain.

Demikian pula melalui pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti kaum ulama dan tokoh budaya yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat khususnya pemuda. Supaya mereka dapat ikut membangkitkan semangat untuk mandiri dan motivasi berwirausaha dalam setiap kesempatan pertemuan.

Kami menyadari bahwa pekerjaan besar untuk pemberdayaan pemuda pesisir tidak akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran tanpa adanya koordinasi antar instansi baik lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun pemerintah pusat melalui UPTnya yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, ataupun peran serta pihak swasta yang menaruh perhatian dan mempunyai kepentingan terhadap upaya pemberdayaan tersebut.

Kelompok Birokrat/Pemerintah

Responden : Sandi Mirana, SE

Kedudukan : Sekretaris Kecamatan Kronjo

1. Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?

Secara Pemerintah kecamatan akan mendukung keberadaan organisasi pemuda pesisir itu, sepanjang mereka dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat di Kecamatan Kronjo. Kami menyarankan supaya pengurus dapat mengidentifikasi minat anggota yang ingin bergabung di organisasi tersebut. Selanjutnya segera dibentuk secara resmi dengan dokumen pendukung yang lengkap. Kecamatan akan membantu mereka dalam pemenuhan persyaratan administrasi.

Jika organisasi sudah resmi berdiri, kecamatan akan berupaya secara rutin menyelenggarakan semacam pendidikan dan pelatihan singkat tentang manajemen organisasi bekerja sama dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kami beranggapan bahwa sebagai organisasi baru, maka perlu pembekalan pendidikan manajemen organisasi supaya semakin kuat interaksi didalamnya dan dapat mengelola secara optimal kelebihan dari masing-masing anggota serta mengurangi potensi konflik internal. Bagaimanapun juga keberadaan organisasi semacam itu akan memberikan manfaat yaitu :

- Pemuda yang belum mempunyai pekerjaan tetap, dapat belajar berorganisasi dengan mengeluarkan ide masing-masing bagaimana caranya untuk memajukan masyarakat pesisir.
- Dengan berorganisasi dapat mengurangi aktivitas pemuda yang tidak bermanfaat
- Menjadi pelopor bagi kemunculan organisasi kepemudaan yang lain.

2. Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?

Selama ini tanpa memandang itu organisasi pemuda pesisir atau bukan, kami bekerja sama dengan BPP Kronjo ataupun instansi terkait lainnya menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan di bidang pengolahan hasil

perikanan, pelatihan pembuatan kerajinan dari bambu dan pelatihan usaha perbengkelan mesin kapal penangkap ikan. Jika memang nantinya organisasi pemuda pesisir yang sekarang muncul ini dapat terus eksis, kami akan mengajak mereka dalam kegiatan pelatihan tersebut.

3. Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?

Dari pelatihan-pelatihan tersebut meskipun belum sepenuhnya mampu secara mandiri namun muncul beberapa pemuda yang mulai berani mencoba berwirausaha di sektor perikanan, kerajinan maupun perbengkelan. Dari sektor perikanan telah ada inisiatif untuk lebih menekuni usaha tambak bandeng dengan meminjam empang milik penduduk atau badan usaha yang ada di Kecamatan Kronjo namun belum dikelola dengan baik. Misalnya di desa Pagedangan Ilir, Kronjo dan Muncung.

Sementara itu untuk kerajinan bambu muncul di desa Pagedangan Udik dan Pagedangan Ilir yang dilakukan oleh pemuda putus sekolah dan para nelayan yang tidak melaut. Jadi mereka mempunyai pendapatan tambahan saat tidak melaut. Meskipun untuk saat ini pemasaran hasil kerajinan tersebut masih menjadi hambatan.

Usaha perbengkelan mesin kapal ada yang mencoba di desa Kronjo di dekat TPI untuk mesin-mesin kapal kapasitas dibawah 10 GT. Pemuda tersebut sebelumnya telah mempunyai bekal pendidikan montir dan pengalaman sebagai motoris kapal penangkap ikan berukuran kecil. Namun karena masih minimnya peralatan pendukung, perbaikan mesin kapal memerlukan waktu yang lama. Kami akan berusaha membantu semaksimal mungkin supaya kegiatan perbengkelan tersebut juga mendapat pembinaan dari instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM dan Disporabudpar Kabupaten Tangerang.

4. Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Kecamatan Kronjo secara umum mempunyai potensi besar di sektor perikanan seperti budidaya ikan dan pengolahan hasil ikan. Jika tidak ada perubahan rencana maka pada tahun 2012 yang akan datang, disini menjadi

lokasi percontohan proyek minapolitan dari pusat. Kami tidak mengetahui sampai dimana persiapannya karena itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Kami akan selalu berusaha membantu semaksimal mungkin demi kebaikan bersama dan kelancaran program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir.

Sampai saat ini tantangan terbesar yang kami hadapi adalah membangkitkan minat pemuda nelayan untuk menekuni usaha penangkapan ikan. Namun kami juga menghadapi kendala di lapangan yaitu hanya sebagian kecil saja sarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh penduduk asli Kronjo. Sebagian besar merupakan kapal-kapal yang dimiliki oleh nelayan pendatang dari Cirebon, Tegal dan Pekalongan. Kapal mereka rata-rata berukuran 25 GT dan sanggup berlayar lebih minimal 4 hari dengan bahan bakar penuh. Sementara kapal yang dimiliki penduduk lokal hanya mampu berlayar 1 malam saja dengan bahan bakar yang terbatas, dengan jarak maksimal 2 mil laut. Jangkauan kapal nelayan pendatang dapat sampai perairan sebelah timur Sumatera Selatan, bagian Barat Daya perairan selat Kalimantan dan Laut Jawa di pesisir utara Kabupaten Pekalongan.

Kami masih mengalami kesulitan untuk membangkitkan minat pemuda supaya terjun ke penangkapan ikan dan tidak mau kalah dengan nelayan pendatang. Masalah kapal dapat disewa, namun awak kapal jika tidak punya kemauan sendiri akan susah untuk mengoptimalkan penangkapan ikan.

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Dalam kegiatan pembangunan secara umum, kami menilai ada faktor positif yang dapat dimanfaatkan yaitu pemuda pesisir mempunyai sikap toleran dalam membantu pelaksanaan program kecamatan, terutama program yang diperuntukkan bagi kelompok mereka. Dengan akar budaya Betawi yang masih cukup kuat, mereka dengan sukarela akan mudah dikerahkan untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan.

Namun khusus dalam program pemberdayaan, kami menghadapi kendala berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang rata-rata hanya

lulus SMA atau SMK sehingga kurang dapat cepat memahami pengenalan program-program yang agak rumit dan perlu waktu lama untuk keberhasilannya. Jika memang dapat berhasil dengan lebih cepat mengapa harus belajar lebih lama. Itu yang menjadi pemahaman sebagian pemuda disini. Kami juga menyadari bahwa lokasi geografis di pesisir biasanya akan dijumpai keterbatasan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung untuk memperkuat jaringan komunikasi ataupun kesempatan untuk meluaskan pengaruh (*networking*). Memang fasilitas internet seperti keberadaan warung internet ada di lingkungan sekitar kantor Kecamatan, namun akses internet ke rumah maupun internet tanpa kabel dari layanan operator seluler tidak cukup baik kualitasnya.

6. Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?

Untuk membangkitkan semangat kewirausahaan sejak dini, maka kami akan mengusulkan pendirian sebuah SMK khusus perikanan dan kelautan yang dapat berupa sekolah negeri ataupun swasta. Dengan mengenalkan potensi perikanan dan kelautan sejak anak-anak duduk di SMK tersebut, akan membantu membuka wawasan mereka supaya dapat menekuni usaha perikanan dan tidak berminat menjadi buruh di pabrik.

Jika kecamatan mendapat anggaran lebih untuk program pemberdayaan, maka kami merencanakan memperbanyak pelatihan-pelatihan di sektor perikanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten ataupun Propinsi. Kami juga akan mengirimkan pemuda pesisir untuk magang di sektor usaha perikanan unggulan di Propinsi lain.

Namun kesemuanya itu kembali kepada kemauan politik dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya untuk turut serta aktif memberdayakan pemuda pesisir sesuai dengan potensi wilayahnya.

Kelompok Birokrat/Pemerintah

Responden : Ir. H. Rathoyo Rasdam, MBA

**Kedudukan : Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda,
Deputi Pengembangan Kepemudaan
Kementerian Pemuda dan Olahraga**

1. Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?

Kami pada prinsipnya mendukung kegiatan positif pemuda di wilayah pesisir tersebut. Di Kemenpora ada dana *block grant* untuk pengembangan kewirausahaan pemuda. Mekanisme seleksinya melalui Dispora setempat dan nominator yang lolos dikirim ke Kemenpora. Instansi lain yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan pemuda pesisir juga dapat ikut berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami akan membantu kelancarannya sesuai dengan kewenangan di daerah.

Kemenpora ke depan akan membentuk suatu kelembagaan permodalan bagi wirausaha pemuda sebagai amanat dari UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Harapan kami kelembagaan tersebut nantinya dapat membantu pemuda yang ingin berwirausaha secara lebih mudah dan cepat. Kami akan mengandeng BUMN, swasta atau *stakeholder* lain guna pengumpulan modalnya. Lembaga itu bersifat fungsional yang dikelola oleh profesional yang berpengalaman di bidang manajemen usaha kecil dan mikro.

2. Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?

Selama ini kami yang pernah dilakukan untuk pemuda pesisir memang baru sebatas penyelenggaraan Pekan Wisata Bahari yang lebih mengedepankan sisi olahraga pantai seperti bola voli pantai, selancar, kapal layar, selancar dan sepak bola pantai. Kami pernah menyelenggarakan kegiatan seperti itu di pesisir pantai Pandeglang bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Banten. Terlihat antusiasme warga sangat tinggi terhadap event seperti itu.

Untuk pemberdayaan ekonomi kelompok pemuda yang selama ini pernah dilakukan meliputi pemberian pelatihan teknis kewirausahaan dan bantuan permodalan yang terbatas melalui dana *block grant*.

Pada tahun 2010 kami menyalurkan paket bantuan (*block grant*) senilai masing-masing Rp 50.000.000 untuk beberapa Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) di daerah. SKP-SKP tersebut antara lain SKP Kehutanan, SKP Perkebunan, SKP Pertanian, SKP Peternakan, SKP Kelautan dan Perikanan, SKP Industri Olahraga, SKP Wisata, SKP Industri Kecil dan SKP Kerajinan. Jadi jika program ini diteruskan di 2011, kami harapkan kelompok pemuda pesisir yang ada di Tangerang dapat mengikuti proses seleksinya.

Selain itu selama ini kami juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis kewirausahaan yang sifatnya untuk mencapai tujuan jangka pendek. Pelatihan yang kami lakukan itu lebih banyak bersentuhan dengan cara-cara membangkitkan motivasi untuk berwirausaha. Biasanya diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota setempat karena menggunakan alokasi Dana Dekonsentrasi. Beberapa fasilitator dengan materi umum juga kami sediakan untuk mendukung pelatihan tersebut, dan Dispora membantu dengan fasilitator untuk materi teknis yang sesuai dengan kebutuhan kelompok wirausaha pemuda tersebut.

3. Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?

Dari pelatihan-pelatihan yang pernah pernah kami selenggarakan, akhirnya sejak tahun 2007 semakin banyak pemuda di daerah yang mempunyai motivasi berwirausaha, membentuk Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP). Pembentukan tersebut sebagai langkah awal untuk memudahkan identifikasi jumlah pemuda yang berminat serius berwirausaha, serta lebih memudahkan akses permodalan.

Bantuan permodalan yang diberikan bukan merupakan semacam bantuan sosial namun bersifat pinjaman lunak (*soft loan*). Permodalan saat ini

masih mengikuti skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi UMKMK (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi).

Disisi lain, dengan salah satu tujuan untuk membantu keberlangsungan hidup dari kegiatan kelompok wirausaha pemuda (KWP), kami melakukan program pendampingan. Program yang ini juga membantu KWP dalam mengaskes permodalan dari lembaga keuangan non bank, BUMN, swasta ataupun pihak yang lain.

Sementara itu, untuk memperluas akses pemasaran, kami memberikan kesempatan kepada KWP yang layak menjadi contoh bagi KWP yang lain berupa kesempatan mengikuti expo hasil karyanya ke luar negeri. Kegiatan expo yang pernah diselenggarakan antara lain ke Malaysia, Iran dan China dengan mengenalkan beberapa hasil karya wirausahawan pemuda seperti seni lukis, kerajinan gelas ukir, dan handycraft dari limbah. Dari kegiatan expo tersebut, ternyata setelah ditindaklanjuti dengan pemasaran online, mereka banyak menerima pesanan dari luar negeri. Kami melihat bahwa program pendampingan dan expo layak untuk dipertahankan secara berkesinambungan.

4. Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Kami menyadari bahwa diperlukan koordinasi yang kuat lintas sektor untuk suatu program pemberdayaan masyarakat pada umumnya ataupun pemuda pada khususnya. Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk kelancaran program dan menjamin keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Karena perlu dipimpin langsung oleh presiden maka dari serangkaian proses pemberdayaan pada akhirnya bermuara kepada kemauan dan keberpihakan pemerintah kepada pemberdayaan UMKMK.

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Koordinasi antar instansi masih lemah dan pendekatan pemecahan masalah hanya berlatar belakang bidang masing-masing. Sebenarnya dalam pemberdayaan pemuda, kami hanya berangkat dari 3 sisi yaitu kelemahan pemuda dalam hal motivasi untuk wirausaha, kebijakan mendorong tumbuhnya embrio wirausaha dan kesempatan pengembangan kewirausahaan.

6. Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?

Sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemberdayaan yang kami lakukan tidak sektoral dan harus memenuhi 3 kriteria yaitu pemuda yang berusia 16 – 30 tahun, mempunyai talenta bisnis dalam kelompok wirausahanya, dan kreativitas yang muncul dari pemuda tersebut. Kami akan membentuk PKP (Pusat Kewirausahaan Pemuda) di kabupaten/kota yang merupakan gabungan dari kelompok pemuda-pemuda yang mempunyai jenis usaha yang *segmented* atau spesifik. Kemudian di Pusat akan dibentuk LPKP (Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda) yang merupakan lembaga fungsional khusus penanganan kewirausahaan pemuda.

Kami mulai dengan kampanye nasional untuk kewirausahaan setelah LPKP terbentuk dengan berprinsip kepada MSO yaitu pembangkitan motivasi, peningkatan *skill* dengan mendorong pengetahuan tentang peningkatan ketrampilan. *Opportunity* berupa kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Konsep ini bermuara kepada keberpihakan pemerintah terhadap Wirausaha Mula Pemuda (WMP) melalui bantuan permodalan berupa penyertaan modal (modal ventura).

Pada tahun 2012 kami akan fokus pembentuk PKP di tempat-tempat yang mempunyai pemuda dengan kreativitas dalam berusaha.

Kelompok Birokrat/Pemerintah

Responden : R. Drajat Subagio, S.Pi, M.Si

**Kedudukan : Kepala Seksi Implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,
Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

1. Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?

Kami mendukung segala upaya program dari berbagai instansi ataupun *stakeholder* yang lain yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, terutama melalui generasi mudanya. Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kami di KKP yang mempunyai amanat untuk memberdayakan masyarakat pesisir, utamanya melalui sektor perikanan dan kelautan.

Keberadaan organisasi atau perkumpulan pemuda pesisir sangat kami dukung, apalagi jika mereka mempunyai visi dan misi yang jelas dalam upaya memberdayakan masyarakat pesisir melalui sektor perikanan dan kelautan. Kami siap untuk membantu teknis maupun non teknisnya sepanjang masih dalam koridor kewenangan KKP. Kami berharap pemerintah daerah setempat juga dapat mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pemuda pesisir tersebut. Sehingga program kerjasama yang mungkin terwujud kedepan, dapat tepat sasaran. Kami berencana untuk mengikutsertakan pemuda pesisir Kabupaten Tangerang dalam menyukseskan *pilot project* Minapolitan di tahun 2012.

2. Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?

Dalam upaya mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan menjaga kelestarian sumber daya lingkungan sehingga dapat menjamin kelangsungan pekerjaan, pendapatan, dan

kehidupan masyarakat pesisir, maka harus dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para generasi mudanya. Keterlibatan para pemuda pesisir dalam kegiatan pembangunan lokal bertujuan agar potensi sumber daya pesisir dan laut yang ada dapat dikelola secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami KKP mengajukan Program Regenerasi Nelayan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan upaya untuk mengatasi kedua permasalahan sosial ekonomi di atas. Program Regenerasi Nelayan merupakan kegiatan pendukung Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Melalui program ini, para pemuda pesisir akan diberikan pengetahuan dan dilatih ketrampilan usaha sehingga mereka memiliki kemampuan mengelola potensi sumber daya pesisir dan laut (perikanan) sesuai dengan minat usaha mereka, seperti pada bidang penangkapan, budi daya, pengolahan, perbengkelan, atau wisata pantai/bahari.

Salah satu tujuan dari program regenerasi nelayan adalah mengurangi laju urbanisasi atau kepergian generasi muda dari masyarakat nelayan dari wilayah pedesaan mereka ke kota-kota besar dalam rangka mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak atau dengan kata lain, meningkatkan kualitas SDM generasi muda nelayan. Oleh karena itu, Program Regenerasi Nelayan menekankan perekrutan peserta dari kalangan pemuda masyarakat nelayan yang berstatus belum memiliki pekerjaan yang memadai atau generasi muda dari keluarga nelayan atau setidaknya keluarga masyarakat pesisir yang bekerja pada sektor perikanan, terutama pada usaha budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan.

Kurikulum pelatihan kami rancang sesuai dengan karakteristik wilayah dan keunggulan potensi sumber daya lokal. Untuk mengefektifkan kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha, serta menghimpun kemampuan sumber daya penunjang, maka KKP akan mensinergikan berbagai *stakeholders* yang ada. Program Regenerasi Nelayan ini telah kami selenggarakan sejak tahun 2004 sampai saat ini.

3. Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, terlihat bahwa kualitas SDM generasi muda nelayan meningkat dan menjadi agen perubahan partisipatif dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Hasil penggambaran dan analisis terhadap keragaan Program Regenerasi Nelayan yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bahwa secara komprehensif program ini memiliki 3 fase. *Fase pertama* adalah masa pendidikan dan pelatihan serta pemberian BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Sementara itu, *fase kedua* adalah masa perintisan usaha (siklus usaha pertama) dan pendampingan bagi para peserta dalam merintis usaha. Akhirnya, *fase ketiga* adalah masa pengembangan usaha (keberlanjutan usaha) hingga terbentuknya jiwa wirausaha yang tercermin dari meningkatnya kemampuan para peserta program didalam mengatasi segala upaya yang terkait dengan upaya mereka mengembangkan usaha. Diharapkan akan tercipta wirausahawan-wirausahawan muda sektor kelautan dan perikanan.

Hasil evaluasi pada tahun 2009 yang telah kami lakukan terhadap pelaksanaan dan capaian Program Regenerasi Nelayan di 58 kabupaten/kota penerima program periode tahun 2003-2008 menunjukkan capaian program yang relatif baik di tahap awal, yaitu tahap perekrutan peserta/pemanfaat program hingga pemberian modal kerja usaha, tidak disertai dengan meningkatnya capaian program pada tahapan program berikutnya. Bahkan secara statistik, capaian program di tahap akhir menunjukkan hanya sekitar 26,84% peserta program yang mampu menjadi wirausahawan-wirausahawan muda dari kelompok masyarakat nelayan yang tangguh dan menjadi penggerak perekonomian sektor kelautan dan perikanan. Capaian program sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat introduksi dan adopsi teknologi tepat guna oleh pemanfaat (peserta) program dan masyarakat di lingkungan sekitarnya akibat belum kuatnya kelembagaan pendampingan sebagaimana dibutuhkan.

4. Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Program Regenerasi Nelayan pada hakikatnya merupakan sebuah program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga peran serta dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau tingginya kinerja program ini.

Kami telah mengevaluasi pelaksanaan terhadap 51 kabupaten/kota penerima Program Regenerasi Nelayan, yang hasilnya menunjukkan bahwa kinerja program sangat dipengaruhi oleh faktor pengungkit kinerja dari kelompok keberhasilan mengatasi kendala, yang diikuti oleh kelompok pelopor pemberdayaan dan pendampingan. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja program sangat dipengaruhi oleh adanya jalinan kemitraan dan keterlibatan penuh berbagai pihak yang berkepentingan. Kemitraan diperlukan oleh para peserta program dalam proses pembentukan jiwanya menjadi seseorang yang berjiwa wirausaha. KKP akan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan para peserta mengatasi kendala dalam usahanya, mendorong terciptanya lebih banyak lagi kelompok pemuda pelopor serta proses pendampingan dapat dijalankan secara berkelanjutan. Selama ini proses pendampingan berakhir sesuai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan. Kami juga menemukan fenomena bahwa keterlibatan berbagai pihak tidak berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan kinerja program, seperti pada tahap perekrutan peserta, pemilihan jenis usaha, pengelolaan usaha dalam kelompok hingga pemberian BLM. Dengan kata lain, pelaksanaan tahapan program secara baik dengan masih sedikitnya pihak yang terlibat, dapat menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan tahapan program berikutnya yang melibatkan banyak pihak, dan sangat berpengaruh dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari Program Regenerasi Nelayan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?

Secara ringkas permasalahan yang dihadapi oleh peserta program dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu masalah teknis, masalah ekonomis dan masalah sosial. Dari hasil survey lapang yang kami lakukan diketahui berbagai kendala sosial yang dihadapi oleh peserta program yaitu sebagian pelaksana program dan peserta program menganggap program ini hanya proyek, persepsi bantuan yang diterima merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan.

Sedangkan kendala ekonomi yang dihadapi antara lain nilai bantuan langsung masyarakat yang belum memenuhi skala ekonomi usaha, sulitnya pemasaran produk yang dihasilkan, sulitnya mencari modal tambahan usaha dari pihak ketiga. Sementara itu, kendala teknis yang dihadapi diantaranya masalah penyakit dalam usaha budidaya rumput laut, pendampingan teknis oleh tenaga pendamping atau dinas terkait masih kurang baik dari sisi periode atau waktu pendampingan maupun dari aspek kemampuan teknis atau kualitas pendampingan karena ada sebagian pendamping yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai.

6. Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?

Untuk meningkatkan akselerasi perubahan masyarakat pesisir agar lebih berdaya, maka sumberdaya laut dikawasan pesisir harus dikelola oleh sumberdaya yang profesional dan berkarakter. Tidak hanya cukup melalui penyuluhan perikanan saja, tetapi kader pengelola sumberdaya laut di kawasan pesisir juga harus dididik secara lebih terstruktur dan khusus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang sangat spesifik

KKP melalui Program Regenerasi Nelayan dengan salah satu kegiatannya berupa Pendidikan Perikanan berbasis Masyarakat Pesisir merupakan salah satu pilihan yang diharapkan dapat meningkatkan akselerasi perubahan Masyarakat Pesisir agar lebih berdaya dan lebih meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan pesisir.

Program Regenerasi Nelayan dilaksanakan oleh KKP berdasarkan berbagai pendekatan, yaitu upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program, pembangunan berbasis peningkatan kompetensi sumber daya generasi muda nelayan yang dicirikan oleh:

- a. Masyarakat (peserta program) sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan keberlanjutan usaha, pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya
- b. Pendampingan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan akses informasi bagi masyarakat dalam pengembangan usaha di bidang perikanan sehingga terbentuk kemandirian masyarakat dalam pengembangan usaha, pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya
- c. Kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam mengembangkan kegiatan/usaha di bidang perikanan dan kelautan serta garam.

Swasta Sektor Perikanan dan Kelautan

Responden : H. Ubed

Kedudukan : Pimpinan UD Mina Segar bergerak disektor pengolahan fillet ikan

- 1. Manfaat apa yang perusahaan anda dapatkan bila kemampuan pengelolaan usaha perikanan dan kelautan pemuda pesisir meningkat?**

Saya senang jika ada kelompok pemuda pesisir di Kecamatan Kronjo yang salah satu usahanya bergerak di sektor perikanan, karena dengan demikian akan mengurangi jumlah pemuda pengangguran yang ada. Jika memang mereka secara kebetulan melakukan penangkapan ikan dengan kontinyu, kami akan menampung beberapa jenis ikan tangkapannya yang sesuai dengan permintaan yang datang kepada kami. Biasanya berupa ikan mata Belok dan ikan Ekor Kuning. Ikan-ikan tersebut diolah menjadi fillet ikan yang merupakan pesanan rutin pedagang besar di Muara Angke Jakarta.

- 2. Apa saja peran perusahaan anda dalam membina kelompok pemuda pesisir dalam meningkatkan kapabilitasnya?**

Kami akan berusaha sedapat mungkin selalu menjalin komunikasi yang baik dengan kelompok pemuda pesisir tersebut. Pertemuan informal sebulan sekali saya rasa cukup untuk menyerap informasi yang ada ataupun apa keinginan dan kebutuhan mereka. Perusahaan kami selalu membuka diri jika ada pemuda anggota kelompok yang ingin berlatih atau magang tentang cara pembuatan fillet ikan yang baik. Kami akan membantu mencari akses permodalan ataupun pemasaran melalui jaringan dagang kami selama ini. Jika pemuda tersebut kemudian terjun langsung mengelola usaha sejenis seperti pembuatan fillet ini, kami tidak perlu kuatir karena sudah mempunyai pelanggan masing-masing dan justru dapat bekerja sama jika salah satu produsen kekurangan stok untuk mencukupi pesanan.

- 3. Adakah program yang spesifik yang perusahaan anda lakukan untuk kearah tersebut?**

Sampai saat ini belum ada program yang khusus untuk pemuda pesisir, karena kami berinteraksi dengan nelayan dari segala usia. Kami tidak banyak menemukan nelayan muda yang melakukan penjualan ikan di TPI. Jika ada, mereka kebanyakan nelayan dari wilayah lain seperti Cirebon, Palembang, Lampung, Tegal, dan Pekalongan.

Namun intinya, jika nanti kelompok pemuda pesisir tersebut memang akan mengelola usaha perikanan, kami siap menyediakan diri sebagai tempat pelatihan ataupun konsultasi bisnis perikanan. Tentunya aparat pemerintah di Kronjo juga ikut membantu.

4. Apa saja yang menjadi hambatan perusahaan anda dalam program tersebut?

Karena memang belum membina secara langsung kegiatan kelompok pemuda pesisir tersebut, maka kami belum menemukan hambatan apapun. Namun jika nantinya kerjasama itu terwujud, kami menilai kurangnya minat pemuda saat ini untuk mencoba wirausaha di perikanan masih kurang. Untuk menumbuhkan semangat wirausaha kami tidak dapat berjalan sendiri tetapi perlu dibantu dari pemerintah Kabupaten melalui instansi yang berwenang.

Kami boleh dijadikan contoh wirausahawan yang dianggap berhasil dan mampu mandiri meskipun tidak mempunyai pendidikan tinggi, hanya lulus SMA. Namun kami tidak mempunyai keahlian untuk memotivasi orang lain supaya mengikuti langkah-langkah yang pernah kami jalani selama ini. Kami yakin pemerintah dapat membantu untuk mengatasi masalah itu.

5. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan program perusahaan tersebut?

Jika memang nantinya kami ikut memberdayakan kelompok pemuda pesisir itu, tentunya kami menginginkan pelaksanaannya dapat dijamin dengan aman oleh pemerintah. Meskipun kami menyediakan diri sebagai tempat pelatihan maupun konsultasi bisnis, namun kami tidak menyediakan semacam uang pembinaan atau uang saku, akomodasi dan konsumsi selama pelatihan. Pemerintah Kecamatan ataupun aparat lain yang terkait harus

membantu mengatasi itu supaya pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat terus berjalan aman, nyaman dan tertib.

Pemerintah juga hendaknya ikut membantu mereka dalam kemudahan mengakses permodalan dan perluasan pasar hasil produksi. Sedikit banyak sumbangan kami ini juga membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Supaya dapat membuka wawasan pemuda lebih luas terhadap pilihan hidup setelah lulus sekolah.

6. Harapan apa yang diinginkan oleh perusahaan anda terhadap pemerintah dan pemuda pesisir untuk menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan bisnis dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat?

Kami menginginkan pemerintah dapat menjalankan peranannya sebagai pengatur yang bekerja secara profesional dan tidak berbelit-belit. Buka info seluas-luasnya bagi kalangan pengusaha yang ingin memberdayakan masyarakat pesisir melalui pelaksanaan sebuah program. Jangan secara mendadak datang permintaan bantuan pembiayaan program melalui istilah CSR. Untuk perusahaan besar mungkin hal yang tidak memberatkan, namun bagi perusahaan skala kecil dan menengah tentunya perlu persiapan matang untuk ikut menggulirkan dananya dalam CSR tersebut.

Sementara untuk kaum pemuda pesisir, setelah mereka selesai mengikuti suatu pelatihan untuk pemberdayaan, seharusnya sudah tumbuh minat yang semakin matang untuk wirausaha. Harus berani nekad untuk mencari pinjaman modal dan tidak perlu gengsi atau malu bertanya kepada mereka yang dianggap lebih menguasai bidang tersebut. Pemuda pesisir harus dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat pesisir pada umumnya, bahwa jika semangat untuk wirausaha itu sudah ada dan tumbuh dari diri sendiri bukan karena paksaan, akan mampu untuk hidup lebih mandiri.

Kami yakin pemuda mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga suasana aman, tertib dan nyaman di komunitas pesisir. Dengan suasana seperti itu, kami yakin investor yang berminat untuk ikut memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir akan semakin banyak. Dengan banyak investor maka peluang kerja juga semakin besar, jumlah pengangguran dapat berkurang.

Ustaz Suspendy (Tokoh Ulama)

Pendapat tentang pemuda pesisir?

Sangat mendukung keberadaannya jika memang organisasi pemuda pesisir sudah resmi terbentuk. Karena hanya dengan berorganisasi, potensi mereka dapat lebih tersalurkan. Misalnya kemampuan fisik yang masih baik dapat disalurkan melalui olahraga. Informasi peluang kerja juga lebih terbuka. Lewat koperasi, pengaturan pendapatan dari hasil berusaha dapat diatur.

Pembinaan pemuda pesisir?

Seminggu sekali pengajian rutin untuk pembinaan mental pemuda dilakukan di masjid2 dengan bimbingan dari para ustadz di Kecamatan Kronjo di bawah koordinator saya.

Pencegahan terhadap ancaman narkoba, terorisme?

Kerjasama dengan kepolisian untuk pembinaan dan pengawasan

Pemberdayaan ekonomi?

Kurang berminat di sektor perikanan karena gengsi dan tidak menjanjikan pendapatan bulanan yang pasti. Kerjasama dengan pedagang besar untuk dapat memberikan contoh dan kiat2 berwirausaha.

Strategi Wirausaha?

Dalam pengajian rutin biasanya diajak juga tokoh wirausaha yang sukses. Misalnya H. Ubed selaku pedagang ikan yang sukses di kecamatan Kronjo dan masih berusia muda.

Permasalahan Pemuda pesisir?

Narkoba musuh utama. Minat untuk berusaha sendiri masih kurang. Namun untuk bekerja di industri sangat tinggi. Untuk mengatasi gengsi, pembinaan mental di setiap pengajian rutin mingguan (Rabu malam). Pengangguran yang masih tinggi juga akan mengganggu keamanan lingkungan. Koordinasi dengan industri di lingkungan Kec Kronjo belum dapat berjalan rutin, hanya untuk memenuhi kebutuhan naker musiman/kontrak jangka pendek.

Koordinasi dengan instansi pemerintah?

Belum ada koordinasi pemberdayaan pemuda dengan instansi pemerintah. Hanya koordinasi dengan Kepolisian dan Koramil untuk penanggulangan prostitusi di wilayah P.Cangkir. Demikian juga dengan pencegahan mabuk-mabukan dan narkoba juga dilakukan.

Monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali sampai sekarang. Dengan Pem.Kecamatan belum dilakukan. Harapannya dapat bekerja sama dengan pengelola pelelangan ikan setempat untuk dapat menyerap tenaga kerja dari pemuda di lingkup kec Kronjo.

responden : Nur Subehan, A.Md dan Endang Sutrisna (Anggota Kelompok Pemuda Pesisir "Surya Bahari" Kecamatan Krajo Kabupaten Tangerang)

Responders	Transcript DF	Kategorisasi										Triangulasi	Penyimpulan akhir	Theory					
		Context	Perspective	Process	Activity	Event	Relations	Social construct	Method	Presaged	Coding				Penyimpulan sementara				
Nur Subehan	Apa latar belakang anda terjun ke sektor usaha perikanan dan kelautan?		Y											Ketidaksesuaian antara jumlah lapangan pekerjaan dengan minat bekerja pemuda. Sektor perikanan tidak menjanjikan pendapatan rutin yang pasti dan tetap. Petuh resiko. Jan kotor	Keinginan berbisnis. Minat bekerja sebagai buruh industri	Keinginan berwirausaha	Ketidaksesuaian antara jumlah lapangan pekerjaan dengan minat bekerja pemuda. Sektor perikanan tidak menjanjikan pendapatan rutin yang pasti dan tetap. Petuh resiko. Jan kotor	Ketidaksesuaian permintaan kebutuhan tenaga kerja dengan sumber daya yang ada salah satunya disebabkan oleh rendahnya motivasi masyarakat untuk melirik sektor kewirausahaan. Sementara sektor perikanan yang secara historis merupakan entitas ekonomi mereka mulai ditinggalkan karena berbagai hal seperti ketidakpastian pendapatan, bekerja di lingkungan kotor dan berhadapan dengan kondisi alam yang tidak dapat diprediksi dengan pasti.	Teori supply dan demand Teori motivasi Teori Agent sosial Intervensi sosial
	Apakah ada kelompok, individu, lembaga pemerintah/instansi terkait yang membantu anda dalam usaha bidang perikanan dan kelautan? Jika ada, apa harapan anda dan program tersebut? Jika tidak ada, apa harapan anda?		Y											Untuk dapat melaksanakan fungsi organisasi dengan lebih baik lagi dan memenuhi keinginan untuk peningkatan ketrampilan anggotanya, maka sangat diperlukan koordinasi dengan instansi lain	Selama ini yang berjalan hanya dengan Dinas Pendidikan Sedang dirintis kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan	Keinginan mengembangkan motivasi berwirausaha	Keinginan berwirausaha rendah karena kurangnya ketrampilan dan kurangnya motivasi Untuk dapat melaksanakan fungsi organisasi dengan lebih baik lagi dan memenuhi keinginan untuk peningkatan ketrampilan anggotanya, maka sangat diperlukan koordinasi dengan instansi lain	Organisasi kepemudaan sangat memerlukan dukungan instansi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat	

	Context	Perspective	Process	Activity	Event	Relations	Space	Method	Pragm	coding	semiotika	Triangulasi	Penyimpulan akhir	Theory
										Program pendampingan untuk akses bantuan pemodal, produksi dan pemasaran	Program pemberdayaan untuk masyarakat menang memerlukan tindak lanjut seperti pendampingan akses pemodal, seperti pemanfaatan CSR dari BUMN yang ada dan perluasan pasar		Kesulitan yang bisa menghambat organisasi kepemudaan dalam memulai usahanya seperti pemodal, produksi dan pemasaran	
										Kerjasama dengan PLTU Banten III (PLTU Lontar) untuk memanfaatkan program bantuan kepedulian sosial				
										Banyaknya pemuda nelayan yang menganggur saat tidak musim ikan atau tidak melaut karena cuaca buruk	Pemuda nelayan belum mempunyai keterampilan lain diluar pekerjaan utamanya sebagai nelayan		Pemberian diklat peningkatan keterampilan mutlak diperlukan supaya pemuda nelayan dapat terus berusaha memperoleh penghasilan sepanjang tahun	
Endang Surtana	Apakah ada anda terjun ke sektor usaha perikanan dan kelautan?									Belum ada pembinaan secara langsung dari instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten	Pemerintah masih diraskan kurang optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan kepada organisasi kepemudaan		Pembinaan oleh instansi pemerintah harus dapat dilaksanakan secara rutin dalam periode tertentu, dengan tujuan supaya organisasi kepemudaan dapat segera mandiri dalam akses pemodal, jaminan kelangsungan produksi dan perluasan akses pemasaran melalui jaringan yang sudah terbentuk	
	Apakah ada kelompok, individu, lembaga pemerintah/institusi terkait yang membantu anda dalam usaha bidang perikanan dan kelautan ? Jika ada, apa harapan anda dgn program tersebut? Jika tidak ada, apa harapan anda ?													

Responden : Effendy Sudarmo, A.Md.Pd (Ketua Kelompok Pemuda Pesisir "Surya Bahari" Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)

No	Responders	Transcript DF	Kategorisasi									Triangulasi	Penyimpulan akhir	Theory				
			Context	Perspec tive	Process	Activity	Event	Relations	Social construct	Method	Presaged				Coding	Penyimpulan sementara		
1	Effendi Sudarmo, A.Md.Pd	Apa latar belakang anda aktif di perkumpulan pemuda pesisir ?													Potensi perikanan lokal justru dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan pendatang. karena masih rendahnya motivasi wirausaha di sektor perikanan dan belum dipandang sebagai sektor yang menjanjikan oleh pemuda pesisir di Kecamatan Kronjo	Teori motivasi		
		Aktivitas apa saja yang anda lakukan bersama pemuda pesisir ?				√									Menampung pemuda yang menganggur Memberdayakan kelompok pemuda lokal supaya mandiri dan mampu bersaing dengan nelayan pendatang			
						√									Beberapa aktivitas di sektor perikanan seperti budidaya ikan bandeng, udang dan rumput laut	Ruang lingkup aktivitas pemuda pesisir meliputi kegiatan budidaya ikan, pembuatan kerajinan maupun penyewaan fasilitas penunjang wisata		Diperlukan pembinaan dan bimbingan lintas sektor dari instansi pemerintah untuk kelangsungan hidup organisasi pemuda pesisir dalam upaya pemberdayaan masyarakat
						√									Mengelola kerajinan pembuatan cendera mata dari bambu	penunjang wisata ziarah		
						√									Menyediakan lahan parkir, toilet umum dan menyewakan lapak pedagang kaki lima di sekitar obyek wisata P.Cangkir			

No	Kejayaan	Manajemen UJ	Context	Perspec tive	Process	Activity	Event	Relations	Social construct	Method	Presaged	Coding	Analisis semiotika	Triangulasi	Penyimpulan akhir	Theory
		Bagaimana caranya anda dapat membentuk perkumpulan pemuda pesisir ?							√			Beberapa tokoh pemuda lokal berkumpul dan bertukar ide, ditindaklanjuti pendekatan kepada kepala desa Kronjo dan Sekretaris Kecamatan Krojo	Organisasi dapat dibentuk oleh mereka yang mempunyai persamaan pola pikir, visi dan misi dalam upaya memberdayakan masyarakat pesisir pada umumnya		Pembentukan kelentangan untuk menjalankan aktivitas pemberdayaan diperlukan kesamaan pola pikir, visi, misi dari pendiri organisasi serta harus didukung oleh pemerintah sebagai regulator	
		Apa tujuan anda membentuk perkumpulan pemuda pesisir ?		√					√			Dana dihimpun dari iuran pemuda dan sumbangan tokoh setempat	Organisasi pemuda pesisir berfungsi sebagai wadah menumbuhkan kreativitas pemuda dan tempat yang sesuai untuk menanamkan jiwa wirausaha		Sebagai organisasi kepemudaan yang bersifat terbuka, akan lebih berwarna jika didalamnya dapat dihimpun berbagai kreativitas pemuda anggotanya dalam upaya membangun kewirausahaan di kalangan pemuda.	
				√								Sebagai sarana untuk memunculkan jiwa wirausaha di lingkungan pemuda pesisir dengan menggarap sektor perikanan dan Kerajinan				

Responders	Transcript Dr	Context	Persiyec tive	Process	Activity	Event	Relations	Construct	Method	Presaged	sementara		
	Bagaimana peran pemerintah/swasta dalam mengembangkan kelompok yang anda bina						√			Pemerintah berperan sebagai pemberi materi teknis budidaya, akses permodalan dan pembinaan keolahragaan pesisir	Pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi kepemudaan yang mencoba untuk berwirausaha dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta sesuai kewenangan dan kepentingannya.		Dalam program pemberdayaan masyarakat, sangat diperlukan adanya sinergi yang harmonis antara pemerintah, swasta maupun stakeholder lain, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
	Kemampuan apa saja yang anda miliki untuk melakukan pemberdayaan terhadap pemuda pesisir ?				√		√			Mempunyai sertifikat pemuda pelopor tingkat Propinsi yang dapat digunakan untuk memberikan pembekalan ketrampilan dan menjadi narasumber dalam kegiatan pemberdayaan pemuda di tingkat Kabupaten	Menanamkan jiwa kewirausahaan harus didukung dengan pengetahuan yang sesuai dan diperlukan contoh nyata dalam kehidupan supaya dapat dipahami dengan mudah atau jika perlu dapat ditonjolkan oleh orang lain.		Bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman sangat diperlukan dalam berperan sebagai motivator kewirausahaan
	Menurut anda apa potensi yang dimiliki oleh pemuda pesisir yang anda organisir ?				√		√			Pengalaman sebagai nelayan dari tahun 1996 - 2002	Proses pemberdayaan dapat dimulai dari apa yang menjadi kesukaan dari obyek		Potensi dari obyek pemberdayaan apabila dibandingkan dengan peningkatan yang sesuai, akan menjadi landasan yang kuat bagi

No. Responders	Transcript/PTUK	Context	Participative	Process	Activity	Event	Relations	Social Construct	Method	Researcher	Setting	Study Population/semi-structured	Transcript	Penyimpulan akhir	Theory
	Program apa saja yang anda buat untuk membedayakan pemuda pesisir ?				√						Pengolahan ikan jambal sebagai pekerjaan sampingan saat tidak pergi melaut	Sebagai organisasi yang belum mandiri sepenuhnya, maka kegiatannya masih dibatasi pada pemanfaatan potensi wilayah dalam jangka pendek	Program yang dapat dijalankan oleh suatu organisasi di awal keberadaannya sebaiknya tidak terlalu banyak namun fokus kepada pemanfaatan potensi wilayah yang dapat memberikan hasil dalam jangka pendek.		
	Kesulitan apa yang anda alami untuk melakukan pemberdayaan terhadap pemuda pesisir ?		√		√						Memerlukan waktu yang lama untuk menyerap materi pelatihan keterampilan	Ketersediaan SDM Pemuda yang mempunyai motivasi kuat untuk mandiri dengan berwirusaha dipisahkan berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan pemuda pesisir	Keberhasilan suatu program pemberdayaan, salah satunya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya motivasi untuk berubah dari obyek program pemberdayaan tersebut.		
				√							Pembuatan kerajinan dari bambu				
					√						Pelatihan dan mengikuti kegiatan magang di pengusaha budidaya bandeng dan udang				
											Pembuatan bagan pemancingan				
											Produksi perikanan dari budidaya bandeng belum digelar serius				

Responders	Transcript DF	Context	Perspec- tive	Process	Activity	Event	Relations	Construct	Method	Presnged	Sememaru pemberdayaan	kesemuaan program pemberdayaan
							√					
			√									
	Menurut anda apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pemuda pesisir ?		√					√				Keberhasilan dalam berwirausaha dapat ditentukan oleh faktor dari dalam maupun dari luar. Namun untuk menjadi wirausahawan yang berhasil, harus mempunyai motivasi yang kuat dan keberanian mengambil resiko.
			√									
			√									
	Menurut anda bagaimana strategi pemberdayaan pemuda pesisir yang efektif?						√					Untuk dapat menjadi wirausahawan yang berhasil, dapat melalui bimbingan dan pelatihan ataupun mencontoh pola pikir dan tingkah laku wirausahawan yang sudah berhasil.
					√							

No	Responders	Transcript/Df	Jangka							Coding	Penyimpulan sementara	Triangulasi	Penyimpulan akhir	Theory		
			Context	Perpective	Process	Activity	Event	Relations	Social Construct						Method	Presaged
1	Drs. Iratmoko	Bagaimana sikap instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?			√				√				Organisasi kepemudaan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, perlu dukungan sejak dini baik berupa kebijakan ataupun keseripatan pelatihan		Pemerintah sebagai regulator dan pengambil kebijakan publik sangat diperlukan dukungannya dalam program pemberdayaan pemuda pesisir	
		Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?			√			√		Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)		Program yang diperkirakan dapat membantu pemberdayaan pemuda seperti kepeloporan, pendampingan dan pelatihan		Melalui kegiatan kepeloporan, pendampingan, dan pelatihan, diharapkan pemuda dapat lebih mudah dalam memperoleh akses permodalan, kelanjutan produksi dan pemasaran		
		Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?			√			√		Pelatihan kewirausahaan pemuda Bantuan permodalan berupa alat-alat produksi Pendampingan akses permodalan		Peningkatan kemampuan fisik dan mental pemuda dalam menghadapi kompetisi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan		Kegiatan kepeloporan dan pelatihan sangat membantu membangkitkan motivasi kewirausahaan pemuda		

No. Papan/Unit	Isi Papan/Unit	Context	Respective	Process	Activity	Event	Relations	Signal	Method	Respon	Goal	Outcome	Intelligence	Penyimpulan/akhir	Theory
						√					Mengajarkan olahraga pantai seperti bola volley dan bola sundul				
	Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?		√								Semangat dan motivasi pemuda untuk mandiri masih lemah	Pemuda pesisir saat ini dihadapkan kepada pola pikir pragmatis, rendah motivasi dan kurang suka bekerja keras		Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan kepada pemuda terganung kepada motivasi yang dimiliki, pola pikir untuk mandiri dan semangat pantang menyerah dari pemuda itu sendiri	
	√										Pola pikir pragmatis, ingin segera berhasil, tidak sabar dan kurang bekerja keras				
	√										Jumlah pengangguran yang semakin bertambah	Kualitas SDM Pemuda juga ikut mempengaruhi dalam peningkatan kemampuan keterampilan dan kepedulian terhadap sekitar		Menumbuhkembangkan motivasi kewirausahaan akan mengabdikan hambatan jika diberikan kepada SDM pemuda yang kurang berkualitas secara mental dan tumbuh besar di lingkungan industri	
	√										Relatif tinggi angka putus sekolah, rata-rata hanya tamat SMP atau maksimal lulus SMA				
	√										Kurang kesadarannya terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan				
	√										Pemberian bantuan alat permukiman kepada kelompok pemuda yang kompetitif	Pemberian bantuan alat produksi dapat menjadi salah satu pemicu kelompok		Menumbuhkembangkan motivasi kewirausahaan dapat dikerjakan dengan koordinasi yang baik antar lintas sektor lingkup pemerintah,	
	√										Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?				

Context	Process	Activity	Event	Relations	Method	Presaged	Outcome	swasta dan tokoh masyarakat yang berpengaruh
		√					Pendekatan kepada tokoh masyarakat seperti kaum ulama dan tokoh budaya	perwujudan untuk berwirausaha
		√					Koordinasi antar instansi	

Responden : Drs. H. Teteng Jumara, MM (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang)

No	Responders	Transcript DF	Context	Perspective	Process	Activity	Event	Relations	Social construct	Method	Message	Coding	Penyimpulan sementara	Triangulasi	Penyimpulan akhir	Theory
1	Drs. H. Teteng Jumara, MM	Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?						✓				Sangat mendukung	Organisasi kepemudaan untuk pemberdayaan perlu diukung dengan pembinaan, pendampingan dan bimbingan serta kesempatan pelatihan		Pemerintah harus hadir melalui peranan pembinaan, bimbingan dan kebijakan yang berpihak dalam program pemberdayaan pemuda pesisir	
		Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?				✓		✓				Pembinaan dalam budidaya bandeng, udang dan rumput laut	Program yang dapat membantu pemberdayaan pemuda seperti pelatihan budidaya, penangkapan, pengolahan dan konservasi pantai		Melalui kegiatan pelatihan budidaya, penangkapan, pengolahan dan konservasi pantai, diharapkan pemuda dapat lebih berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pada umumnya ataupun pemuda pada khususnya	
		Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?					✓	✓				Pengembangan produk olahan dari ikan	Peningkatan peran pemuda dalam program pemberdayaan, dipengaruhi juga oleh ada atau tidaknya		Kegiatan pelatihan dan kemudahan akses permodalan sangat membantu meningkatkan motivasi kewirausahaan pemuda	

Aspek yang diteliti	Context	Process	Activity	Event	Relations	Method	Goaling	Instrument	Triangulasi	Penyimpulan akhir	Theory
Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?		√	√		√		Koordinasi antar instansi masih lemah	koordinasi antar instansi yang baik diperlukan untuk melanjutkan program pemberdayaan pemuda pesisir		Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan berkembang kepada mereka	
				√	√		Masih terbatasnya pemahaman pemuda tentang bantuan permodalan				
					√		Pengembangan usaha perikanan masih terkendala penanaman.				
					√		Dalam POKWASMAS terkendala tidak adanya sarana kapal patroli	Menumbuhkan kewirausahaan kepada pemuda dapat melalui perubahan perilaku dan pola pikir yang memertukan waktu lama		Perubahan perilaku dan pola pikir untuk memunculkan jiwa kewirausahaan harus berlangsung secara masif, intensif dan terus menerus, serta melibatkan banyak pihak dengan pemannya masing-masing	
Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?			√		√		Koordinasi antar instansi masih lemah				
		√					Mengubah perilaku dan pola pikir pemuda perlu waktu panjang				Teori perilaku

Responsitas	Context	Process	Activity	Event	Relation	Method	Presaged	semencing	
	Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?	√				Memberikan contoh teladan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir		Kelembagaan yang definitif dengan dukungan penuh dari pemerintah, dapat berfungsi sebagai tempat mencetak kader wirausaha pemuda	Pemberdayaan pemuda dapat lebih mudah dilaksanakan apabila pemuda dengan motivasi dan pola pikir yang sama membentuk kelembagaan sebagai tempat untuk berkreasi dan menciptakan iklim kompetisi untuk menjadi calon wirausaha yang berhasil
		√				Membentuk kelembagaan pemuda yang definitif dan jelas tujuannya, kemudian dibina dan diberi kemudahan akses			

Responden : R. Drajat Subagio, S.Pi, M.Si (Kepala Seksi Implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Responders	Transcript/DF	Jaka										Triangulasi	Penyimpulan akhir	Theory			
		Context	Perspec- tive	Process	Activity	Event	Relations	Social construct	Method	Assesged	Coding				Penyimpulan sementara		
1 R. Drajat Subagio, S.Pi, M.Si	Bagaimana sikap Instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?						√								Upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas SDM pemuda dapat melalui bimbingan teknis yang terstruktur dengan baik dan spesifik sesuai kebutuhan masyarakat pesisir		
				√													
	Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?															Upaya peningkatan kualitas SDM Pemuda pesisir, diharapkan dapat mengurangi laju urbanisasi generasi muda dari masyarakat nelayan di wilayah pesisir ke kota kota besar dalam rangka mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak	
					√												
							√										

Context	Activity	Event	Relationships	Method	Message	Goal	Learning Outcome	Reflection	Theory
<p>Apakah yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?</p>	✓					<p>Meningkatnya kualitas SDM pemuda nelayan dan menjadi agen perubahan partisipatif</p>	<p>Pemahaman jiwa kewirausahaan memerlukan tahapan seperti masa pendidikan dan pelatihan serta pemberian BLM.</p> <p>Dilanjutkan dengan masa perintisan usaha dan pendampingan. Dan terakhir, masa pengembangan usaha</p>	<p>Memumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan memertukan waktu dan proses yang lama, dimulai dari memunculkan motivasi dan keinginan mandiri, kesempnaan pelatihan dan peningkatan keterampilan, pendampingan usaha dan penyediaan kelangsungan usaha</p>	<p>Memumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan memertukan waktu dan proses yang lama, dimulai dari memunculkan motivasi dan keinginan mandiri, kesempnaan pelatihan dan peningkatan keterampilan, pendampingan usaha dan penyediaan kelangsungan usaha</p>
<p>Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?</p>						<p>Kebertangsaan peran serta dan partisipasi masyarakat lingkungan sekitarnya</p>	<p>Program pemberdayaan tidak dapat berjalan baik dan terus menerus tanpa partisipasi aktif masyarakat sebagai pemanfaat program.</p>	<p>Program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat penerima manfaat dapat ikut berperan yang didukung dengan jalan ketirnaan dan keterlibatan penuh pihak yang berkepentingan melalui koordinasi yang baik</p>	<p>Program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat penerima manfaat dapat ikut berperan yang didukung dengan jalan ketirnaan dan keterlibatan penuh pihak yang berkepentingan melalui koordinasi yang baik</p>
<p>Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?</p>	✓					<p>Rendahnya tingkat adopsi teknologi tepat guna oleh pementaat program dan masyarakat</p>	<p>Permasalahan yang dihadapi oleh peserta program pemberdayaan terbagi dalam tiga kelompok yaitu masalah teknis, masalah ekonomis dan masalah sosial.</p>	<p>Untuk menciptakan wirasahawan muda sektor kelautan dan perikanan yang tangguh, sangat diperlukan upaya pemberdayaan yang baik dan berlangsung berkesinambungan ditunjang dengan kemampuan mengatasi berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis.</p>	<p>Untuk menciptakan wirasahawan muda sektor kelautan dan perikanan yang tangguh, sangat diperlukan upaya pemberdayaan yang baik dan berlangsung berkesinambungan ditunjang dengan kemampuan mengatasi berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis.</p>

Responders	Transcript DK	Context	Perspec- tive	Process	Activity	Event	Relations	Construct	Method	Presaged	Seemingly
								Sebagian pelaksana- dan peserta program menganggap program ini hanya proyek			
			√					Nilai bantuan langsung masyarakat belum memenuhi skala ekonomi usaha, sulitnya pemasaran dan mencari modal tambahan			
						√		Pendampingan teknis oleh tenaga pendamping atau dinas terkait masih kurang			
	Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?				√			Kader pengelola sumberdaya laut di kawasan pesisir harus dididik secara terstruktur dan khusus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk berwirausaha, dapat dilakukan melalui program pendidikan yang terstruktur dengan baik dan berupaya penciptakan karakter yang mandiri, tangguh dan penuh kreasi		Unikur percepatan perubahan masyarakat pesisir agar lebih berdaya, maka sumberdaya laut dikawasan pesisir harus dikelola oleh sumberdaya yang profesional dan berkarakter
					√			Pendidikan Perikanan berbasis Masyarakat Pesisir			

Responden : Ir. H. Rathoyo Rasdani, MBA (Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga)

No	Respondents	Transcript DF	Jaka								Coding	Penyimpulan Sementara	Triangulasi	Penyimpulan Akhir	Theory	
			Context	Perspective	Process	Activity	Event	Relations	Social construct	Method						Purposed
1	Ir. H. Rathoyo Rasdani, MBA	Bagaimana sikap instansi anda terhadap organisasi pemuda pesisir?							√		√	Memberikan dana <i>block grant</i> untuk pengembangan kewirausahaan pemuda	Pemberdayaan pemuda perlu didukung dengan pemberian kesempatan dan kebijakan yang memiliki pengembangan kapabilitas pemuda		Pemberdayaan pemuda memerlukan koordinasi yang baik antar sektor supaya semakin terbuka kesempatan dan tidak tumpong tindak kebijakan yang dikeluarkan	
		Kebijakan/program apa saja yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan pemuda pesisir ?			√						√	Pekan Wisata Bahari yang lebih mengedepankan sisi olahraga pantai Pelatihan teknis kewirausahaan dan bantuan permodalan	Pemberdayaan pemuda pesisir dapat melalui peningkatan keterampilan berusaha maupun pembinaan fisik dan mental pemuda		Kebijakan yang dibuat untuk mendukung pemberdayaan pemuda pesisir harus memperhatikan aspek psikis dan mental dari pemuda sesuai dengan kondisi pesisir yang dihadapinya	
		Apa yang telah dihasilkan dari program yang dibuat untuk pemberdayaan pemuda pesisir ?				√					√	Terbentuknya Kelompok Wirasaha Pemuda (KWP) Program pendampingan	Merupakan suatu rantai yang baik jika kelompok pemuda pesisir yang sudah berwirausaha, didampingi dalam aktivitas usahanya dan dibantu dalam pemasarannya		Pemberdayaan pemuda akan lebih efektif jika mereka membentuk suatu kelembagaan yang definitif, sehingga memudahkan identifikasi kebutuhan dan permasalahan maupun kemungkinan pengembangan jaringan	

		Context	Process	Activity	Event	Relations	Small constit	Medium constit	Large constit	Kejane	Sejahtera	Trianggulasi	Penyimpulan akhir	Theory
					√					Expo hasil karya kelompok wirasusaha pemuda ke luar negeri				
		Aspek apa saja yang belum berhasil dicapai dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?					√			Koordinasi lintas sektor masih lemah	Kesinambungan program pemberdayaan memerlukan koordinasi yang kuat antar instansi		Program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama dan keterlibatan stakeholder yang bertanggung dengan koordinasi yang baik	
		Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan pemuda pesisir ?				√				Koordinasi antar instansi masih lemah dan pendekatan penecahan masalah hanya berlatar belakang bidang masing-masing	Kebijakan pemberdayaan kewirausahaan pemuda meliputi upaya menumbuhkan motivasi wirasusaha, mendorong munculnya cembrio wirasahawan muda, dan pemberian kesempatan untuk berkembang		Keberpriakan pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda perlu dapat diwujudkan melalui mekanisme koordinasi antar instansi yang baik sesuai dengan perannya masing-masing	
					√					Menumbuhkan motivasi untuk wirasaha bagi pemuda	wirasahawan muda, dan pemberian kesempatan untuk berkembang			
					√					Kebertanjutan kebijakan yang mendorong tumbuhnya cembrio wirasaha				
										Kesempatan pengembangan kewirausahaan				

No	Kategori	Context	Strategic	Process	Activity	Event	Relations	Construct	Method/Preresence	Pemberdayaan	Pembentukan	kelembagaan	Pembentukan	kelembagaan	Pembentukan	kelembagaan	Pembentukan	kelembagaan	Pembentukan
		Bagaimana model pemberdayaan pemuda pesisir yang diterapkan oleh instansi anda ?			√					Pemberdayaan kewirausahaan pemuda yang tidak sektoral dan memenuhi 2 kriteria yaitu berusia 16 – 30 tahun, mempunyai talenta bisnis dalam kelompok, dan kreativitas yang muncul	Pembentukan kelembagaan pendukung program pemberdayaan pemuda melalui kewirausahaan dapat disesuaikan dengan potensi, kreasi dan inovasi yang dimiliki kelompok wirausaha pemuda	Pembentukan kelembagaan untuk mendukung pemberdayaan pemuda melalui kewirausahaan perlu dipersiapkan dengan baik sesuai perundangan yang berlaku							
										Membentuk PKP (Pusat Kewirausahaan Pemuda) di kabupaten/kota									
										Membentuk LPKP (Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda) yang khusus menangani permodalan kewirausahaan pemuda									